



Walikota Pariaman
Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si



Wakil Walikota Pariaman
Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM

**PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
2023**

KOTA PARIAMAN



SABIDUAK SADAYUANG



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya perodesasi dokumen perencanaan menengah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah Kota Pariaman tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Pasal 2

RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan pedoman :

- a. pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan, sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merupakan program prioritas pembangunan selama (tiga) tahun sehingga mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai kondisi dan karakteristik daerah, dan ;
- b. pemerintah daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

RPD Kota Pariaman Tahun 2024 -2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2015 - 2025;
- c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman 2018 -2022;

Pasal 4

- (1) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum;
 - c. Bab III gambaran keuangan daerah;
 - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis;

- e. Bab V tujuan dan sasaran;
 - f. Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program prioritas;
 - g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. Bab X penutup.
- (2) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Beppeada melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026; dan
 - b. hasil RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan, dan;
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


- 2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTUBALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 13



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 30 Maret 2023

Tentang :

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 13 TAHUN 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2023**



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
	1.3 Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain.....	5
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN UMUM	10
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	11
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	26
	2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	47
	2.4 Aspek Pelayanan Umum	54
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	126
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Tahun 2016-2020.....	127
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	146
	3.3 Kerangka Pendanaan.....	157
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-STRATEGIS	171
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	173
	4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	221
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	269
	5.1 Tujuan dan Sasaran.....	270
	5.2 Arsitektur Kinerja atau Cascading Kinerja	288



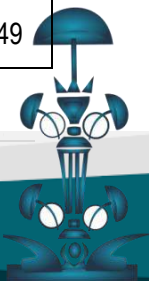


BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	299
	6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran	299
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	321
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	329
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	353
	8.1 Indikator Kinerja Utama	354
	8.2 Indikator Kinerja Daerah	360
BAB IX	PENUTUP.....	395
	9.1 Kaidah Transisi	396
	9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	396



DAFTAR TABEL

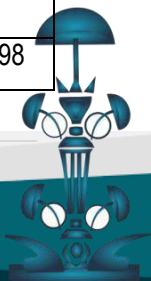
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman.....	11
Tabel 2.2	Kondisi Topografi Kota Pariaman.....	13
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman.....	15
Tabel 2.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan.....	16
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2022.....	16
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	23
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2022.....	24
Tabel 2.8	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018-2022.....	24
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	26
Tabel 2.10	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	28
Tabel 2.11	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah).....	28
Tabel 2.12	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	29
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah).....	33
Tabel 2.15	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah).....	34
Tabel 2.16	Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	34
Tabel 2.17	Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	37
Tabel 2.18	Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	41
Tabel 2.19	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	42
Tabel 2.20	Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022..	44
Tabel 2.21	Indikator Urusan Ketenagakerjaan.....	46
Tabel 2.22	Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2018-2022...	47
Tabel 2.24	Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 (Juta/Rupiah).....	49



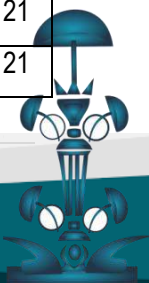
Tabel 2.25	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022.....	50
Tabel 2.26	Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	50
Tabel 2.27	Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	52
Tabel 2.28	Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	53
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	53
Tabel 2.30	Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	54
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2018– 2022.....	56
Tabel 2.33	Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	57
Tabel 2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.	57
Tabel 2.35	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	58
Tabel 2.36	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	60
Tabel 2.37	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017....	60
Tabel 2.38	Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	61
Tabel 2.39	Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022.....	62
Tabel 2.40	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2021 – 2022.....	63
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018 – 2022.....	64
Tabel 2.42	Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	65
Tabel 2.43	Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	66
Tabel 2.44	Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	66
Tabel 2.45	Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman Tahun 2022.....	67
Tabel 2.46	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman Tahun 2018 – 2020.....	70
Tabel 2.47	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	70
Tabel 2.48	Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	71
Tabel 2.49	Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	71
Tabel 2.50	Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman Tahun 2022.....	72
Tabel 2.51	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	75
Tabel 2.52	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman Tahun 2018– 2022.....	77



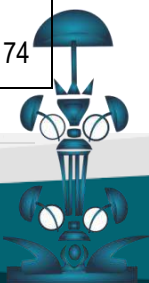
Tabel 2.53	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	77
Tabel 2.54	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman Tahun 2018– 2022.....	78
Tabel 2.55	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	79
Tabel 2.56	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman Tahun 2018-2022	79
Tabel 2.57	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2018- 2022.....	80
Tabel 2.58	Persentase RT Yang Memenuhi Syarat.....	80
Tabel 2.59	Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat.....	81
Tabel 2.60	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Pariaman Tahun 2030.....	81
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2.62	Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2.63	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	85
Tabel 2.64	Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	86
Tabel 2.65	Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	87
Tabel 2.66	Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	87
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	88
Tabel 2.68	Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	88
Tabel 2.69	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	89
Tabel 2.70	Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	90
Tabel 2.71	Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	91
Tabel 2.72	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	92
Tabel 2.73	Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2022.....	94
Tabel 2.74	Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2022.....	94
Tabel 2.75	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2022.....	95
Tabel 2.76	Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2022.....	95
Tabel 2.77	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2022 Kota Pariaman.....	96
Tabel 2.78	Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Kota Pariaman.....	96
Tabel 2.79	Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	97
Tabel 2.80	Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	98
Tabel 2.81	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	98



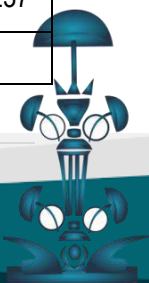
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022.....	99
Tabel 2.83	Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2022.....	99
Tabel 2.84	Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di Kota Pariaman Tahun 2022..	101
Tabel 2.85	Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2.86	Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman.....	104
Tabel 2.87	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2016 dan 2020 (koperasi)	105
Tabel 2.88	Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal Kota PariamanTahun 2018-2022.....	105
Tabel 2.89	Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	106
Tabel 2.90	Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	107
Tabel 2.91	Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	108
Tabel 2.92	Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	109
Tabel 2.93	Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	109
Tabel 2.94	Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	110
Tabel 2.95	Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2022.....	111
Tabel 2.96	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022.....	112
Tabel 2.97	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022.....	113
Tabel 2.98	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022.....	115
Tabel 2.99	Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022.....	116
Tabel 2.100	Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018-2022...	116
Tabel 2.101	Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir.....	113
Tabel 2.101	Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	117
Tabel 2.102	Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022.....	117
Tabel 2.103	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022....	11
Tabel 2.104	Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	118
Tabel 2.105	Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	119
Tabel 2.106	Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator.....	121
Tabel 2.107	Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2022.....	121



Tabel 2.108	Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	122
Tabel 2.109	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	123
Tabel 2.110	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun 2018-2022.	124
Tabel 2.111	Rasio Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2018 -2022.....	124
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022..	128
Tabel 3.2	Rata-rata Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	129
Tabel 3.3	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022...	133
Tabel 3.4	Kontribusi rata-rata sub belanja daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	135
Tabel 3.5	Komposisi Rata-rata Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	136
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	137
Tabel 3.7	Perkembangan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	139
Tabel 3.8	Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	145
Tabel 3.9	Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	145
Tabel 3.10	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2018–2022.....	147
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018–2022.....	149
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018–2022.....	150
Tabel 3.13	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018–2022.....	151
Tabel 3.14	Target Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.....	152
Tabel 3.15	Penutup Defisit Rill Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018–2022.....	155
Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018–2022.....	156
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.....	162
Tabel 3.18	Target Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.....	164
Tabel 3.19	Target Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026.....	168
Tabel 3.20	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2022	169
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.....	173
Tabel 4.2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2018-2022)	174



Tabel 4.3	Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	174
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan: Pembangunan Ekonomi Pemerintah Kota Pariaman Masih perlu ditingkatkan.....	176
Tabel 4.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	177
Tabel 4.6	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Tahun)	178
Tabel 4.7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Tahun)	179
Tabel 4.8	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Tahun)	180
Tabel 4.9	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rp/Org/Tahun)	181
Tabel 4.10	Rumusan Permasalahan: Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.....	181
Tabel 4.11	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	185
Tabel 4.12	Rumusan Permasalahan: penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal.....	186
Tabel 4.13	Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.....	190
Tabel 4.14	Rumusan Permasalahan: Masih belum optimalnya nilai investasi.....	191
Tabel 4.15	Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.....	194
Tabel 4.16	Rumusan Permasalahan: Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	195
Tabel 4.17	Rumusan Permasalahan: Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah.....	196
Tabel 4.18	Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.....	200
Tabel 4.19	Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman.....	226
Tabel 4.20	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar.....	227
Tabel 4.21	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori Urusan.....	227
Tabel 4.22	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori SPM.....	228
Tabel 4.23	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut OPD.....	228
Tabel 4.24	Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	237
Tabel 4.25	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota	



	Pariaman Tahun 2018-2023.....	253
Tabel 4.26	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB.....	255
Tabel 5.1	Keselarasn Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005–2025.....	272
Tabel 5.2	Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja yang disertai dengan OPD Penanggung Jawab.....	273
Tabel 5.3	Keterkaitan Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Yang Disertai dengan Targetnya.....	291
Tabel 6.1	Hubungangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas	297
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024-2026.....	320
Tabel 7.1	Daftar Program Yang digunakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran periode 2024-2026.....	329
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.....	334
Tabel 7.3	Rencana Kebutuhan Belanja Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman.....	335
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman.....	337
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman....	355
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2026.....	361



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	6
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Dokumen RPD.....	7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	12
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2022.....	25
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta).....	27
Gambar 2.4	Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)	30
Gambar 2.5	Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB Kota Pariaman Tahun 2018-2022 (%).....	31
Gambar 2.6	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	32
Gambar 2.7	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	35
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	36
Gambar 2.9	Persandingan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	38
Gambar 2.10	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	39
Gambar 2.11	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	40
Gambar 2.12	Angka Rata-rata Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	42
Gambar 2.13	Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	44
Gambar 2.14	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	119





Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	129
Gambar 3.2	Komposisi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	130
Gambar 3.3	Komposisi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022.....	136
Gambar 3.4	Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	157
Gambar 3.5	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.....	158
Gambar 4.1	Mata Rantai Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	188
Gambar 4.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	221
Gambar 4.3	TPB berdasarkan 4 Pilar.....	225
Gambar 4.4	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025.....	230
Gambar 4.5	Nawacita kedua RPJMN 2020-2024.....	232
Gambar 4.6	5 Arahkan Utama Presiden.....	233
Gambar 4.7	Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025.....	244





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Wali Kota Kota Pariaman yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.



Dalam penyusunan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pariaman sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
- 24) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
- 25) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 246);

1.3. Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Dokumen Rencana Penganggaran Daerah, Serta Dokumen Rencana Pembangunan Antar Daerah.

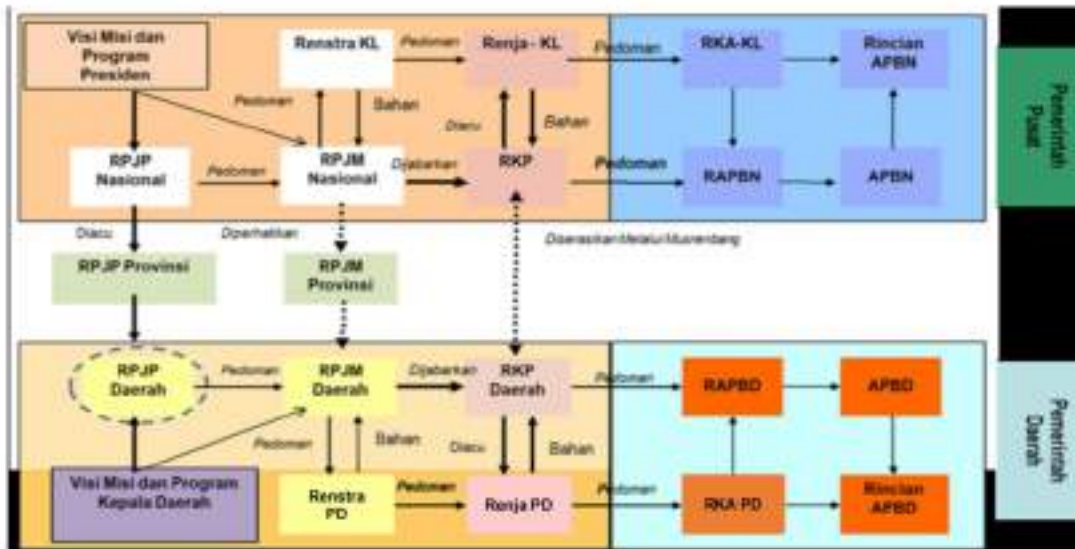
Penyusunan RPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kota Pariaman, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota Pariaman agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang, untuk itu penyusunan RPD tersebut harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan



pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RTRW Kota Pariaman merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD), hubungan tersebut tergambar di Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Pariaman secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam perencanaan strategik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan program pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;



2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

Gambar 1.2
Tahapan penyusunan Dokumen RPD



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dengan struktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan antar daerah.

BAB II Gambaran Umum

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek



kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum dan. Serta bab ini juga memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pokok pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah.

BAB V Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sebagai arah langkah dalam menentukan program-program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 3 (Tiga) tahun kedepan mulai dari Tahun 2024-2026, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif dan target kinerja

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB IX Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan





pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024- 2026.





BAB II

GAMBARAN UMUM



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kota Pariaman.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002, dimana terletak dalam posisi geografis antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 73,36 Km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak dengan panjang garis pantai 12 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan dengan 71 kelurahan/desa. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Jumlah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah (Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022

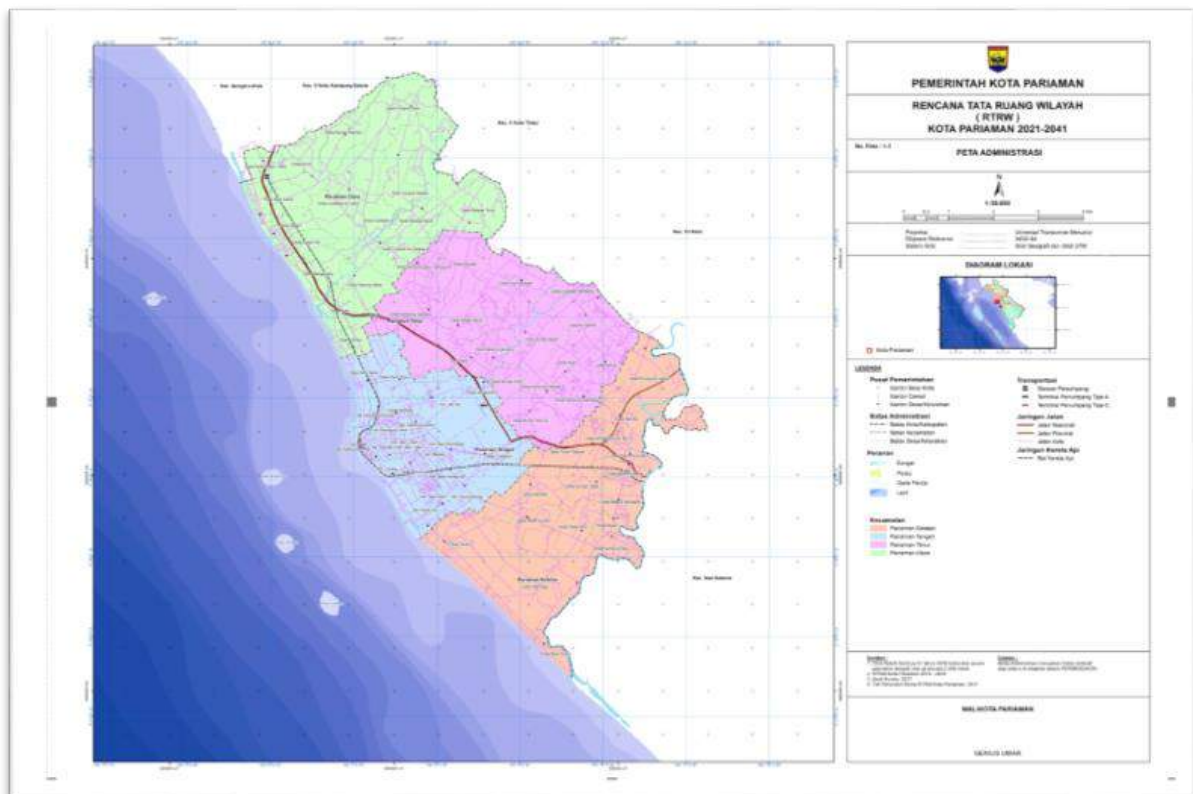


Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Pariaman



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042



2.1.1.2 Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil : Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
Datar (0-3%)	6.203	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0.35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2.99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

2.1.1.3 Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal).

Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tiku, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.



2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batu apung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batu apung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953).

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanau, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- 1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Trophaequept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- 2) Satuan tanah Trophaequets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara.
- 3) Satuan tanah Trophaequets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah.
- 4) Satuan tanah Tropopsamments, Trophaequets dan Sulphaequets yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.



Tabel 2.3
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)
Dystropepts, Paleudults, Tropaquepts	1.713
Tropaquepts, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents	1.263
Tropaquepts, Tropohemists	1.481
Tropopsamments, Tropaquents, Sulfaquents	2.036
Total Luas	6.493

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

2.1.1.4 Hidrogeologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Pariaman termasuk kepada DAS Anai, Mangau, Manggung, Naras dan Pariaman yang berhulu di bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.1.5 Geomorfologi

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai, Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

2.1.1.6 Klimatologi

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari



kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

Tabel 2.4
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
Kota Pariaman	0 - 15	12,00

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris dengan nilai uji akurasi 2,248 meter ditambah dengan survei lapangan pada tahun 2017 dihasilkan peta penggunaan lahan eksisting Kota Pariaman.

Berdasarkan informasi citra satelit dan survei lapangan dapat dipetakan kawasan pertanian, bentang alam pesisir, lahan tidak produktif dan berbagai pemanfaatan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perhotelan, sarana sosial, dan RTH.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	Ket
1	Pemukiman	2.388,65	32,56 %	
2	Sawah	1.566,42	21,35 %	
3	Tegalan	50,87	0,69 %	
4	Kebun Campuran	2.209,87	30,12 %	
5	Perkebunan Rakyat	663,9	9,05 %	
6	Hutan	0	0,00 %	
7	Hutan Sejenis	9,2	0,13 %	
8	Semak/ Alang alang	89,50	1,22 %	
9	Kolam	0	0,00 %	
10	Lain-lain	357,59	4,87 %	
	Jumlah	7.336	100 %	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Revisi RTRWN menyebutkan bahwa Kawasan PALAPA sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) menggantikan Kota Padang Dengan pendekatan kewilayahan ini Kota Padang berfungsi sebagai kota inti dan Kota Pariaman serta Lubuk Alung sebagai kota satelit. Kawasan PALAPA dan penjabarannya lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan metropolitan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PALAPA) sebagai kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Dengan perubahan penetapan PKN ini maka konsekuensi pembangunan yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan cenderung berskala regional (lintas daerah) perlu diprogramkan di wilayah PASOPALAPA dan arus pergerakan commuter antara Kota Padang dengan Kota Pariaman dengan kereta api maupun moda angkutan mobil penumpang akan semakin tinggi. Oleh karena itu Kota Pariaman perlu menyiapkan kawasan perdagangan dan wisata secara terpadu karena akan menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan pesisir pantai yang terbentang dari Kota Pariaman – Kota Padang dan Kawasan Mandeh yang menjadi kawasan strategis wisata provinsi dan nasional.

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 11 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan : Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten kota dilaksanakan sesuai dengan norma; standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama Penataan Ruang antar bupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 bahwa Kawasan strategis wilayah kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kota lebih



bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kota;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota yang jelas;
- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kota;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota;
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

1) Kerawanan Gempa

Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng



tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan $> 6,5$ SR dapat memicu terjadinya gelombang tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 1926, 1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 R dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia.

Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang.

Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike= 70° Dip= 50° Slip= 132°) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Boundary Fault), Berdasarkan skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V – VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk periode ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 0,25 g - 0,5 g.

Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan pada intensitas V sampai VIII skala MMI.

2) Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi



penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya.

Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 – 15%) sampai sangat terjal (50 – 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi



penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan. Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan 7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan tanah. Gerakan tanah umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan Tuf Batu Apung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batu Apung dan Andesit atau Basal (Qpt). Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang berkemiringan lereng curam. Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai dari Kudu - Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah umumnya berupa longsoran bahan rombakan (debris slide).

3) Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsoran serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km² (43,4% dari luas wilayah).

4) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan rawan tsunami rendah.



Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk. Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.

Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah.

Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam dan berbukit.

5) Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus ($0,075 > 0,50$ mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat guncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman $>1,00 - 6,00$ m.

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini dapat dikurangi dengan penanaman mangrove. Untuk lebih jelasnya potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.



2.1.4 Aspek Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berikut dibawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk Kota Pariaman dari tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pariaman Utara	22.145	22.475	22.591	22.808	24.162
2.	Pariaman Tengah	30.824	30.969	31.930	32.105	33.183
3.	Pariaman Selatan	18.978	19.321	20.006	20.138	20.844
4.	Pariaman Timur	15.679	15.736	19.697	20.063	20.051
	Jumlah	87.626	88.501	94.224	95.294	98.240

Sumber : BPS Kota Pariaman Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2018 - 2022 terus meningkat. Dan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Pariaman Tengah berjumlah 33.183 (Tahun 2022). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 20.051 (Tahun 2022).

2.1.4.2 Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk brutto di Kota Pariaman merupakan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dihitung dengan menggunakan rumus :

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	-	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Luas Wilayah (Ha)

Atau



$$\text{Kepadatan Penduduk} \left(\frac{\text{Jiwa}}{\text{Ha}} \right) = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}}$$

Angka kepadatan penduduk tersebut kemudian dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu (SNI 03-1733-2004) :

- 1) Kepadatan Sangat Tinggi : Kepadatan penduduk > 400 jiwa/ha.
- 2) Kepadatan Tinggi : Kepadatan penduduk 201 s/d 400 jiwa/Ha.
- 3) Kepadatan Sedang : Kepadatan penduduk 150 s/d 200 jiwa/Ha
- 4) Kepadatan Rendah : Kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha

Dengan demikian kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dan Desa/Kelurahan Kota Pariaman di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk	
				(jiwa/Ha)	Kategori
1	Pariaman Utara	24.162	2.023	12	Rendah
2	Pariaman Tengah	33.183	1.162	29	Rendah
3	Pariaman Selatan	20.844	1.805	12	Rendah
4	Pariaman Timur	20.051	1.693	18	Rendah
Kota Pariaman		98.240	6,683	15	Rendah

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kota Pariaman paling tinggi pada tahun 2022 terdapat pada Kecamatan Pariaman Tengah, yaitu sebanyak 29 Jiwa/ha, akan tetapi menurut SNI 03-1733-2004 masih dikategorikan kepadatan rendah.

2.1.4.3 Struktur Pekerjaan Penduduk

Definisi penduduk yang bekerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja pada berbagai sektor usaha. Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2018-2022

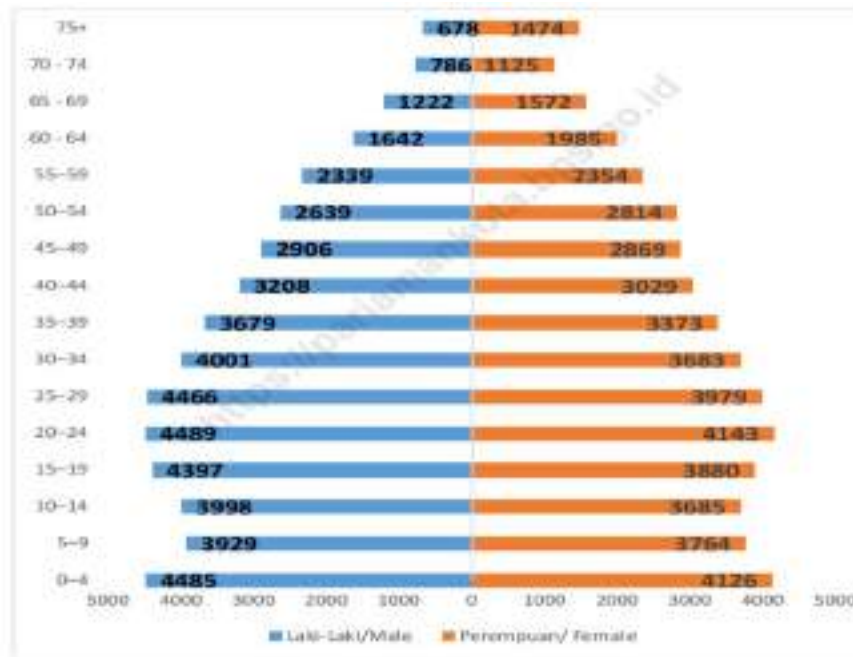
No.	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian	5 012	5 059	5 059	4 841	4.841
2.	Manufaktur	7 500	8 830	8 830	9 172	9.172
3.	Jasa	28 479	25 779	27 676	29.385	29.385
Total		40 991	39 668	39 195	43.398	43.398

Sumber: BPS Kota Pariaman, 2023



Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sektor jasa menjadi tumpuan terbesar penciptaan lapangan kerja sebesar 29.385 jiwa (Tahun 2022). Kemudian diikuti oleh sektor manufaktur sebesar 9.172 (Tahun 2022) jiwa dan Pertanian sebesar 4.841 jiwa (Tahun 2022).

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Pariaman 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat



digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

- **PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha**

Dari tahun 2019, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts 2008 (SNA 2008)* atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, dipenghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2019 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah)

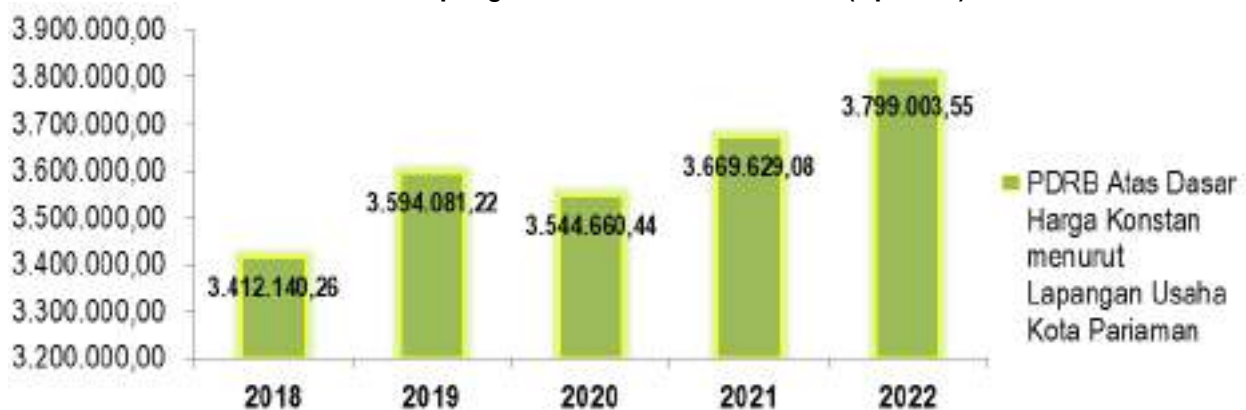
Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	591.639,08	601.884,66	604.981,97	612.910,79	620.943,52
Pertambangan & Pengalihan	63.186,74	65.230,68	62.384,19	64.040,19	65.740,15
Industri Pengolahan	277.421,52	279.839,41	273.290,44	279.597,69	286.050,50
Pengadaan Listrik, Gas	1.966,89	2.099,54	1.978,97	2.039,77	2.102,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.279,80	1.280,12	1.313,63	1.380,31	1.450,37
Konstruksi	503.507,58	542.554,50	527.585,40	538.965,58	550.591,23
Perdagangan Besar dan Eceran	540.470,22	579.060,05	573.241,65	599.883,74	627.764,05
Transportasi & Pergudangan	390.715,67	399.588,17	361.887,73	379.325,63	397.603,79
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	66.175,97	71.867,80	61.639,91	67.777,85	74.526,99



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Informasi & Komonikasi	325.583,05	355.946,94	386.372,22	410.061,98	435.204,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	92.779,15	96.219,90	97.324,13	103.399,40	109.853,91
Real Estate	94.283,30	99.383,00	99.539,37	101.681,62	103.869,97
Jasa Perusahaan	4.901,10	5.188,13	4.962,75	5.044,39	5.127,37
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	187.391,25	200.139,33	198.135,54	199.907,36	201.695,02
Jasa Pendidikan	128.942,62	139.512,00	145.713,95	149.730,30	153.857,35
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	39.808,65	42.760,00	45.785,41	48.139,14	50.613,87
Jasa Lainnya	102.087,67	111.527,00	98.523,18	105.743,34	113.492,62
PDRB	3.412.140,26	3.594.081,22	3.544.660,44	3.669.629,08	3.799.003,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Dari gambar 2.3 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHK di tahun 2018 terhitung sudah sebesar 3.412 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 3.594 triliun rupiah telah terjadi peningkatan sekitar 182 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 3.544 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 50 Milyar rupiah dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 3.669 dan 3.799 triliun.



Tabel 2.10
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,34	16,74	17,07	16,70	15,5
B	Pertambangan & Penggalian	1,85	1,82	1,76	1,75	1,75
C	Industri Pengolahan	8,13	7,79	7,71	7,62	7,5
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,76	15,09	14,88	14,69	14,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,84	16,11	16,17	16,35	16,45
H	Transportasi & Pergudangan	11,45	11,11	10,21	10,34	10,62
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,94	2,00	1,74	1,85	2,1
J	Informasi & Konomikasi	9,54	9,90	10,90	11,17	11,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,68	2,75	2,82	2,8
L	Real Estate	2,76	2,77	2,81	2,77	2,6
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,49	5,57	5,59	5,45	5,39
P	Jasa Pendidikan	3,78	3,88	4,11	4,08	4,81
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,17	1,19	1,29	1,31	1,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,99	3,10	2,78	2,88	2,98
PDRB/G DRP		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022

Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.11
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	861.148,09	914.713,15	917.578,08	943.055,69	939.243,12
Pertambangan & Penggalian	90.738,69	94.570,93	91.153,64	94.764,68	94.147,32
Industri Pengolahan	343.221,94	343.323,57	343.922,88	370.457,25	375.521,11
Pengadaan Listrik, Gas	3.624,51	4.147,14	3.946,44	4.100,82	4.208,74



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.745,16	1.805,83	1.856,31	1.961,44	1.999,85
Konstruksi	705.142,59	778.020,76	776.169,68	810.864,75	820.645,12
Perdagangan Besar dan Eceran	702.769,97	768.757,94	754.414,31	783.523,15	792.466,81
Transportasi & Pergudangan	519.572,36	540.994,01	503.618,49	536.933,98	541.267,26
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	115.545,51	131.521,29	114.663,01	128.551,86	132.529,77
Informasi & Komunikasi	344.114,61	388.496,08	420.058,75	452.107,30	469.205,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	127.415,81	135.440,00	139.028,37	151.965,98	155.468,42
Real Estate	133.887,43	143.419,00	145.171,85	149.648,18	156.109,24
Jasa Perusahaan	6.583,83	7.273,32	6.996,44	7.131,20	7.224,61
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	263.678,47	302.349,55	324.107,30	344.564,11	359.987,29
Jasa Pendidikan	194.247,73	220.700,00	231.796,83	241.071,60	256.401,12
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	54.164,15	60.803,81	66.722,33	71.491,36	78.165,44
Jasa Lainnya	148.234,78	169.096,00	152.898,18	166.463,70	174.399,22
PDRB	4.615.745,62	5.005.432,39	4.994.102,88	5.258.657,03	5.354.781,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Tabel 2.12
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

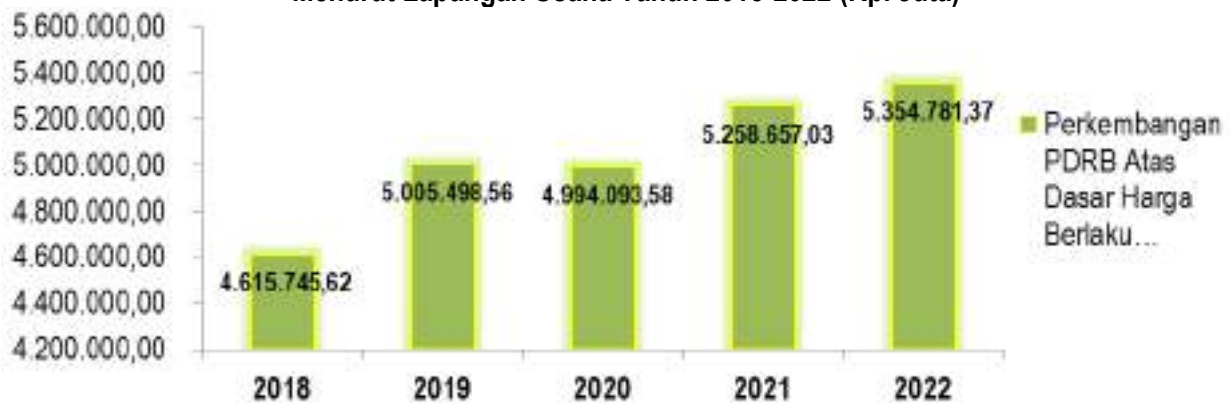
Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,66	18,27	18,37	17,93	17,42
B	Pertambangan & Penggalian	1,97	1,89	1,83	1,80	1,8
C	Industri Pengolahan	7,44	6,86	6,89	7,04	7,28
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	15,28	15,54	15,54	15,42	15,3



Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,22	15,36	15,11	14,90	14,75
H	Transportasi & Pergudangan	11,26	10,81	10,08	10,21	10,25
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,50	2,63	2,30	2,44	2,5
J	Informasi & Komonikasi	7,46	7,76	8,41	8,60	8,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,71	2,78	2,89	2,98
L	Real Estate	2,90	2,87	2,91	2,85	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,71	6,04	6,49	6,55	6,77
P	Jasa Pendidikan	4,21	4,41	4,64	4,58	4,64
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,17	1,21	1,34	1,36	1,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,21	3,38	3,06	3,17	3,21
PDRB/G DRP		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Gambar 2.4
Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Dari gambar 2.4 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHB di tahun 2018 terhitung sudah sebesar 4.615 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 5.005 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut telah terjadi peningkatan sekitar 390 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 4.994 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 11 Milyar rupiah. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 5.258 triliun dan 5.354 triliun rupiah.

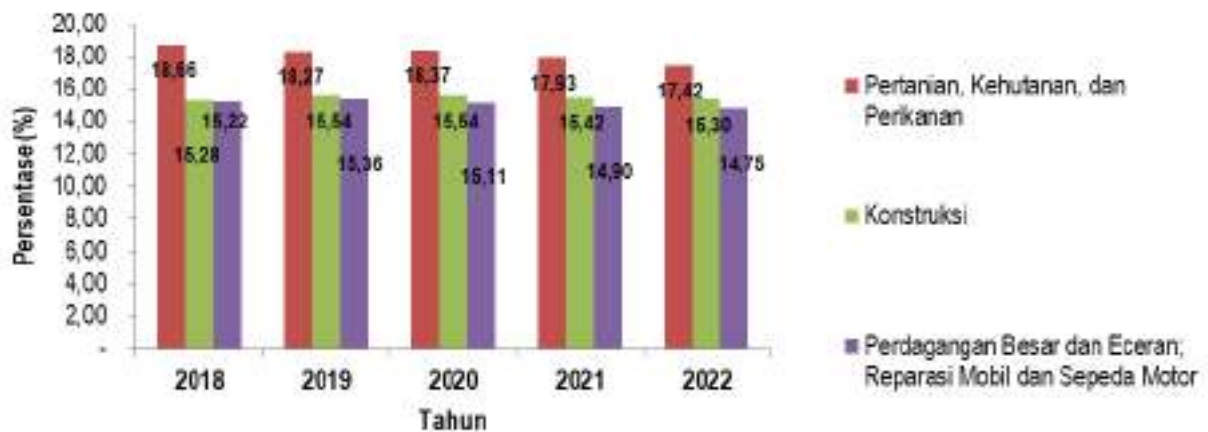


Tabel 2.13
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2022

NO	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah Tangga	52,40	52,88	53,57	52,71	-
2	Konsumsi LNPRT	1,16	1,16	1,21	1,17	-
3	Konsumsi Pemerintah	14,80	14,59	14,43	12,85	-
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,08	28,13	28,16	28,00	-
5	Perubahan Inventori	0,12	0,11	-0,03	0,14	-
6	Ekspor	3,43	3,15	2,66	5,12	-
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Gambar 2.5
Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB
Kota Pariaman Tahun 2018-2022(%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

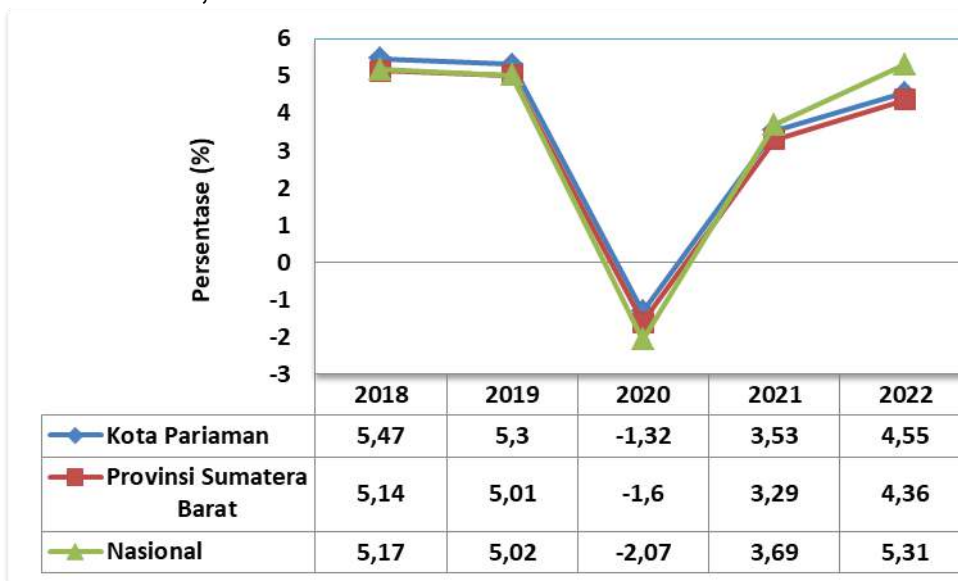
Berdasarkan Gambar 2.5 diatas menjelaskan tentang perkembangan kontribusi kategori terbesar dalam PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha jangka waktu 5 tahun terakhir (2018-2022). Dalam periode selama 5 (lima) tahun jika dirata-ratakan kontribusi yang paling besar masih sektor pertanian yaitu sebesar 18,13%. Walaupun mengalami penurunan sampai tahun 2019, pada tahun 2020 mulai mengalami peningkatan sebesar 0,1 %. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 17,93% dan 17,42%. Namun sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Dan kontribusi terbesar ke-2 adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 15,30 % pada tahun 2022. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan seperti halnya pada sektor pertanian yaitu sebesar 0,12% di tahun 2021 maupun tahun 2022. Tidak berbeda jauh dengan sektor konstruksi, kontribusi pada



sektor perdagangan dengan rata-rata sebesar 15,07 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai tahun 2019 dan mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2022. Sebagai sebuah Kota (walaupun Kota Kecil) sudah seharusnya kedepan bagaimana sektor perdagangan ini bisa memberikan kontribusi terbesar.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2018 – 2022) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan dari tahun ketahun cenderung menurun, namun LPE Kota Pariaman selalu diatas LPE Prov Sumatera Barat dan Nasional PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Grafik 2.6
Persandingan Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,55 %. Dari Grafik 2.6 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi positif Kota Pariaman lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan negatif Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Hal ini terjadi karena sudah mulai pulihnya dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Kota Pariaman khususnya dan dunia umumnya sehingga sebagian besar sektor kegiatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 5,47 % sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi masing-masing 5,3 %. Dari tahun 2018 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 karena dampak Covid 19 yang melanda dan mempengaruhi seluruh sektor sehingga



pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,32 %. Sedangkan pada tahun 2021 mulai tampak pertumbuhan yang positif dengan nilai 3,53% seiring dengan mulai penyesuaian dan adaptasi baru setelah seluruh sektor mengalami penurunan karena Covid 19. Berdasarkan informasi dari BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto.

- PDRB Berdasarkan Pengeluaran

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.257.850,58	2.441.343,47	2.683.048,58	2 771 900,36	2 852 451,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	49.991,03	53.325,75	60.681,75	61 288,12	62 587,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	637.929,77	673.432,26	722.771,00	675 977,60	682 391,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.210.087,95	1.298.584,29	1.410.395,24	1 472 453,86	1 534 628,74
Perubahan Inventori	5.213,05	4.900,96	-1.608,09	7 574,58	8 529,46
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	147.937,42	145.271,88	133.094,05	269 462,52	297 524,41
PDRB	4.309.010,19	4.616.858,62	5.008.382,55	5 258 657,03	5.438.112,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023



Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Pariaman menurut Pengeluaran
Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan (Seri 2010) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.701.908,82	1.785.629,60	1.754.233,13	1 790 177,26	1 825 356,31
Pengeluaran Konsumsi LNPR	40.746,03	45.172,71	43.050,53	43 826,00	44 298,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	432.449,43	451.983,29	409.798,67	413 262,29	415 625,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	919.777,39	966.702,46	945.488,01	959 531,49	973 324,51
Perubahan Inventori	3.474,38	-1.051,31	6.026,11	5 132,16	5 364,37
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	313.784,23	345.644,46	386.063,40	457 699,91	461 349,44
PDRB	3.412.140,28	3.594.081,21	3 544 659,85	3 669 629,10	3 681 020,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

a. PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

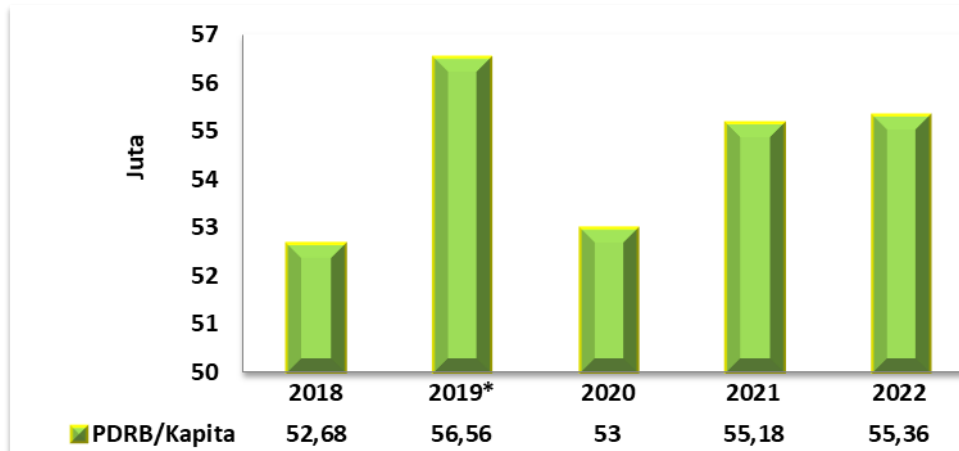
Tabel 2.16
Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

Uraian	(Dalam Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Juta)	4.616.858,61	5.008.382,53	4.994.102,88	5.258.657,03	5.354.781,37
Jumlah Penduduk	87.626	88.501	94.224	95.294	96.733
PDRB/Perkapita (Juta)	52,69	56,59	53	55,18	55,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023



Grafik 2.7
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2022 tersaji dalam gambar 2.7 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuatif seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 52,68 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 56,56 juta. Namun PDRB perkapita Kota Pariaman Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 53 juta seiring dengan menurunnya PDRB Perkapita Kota Pariaman pada Tahun 2020 tersebut yang merupakan akibat dari bencana Covid 19 yang melanda dari awal tahun 2020. Pada tahun 2021 adanya komitmen dari Pemerintah Kota Pariaman dalam pemulihan ekonomi di tengah-tengah adaptasi baru mengalami peningkatan pendapatan perkapita menjadi Rp. 55,18 juta. Hingga tahun 2022 masih terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp. 55,36 juta.

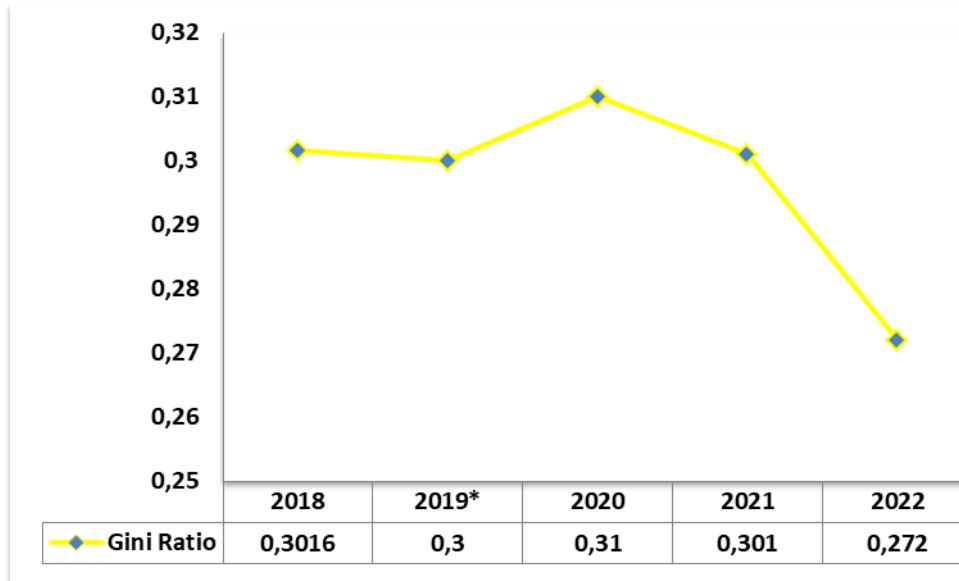
b. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:



No.	Uraian	Ket
a.	Indeks Gini < 0,3	: Ketimpangan Rendah
b.	0,3 =< Indeks Gini <= 0,5	: Ketimpangan Sedang
c.	Indeks Gini > 0,5	: Ketimpangan Tinggi

Grafik 2.8
Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Grafik 2.8 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2018 – 2022. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2018 – 2022. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2018 – 2022 secara umum berfluktuasi. Pada tahun 2018 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,3016. Tahun 2019 sedikit menurun menjadi 0,3. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi dengan nilai 0,31. Kemudian pada tahun 2021 turun lagi dengan nilai 0,301. Dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 0,272. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kategori ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).

c. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan



perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pariaman yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2018 setara Rp Rp 431.368/kapita/bulan, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 446.514/kapita/bulan, pada tahun 2020 meningkat menjadi 480.028/kapita/bulan dan pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan menjadi 495.386/kapita/bulan. Sedangkan pada tahun 2022 garis kemiskinan terus meningkat menjadi 522.932/kapita/bulan. Dari sisi persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Pariaman mengalami penurunan selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, penduduk miskin sebesar 5,20 %, tahun 2019 turun lagi menjadi 5,03 % terus berkurang menjadi 4,76 % pada tahun 2020. Serta pada tahun 2021 dan 2022 turun lagi masing-masing menjadi 4,38 % dan 4,13 %. Tabel 2.17 menunjukkan tentang Kondisi kemiskinan (Kemiskinan Makro) Kota Pariaman selama periode 2018-2022.

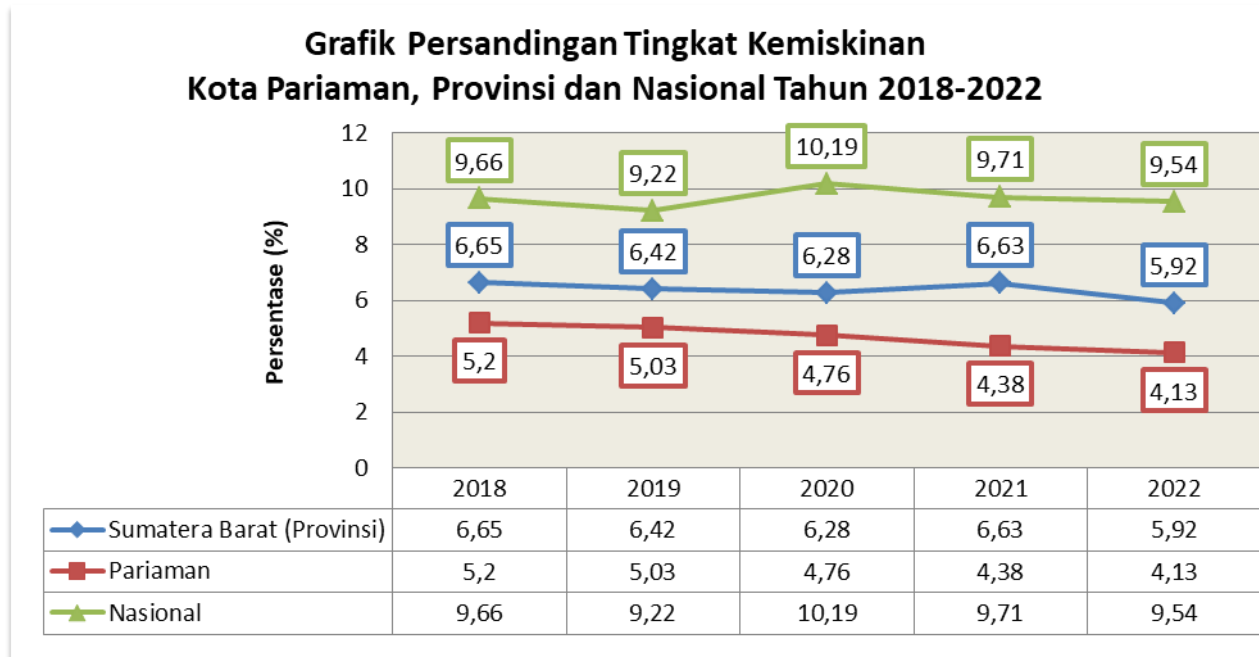
Tabel 2.17
Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (000)	87.626	88.501	94.224	95.294	96.733
2.	Jml Penduduk Miskin (000)	4.399	4.200	3.658	3.987	3.800
3.	Jumlah Rumah Tangga	23.865	24.795	26.436	27.795	
4.	Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,20	5,03	4,76	4,38	4.13
5.	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,49	0,49	0,36	0.46
6.	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,07	0,10	0,08	0.09
7.	Garis kemiskinan	431.368	446.514	480.028	495.386	522.932

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022



Gambar 2.9
Persandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

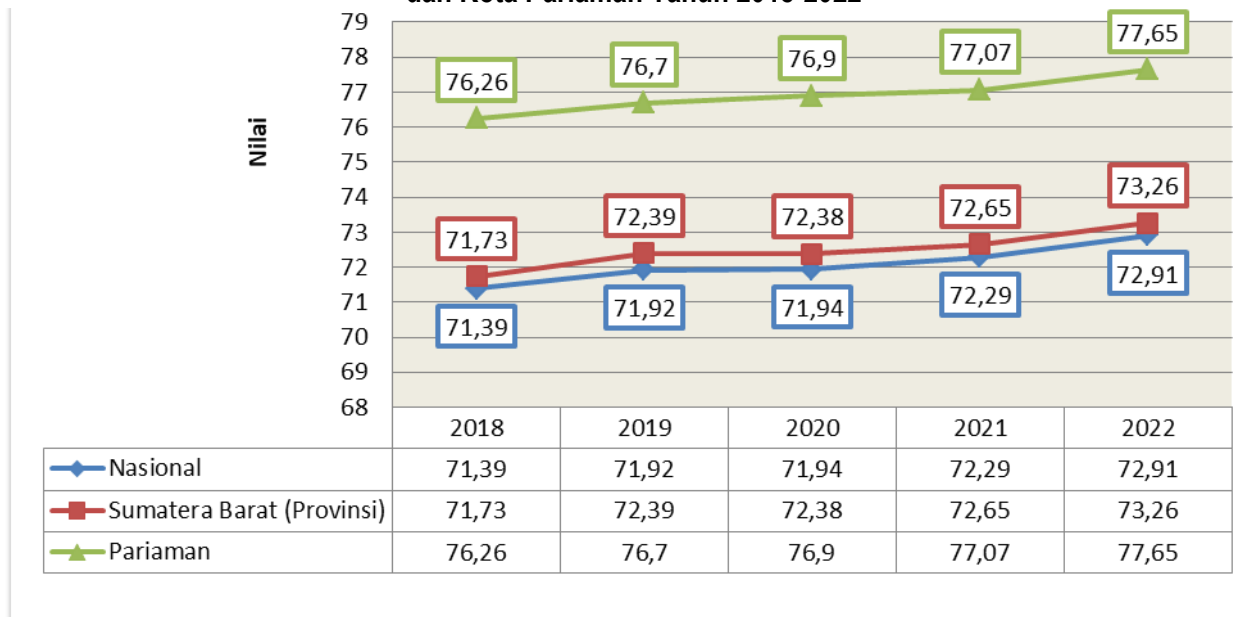
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2018-2022, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.10 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2018 capaian IPM meningkat menjadi 76,26. Dan capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,7 pada tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 76,9. Serta pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 77,07 dan 77,65. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 73,26 tahun 2022 dan IPM Nasional yang sebesar 72,91 ditahun 2022. Jika diakumulasikan, IPM Kota Pariaman telah terjadi peningkatan sebesar 0,58 selama selama tahun 2022.



Gambar 2.10
Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (AHH) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni : (1) Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). (2) Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. (3) Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

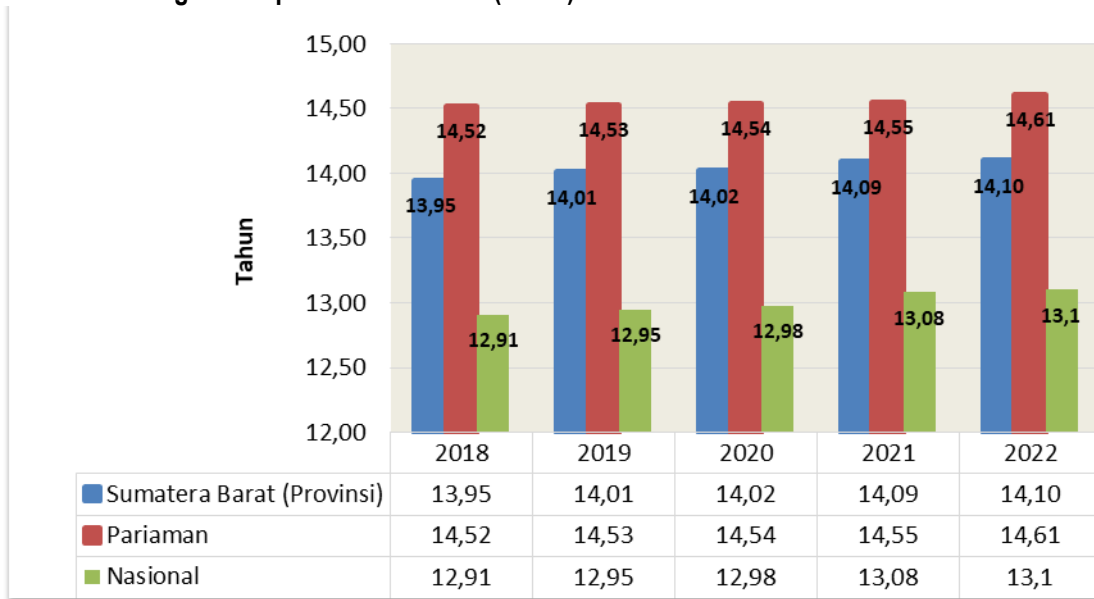
1) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang



diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Pariaman dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 2.11
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Berdasarkan grafik 2.11 diatas perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2022 AHLS Kota Pariaman sudah mencapai pada angka 14,61. Angka ini berada diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 14,10 Tahun 2022. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-4. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah
1	Padang	16,54
2	Padang Panjang	15,07
3	Bukittinggi	14,99
4	Pariaman	14,61
5	Tanah Datar	14,59
6	Kota Solok	14,34
7	Payakumbuh	14,29
8	Agam	13,88
9	Padang Pariaman	13,93
10	Pasaman Barat	13,69
11	Pesisir Selatan	13,35
12	Lima Puluh Kota	13,40
13	Sawah Lunto	13,42
14	Kab.Solok	13,30
15	Kepulauan Mentawai	12,89
16	Pasaman	12,05
17	Solok Selatan	12,73
18	Dharmasraya	12,51
19	Sijunjung	12,64
	Sumatera Barat (Provinsi)	14,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023

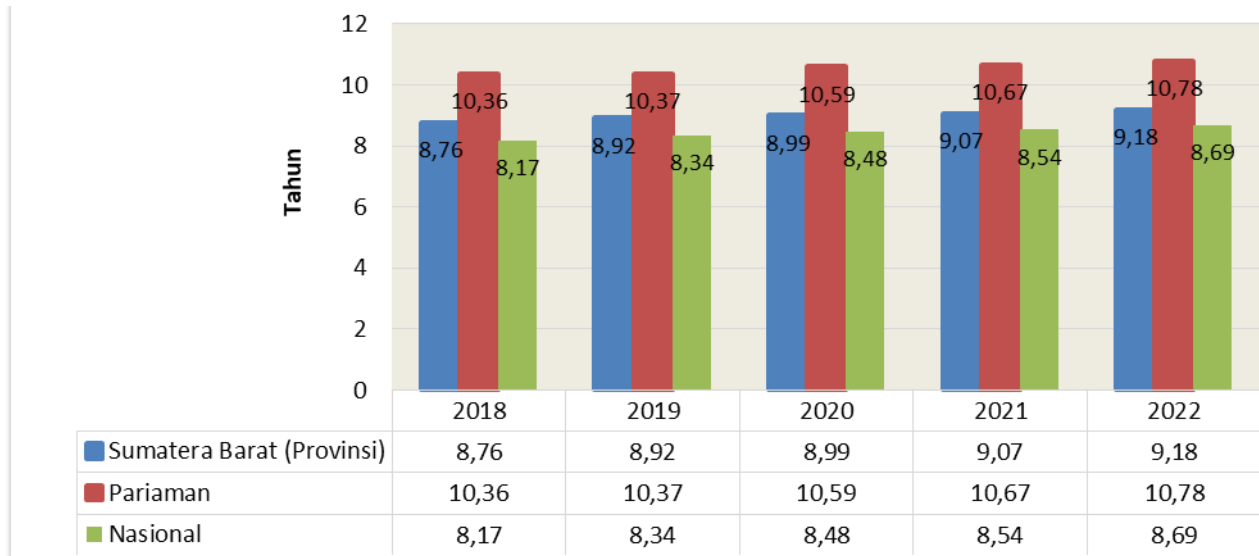
AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai 2022 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.12
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Dari grafik 2.12 diatas dapat dilihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah Kota Pariaman adalah 10,36 Tahun. Nilai rata-rata lama sekolah ini terus meningkat menjadi 10,37; 10,59 dan 10,67 secara berurut pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 10,78. Rata-rata lama sekolah Kota Pariaman berada diatas rata-rata Angka Rata Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 9,18 pada Tahun 2022. Pencapaian diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Pariaman adalah telah sampai duduk di bangku kelas DI atau memasuki DII, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Pariaman. Dan akan menuju wajib belajar 12 tahun. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Rata Rata Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-6. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1	Padang Panjang	11,92
2	Padang	11,6
3	Bukittinggi	11,63
4	Kota Solok	11,35
5	Payakumbuh	10,82
6	Pariaman	10,78



Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
7	Sawah Lunto	10,43
8	Agam	8,98
9	Tanah Datar	8,90
10	Dharmasraya	8,56
11	Solok Selatan	8,41
12	Pesisir Selatan	8,43
13	Pasaman Barat	8,55
14	Sijunjung	8,30
15	Pasaman	8,11
16	Lima Puluh Kota	8,08
17	Padang Pariaman	8,16
18	Kab.Solok	7,89
19	Kepulauan Mentawai	7,48
	Sumatera Barat (Provinsi)	9,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023

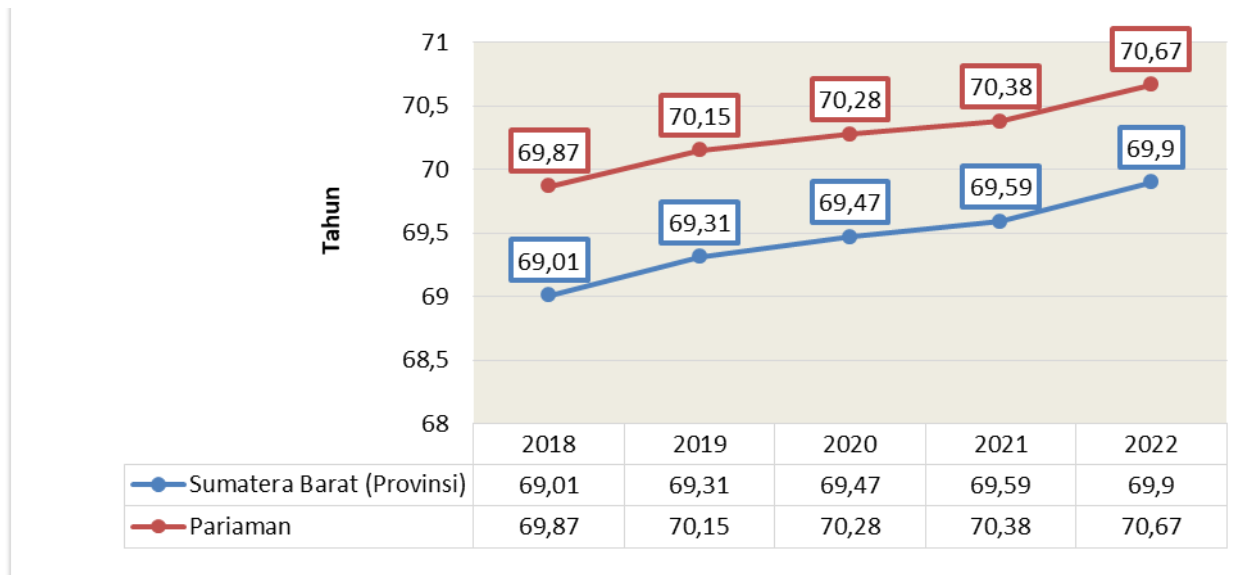
Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor–faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.



Grafik 2.13
Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sejak tahun 2018 – 2022 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sebesar 69,87. Dan pada Tahun 2019 dan 2020 meningkat lagi menjadi 70,15 dan 70,28. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dimana rata-rata lama sekolah Kota Pariaman tahun 2021 adalah 70,38 dan tahun 2022 adalah 70,67. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada diatas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 69,90 pada Tahun 2022. Dari pencapaian angka usia harapan hidup ini menggambarkan telah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-9. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
1	Bukittinggi	74,82
2	Payakumbuh	74,14
3	Padang	73,93
4	Kota Solok	74,06
5	Padang Panjang	73,02



Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Usia Harapan Hidup
6	Agam	72,89
7	Dharmasraya	71,90
8	Pesisir Selatan	71,25
9	Pariaman	70,67
10	Sawah Lunto	70,40
11	Tanah Datar	70,49
12	Lima Puluh Kota	70,08
13	Padang Pariaman	69,34
14	Kab.Solok	69,19
15	Pasaman Barat	68,25
16	Solok Selatan	68,38
17	Pasaman	67,96
18	Sijunjung	66,70
19	Kepulauan Mentawai	64,93
	Sumatera Barat (Provinsi)	69,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Pariaman, untuk angka TPT Kota Pariaman cukup berkinerja baik yang tergambar dari angka TPT dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Secara berurutan angka TPT dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu 5,82 dan 5,42 Sedangkan nilai TPT mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu 5,73 dan 6,09. Pada tahun itu berarti pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,21 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,36 % dari tahun 2020. Peningkatan nilai TPT pada tahun 2020 dan 2021 ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar sektor kegiatan dan maraknya pemberhentian hubungan kerja. Pada tahun 2022 TPT Kota Pariaman juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan persentase sebesar 5,19 % dan TPAK sebesar 61,21%. Begitu juga dengan angka TPAK Kota Pariaman dari tahun ketahun juga menggambarkan kinerja yang cukup baik ini terlihat dari angka TPAK yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu 67% dan 69,36%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dimana persentase TPAK di tahun 2020 adalah 64,16% dan tahun 2021 adalah 62,7%.



Tabel 2.21
Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

TAHUN	TPT (%)	TPAK (%)
2018	5,82	66,65
2019	5,42	68,95
2020	5,73	64,16
2021	6,09	62,70
2022	5,19	61,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Tabel 2.22
Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bekerja	39.00	40.991	39.668	39.195	39.325
2	Pengangguran Terbuka	2.368	2.348	2.411	2.542	2.641
3	Bukan Angkatan Kerja	20.704	43.339	42.079	24.833	24.960

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Dari tabel 2.22 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja baik yang bekerja, pengangguran terbuka maupun bukan angkatan kerja perkembangannya berfluktuatif dari tahun ke tahun. Seiring dengan persentase TPT dan persentase TPAK, jumlah angkatan kerja juga dan partisipasi kerja juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah 39.195, sementara angkatan kerja pengangguran terbuka adalah 2.542 sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 24.833. pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja yang bekerja 39.325 nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jumlah pengangguran terbuka juga bertambah menjadi 2.641 dan yang bukan angkatan kerja meningkat menjadi 24.960.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dari fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olah raga, dimana kegiatan tersebut memberikan nilai tambah terhadap pelestarian nilai nilai budaya, seni tradisional asli Kota Pariaman, yang akan memberikan nilai tambah dalam sektor pariwisata di kota pariaman.

Kegiatan olah raga yang digandrungi pemuda akan membawa Kota Pariaman menuju event-



event pertandingan olah raga daerah, nasional, maupun internasional. Ditahun 2018 terdapat 40 group kesenian tidak mengalami pertumbuhan sebanyak 40 group pada tahun 2021 dan mulai ada penambahan grup kesenian pada tahun 2022 dengan jumlah total 42 grup kesenian. Akan tetapi untuk jumlah gedung kesenian Kota Pariaman masih mengandalkan 2 unit gedung kesenian dari tahun 2018-2022, sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penambahan dalam kurun 5 tahun terakhir. Untuk kegiatan olah raga Kota Pariaman memiliki 61 group olah raga di tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak mengalami pertumbuhan, jumlah kegiatan olah raga dari tahun 2018 sebanyak 9 kegiatan hingga tahun 2019, dan lapangan olah raga mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2018 sebanyak 54 lapangan dan tidak ada penambahan jumlah lapangan hingga tahun 2022. Perkembangan seni budaya dan olah raga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.23
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Seni dan Budaya					
1	Jumlah Group Kesenian	40	40	40	40	42
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	2
3	Penyelenggaraan Festival Budaya	9	9	0	0	5
4	Jumlah Kawasan cagar budaya	52	52	52	52	52
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	4	4	4	4	4
6	Jumlah Sanggar Kesenian	40	40	40	40	42
	Olahraga					
7	Jumlah Klub Olah Raga	61	61	61	61	61
8	Jumlah Organisasi Olah Raga	12	35	35	35	35
9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	9	9	0	0	5
10	Lapangan Olah Raga	54	54	54	54	54

Sumber : Dinas Parbud Kota Pariaman, 2023

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.



1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. Konsumsi Rumah Tangga mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya.

PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Pengeluaran selama tahun 2018-2022 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2021 pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Pariaman sebesar 2.771 miliar rupiah atau sebesar 52,31 %. Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Pariaman sebesar 2.070,24 miliar rupiah atau sebesar 56,62 persen dari total pengeluaran. Proporsi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat lagi menjadi 55,76 persen, dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 56,59 dan meningkatlagi tahun 2020 menjadi 56,62 persen.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini tabel perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2018-2022.



Tabel 2.24
Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 (Juta/Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	2.438.538,41	2.700.130,22	2.666.068,05	2.771.900,36	3.106.007,20
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1.704.347,34	1.790.081,87	1.754.233,13	1.790.177,26	1.862.789,14
3	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53.452,41	61.547,97	59.276,67	61.288,12	64.878,35
4	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	679.560,83	720.696,43	662.091,18	675.977,60	688.719,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022

2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini. Selama rentang waktu tahun 2018-2021, kelompok pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Pariaman, kelompok pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi makanan.



Tabel 2.25
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No.	Kelompok Komoditas	Tahun										Ket
		2018		2019		2020		2021		2022		
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	
1.	Makanan	676.113	52.80	660.802.44	50.41	764.497.58	51.04	733.262	51,69	331.215	39,25	
2.	Non Makanan	604.385	47.20	650.023.16	49.59	733.254.95	48.90	685.428	48,31	512.712	60,75	

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2023

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Produktivitas Total Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	3.234.234,60	3.412.140,28	3.594.081,21	3.669.620	3.680.452
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	39.000	43.339	42.079	41.737	42.124
3.	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/ tahun)	83	79	85	87	87

Sumber : BPS Kota Pariaman dan DPMPSTP & Naker 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja Kota Pariaman tahun 2018-2022 mengalami cenderung fluktuasi. Pada tahun 2018 turun menjadi 83 juta rupiah/jiwa sedangkan ada tahun 2019 turun lagi menjadi 79 juta rupiah/jiwa. Hingga pada tahun 2020 naik lagi menjadi 85 juta rupiah/jiwa. Angka produktivitas tenaga kerja pada tahun 2021 dan 2022 sama yaitu sebesar 87 juta/jiwa/tahun. Produktivitas total daerah juga dapat dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total daerah menurut lapangan usaha diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan oleh lapangan



usaha utama tersebut. Pada tahun 2018-2022, kelompok lapangan usaha di Kota Pariaman terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

3. Niai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah *rasio antara* indeks harga yang diterima petani (*IT*) dengan indeks harga yang dibayar petani (*IB*) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Pariaman merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat. *Indeks harga yang diterima petani (IT)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). *Indeks harga yang dibayar petani (IB)* adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. $NTP > 100$ atau $IT > IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus*.

2. $NTP = 100$ atau $IT = IB$



Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *sama besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *titik impas*.

3. $NTP < 100$ atau $IT < IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit*.

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan Kota Pariaman tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Jati Tipe A.

Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 2.27 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun waktu 2018 – 2022:

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	184.182	190.452	192.325	195.560	198.455
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Bis	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

1. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2018-2022, jumlah restoran di Kota Pariaman cenderung meningkat. Berikut ini tabel perkembangan jumlah restoran di Kota Pariaman sebagai berikut :



Tabel 2.28
Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Restoran	103	90	91	91	95

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023

2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Pariaman. Kota Pariaman yang terkenal dengan wisata alam dan bahari banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di Kota Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Pariaman. Memang di Kota Pariaman belum ada hotel yang berbintang semuanya masih kategori hotel melati. Namun untuk tahun berikutnya Kota Pariaman sedang berusaha menarik investor untuk bisa berinvestasi untuk membangun hotel yang berbintang. Berikut ini tabel perkembangan jumlah hotel di Kota Pariaman sebagai berikut :

Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Hotel/Home Stay Di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penginapan/Hotel/ Home Stay	43	43	42	42	44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.30
Perkembangan Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih	4.952	5.270	5.482	5.574	57.652

Sumber : Disperkim LH, 2023

2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.31 menggambarkan indikator yang terkait dengan iklim investasi di Kota Pariaman.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lama Proses Perizinan (Rata-rata proses perizinan)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	26	26	26	26	26
3.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Detujui	6	6	6	6	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Pariaman.



2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2018-2022 di Kota Pariaman antara lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B, SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi, Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Konsep APS yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tujuan menghitung APS adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Tabel berikut memuat perkembangan nilai APS Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur dari tahun 2018-2021:



Tabel 2.32
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	2018	122.68	83.25	92.69
2	2019	113.71	77.89	113.52
3	2020	112.08	80.84	113.54
4	2021	99,92	98,41	91,25
5	2022	99,45	98,21	91,15

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Nilai APS dicari dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok tertentu kemudian dikali 100%. Data diatas pada tahun 2021 kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan nilai APS sebesar 99,92%. Sementara kelompok umur 13-15 tahun nilai APS nya sebesar 98,41% dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,25%. Selama lima tahun terakhir nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Kota Pariaman pada umumnya terjadi penurunan, pada kelompok umur 7-12 tahun hanya pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari tahun 2017. Sedangkan kelompok umur 13-15 tahun nilai APS berfluktuasi setiap tahunnya. Seperti dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2021 nilai APS Kota Pariaman kelompok umur 13-15 tahun adalah 98,41%. Pada tahun 2022 nilai APS pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,45 kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,21 dan pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,15. Nilai APS kelompok umur 16-18 tahun Kota Pariaman terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana secara berurut yaitu 92,69; 113,52; dan 113,54. Namun pada tahun 2021 nilai APS kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,25%. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar 22,29% dari tahun sebelumnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Berikut kondisi PAUD di Kota Pariaman dari Tahun 2018-2022:



Tabel 2.33
Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	APK Nasional	37,92	36,93	37,52	37,52	37,60
2	APK Propinsi	30,22	30,39	29,87	29,87	29,95
3	APK Kota Pariaman	39,21	40,76	35,79	35,79	39,25
4	Jumlah penduduk Umur 3-6 tahun kota Pariaman	6.450	6.253	6.328	6.328	6.365
5	Jumlah Siswa PAUD	1.529	1.619	1.624	1.706	1.745

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 3-6 tahun di Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk ini selaras dengan bertambahnya jumlah siswa PAUD.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Berikut rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	TK					
a	Jumlah Sekolah	102	96	99	98	98
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	5.070	4.946	4.972	4.972	4.972
c	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1 : 49	1 : 51	1 : 50	1 : 50	1:50
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Sekolah	77	78	79	79	79
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	9.962	10.058	10.317	10.317	10.325
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1 : 129	1 : 128	1 : 130	1 : 130	1:130
III	SMP/MTs/SMPLB					



NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
a	Jumlah Sekolah	12	12	12	12	12
b	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	5.246	5.086	5.096	5.096	5.096
c	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 : 437	1 : 423	1 : 424	1 : 424	1:424

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2018-2022 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat pendidikan TK berfluktuatif. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan pertumbuhan penduduk pada kelompok usia 5-7 juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sementara pada tingkat pendidikan SD rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Begitu juga pada tingkat pendidikan SMP rasio ketersediaan sekolah mengalami kenaikan. Walaupun pertumbuhan jumlah penduduk yang berfluktuatif setiap tahunnya, namun penambahan jumlah sekolah tetap dilakukan pada tahun 2018. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Pariaman telah memenuhi kebutuhan.

3. Rasio Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu proses belajar mengajar. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	TK					
a	Jumlah Guru	91	122	150	147	151
	Jumlah Guru Negeri	4	7	10	11	12
	Jumlah Guru Swasta	87	115	140	136	141
b	Jumlah Murid	1.286	1.269	1.044	1.213	1;214
	Jumlah Murid Negeri	70	77	64	92	94
	Jumlah Murid Swasta	1.329	1.192	980	1.121	1;121
c	Perbandingan Jumlah Guru	0,070	0,096	0,144	0,131	0,132



NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Terhadap Jumlah Murid					
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Guru	853	872	818	861	865
b	Jumlah Murid	10.965	10.911	10.248	11.035	11.124
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,078	0,080	0,080	0,078	0,079
III	SMP/MTs/SMPLB					
a	Jumlah Guru	573	565	537	584	592
b	Jumlah Murid	6.925	6.767	6.596	6.629	6.635
c	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	0,081	0,083	0,081	0,088	0,088

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kota Pariaman bervariasi di setiap tingkatan pendidikan. Seperti halnya pada tingkat pendidikan TK rasio jumlah guru terhadap jumlah murid bervariasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat data jumlah guru tidak selaras dengan jumlah murid. Misalnya pada tahun 2019 jumlah guru adalah 122 sedangkan jumlah murid adalah 1.269 sementara itu jumlah guru dan murid pada tahun 2020 secara berurut adalah 150 dan 1.044. Hal ini jika disandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah guru dari tahun sebelumnya namun jumlah murid mengalami penurunan. Namun demikian untuk jenjang pendidikan TK tetap memenuhi kondisi idealnya. Pada tahun 2021 rasio jumlah guru terhadap murid pada jenjang SD dan SMP terjadi peningkatan yang proporsional, berbeda dengan jenjang TK terjadi penurunan rasio karena jumlah guru sedikit berkurang namun jumlah murid yang bertambah.

Sementara untuk tingkatan pendidikan SD/setara dan SMP/setara, rasio jumlah guru dan jumlah murid mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang selalu berkurang namun jumlah guru cenderung bertambah. Sehingga untuk rasio jenjang pendidikan SD/setara dan SMP/setara memenuhi kondisi idealnya.

Rasio antara murid dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan kecukupan antara ruang kelas dan rombel yang tersedia dengan jumlah murid. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2018-2022 tertera dalam tabel dibawah ini



Tabel 2.36
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	TK					
a	Jumlah Murid	1.399	1.269	1.044	1.213	1.215
b	Jumlah Kelas	77	77	76	94	94
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,169	16,481	13,737	12,904	12,904
II	SD/MI/SDLB					
a	Jumlah Murid	10.359	10.252	10.248	11.035	11.038
b	Jumlah Kelas	532	530	522	562	562
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	19,472	19,343	19,632	19,635	19,635
III	SMP/MTs/SMPLB					
a	Jumlah Murid	6.925	6.767	6.596	6.629	6.630
b	Jumlah Kelas	230	224	222	242	242
c	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	30,109	30,210	29,711	27,393	27,394

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Data diatas menunjukkan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat pendidikan TK dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Begitu juga pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, dimana rasio murid terhadap jumlah kelas adalah 12,904. Hal ini dikarenakan jumlah murid TK pada tahun 2021 mulai meningkat dan untuk jumlah kelas juga selalu mengalami penambahan. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat SD/setara dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2020 dan 2021 mulai terjadi peningkatan. Dimana rasio pada tahun 2021 adalah 19,635. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMP/setara rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas berfluktuatif. Dari tahun 2018-2019 rasio jumlah murid terhadap jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan. Dimana pada tahun 2021 rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas adalah 27,393. Pada dasarnya pada tahun 2021 jumlah murid berkurang bertambah, dan penambahan jumlah murid ini juga diiringi dengan penambahan ruang kelas. Sehingga rasio jumlah murid dan kelas masih masuk dalam aturan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Berikut rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017:



Tabel 2.37
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut
Permendikbud No.17 Tahun 2017

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid/ Kelas
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32
3	SMA	1 : 20 – 36
4	SMK	1 : 15 – 36

Sumber : Dikpora, 2023

4. Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Berikut persentase anak putus sekolah di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.38
Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD					
	Angka Putus sekolah (%)	0,16	0,05	0,01	0,04	0,02
2	SMP/MI					
	Angka Putus sekolah (%)	0,07	0,25	0,09	0,12	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2023

Angka putus sekolah SD dan SMP cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD adalah 0,04 % sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP adalah 0,12 %. Angka putus sekolah SD pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana peningkatannya sebesar 0,03%, sedangkan untuk tingkat SMP juga mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal maupun dari lingkungan. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah.



Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

5. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Pariaman pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.39
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD					
	Persentase (%)	100	99,89	100	97,75	98,25
2	MI					
	Persentase (%)	100	99,89	100	100	100
3	SMP					
	Persentase (%)	99,47	98,90	99,79	98,88	98,95
4	MTs					
	Persentase (%)	99,63	99,20	99,88	100	100

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 angka kelulusan SD sebesar 97,75%; jenjang pendidikan SMP sebesar 98,88%; sementara untuk jenjang pendidikan MI dan MTs mencapai 100%. Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP angka kelulusan tidak sampai 100 % tetapi di atas 99 %, ini kemungkinan ada siswa yang pindah sebelum ujian kelulusan dilaksanakan sehingga mengikuti ujian di sekolah yang baru. Sedangkan untuk jenjang pendidikan MI rata-rata 100 % hanya pada tahun 2019 dengan presentase 99,89 %. Sedangkan pada tahun 2022 angka kelulusan SD sebesar 98,25%; jenjang pendidikan SMP sebesar 98,95%; sementara untuk jenjang pendidikan MI dan MTs mencapai 100%. Ini kemungkinan ada siswa yang pindah sekolah dan mengikuti ujian kelulusan di sekolah yang baru.



6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan lima tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
Tahun 2021 – 2022

NO	Uraian	Indikator	Capaian Tahun	
			2021	2022
A	Pendidikan	1 : 18 – 28		
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1.761	3.151
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	15.845	10.306
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	107

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kota Pariaman yaitu bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 1.761 orang pada tahun 2021 dan 3.151 orang pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 10.306 dari tahun sebelumnya yakni 15.845 di tahun 2021. Namun dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2021 (100) dibanding tahun 2022 (107) hal ini menunjukkan sudah munculnya kemauan anak-anak yang putus sekolah ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mulai pulihnya kondisi pandemi Covid 19 sehingga proses pembelajaran di sekolah sudah kembali stabil dan kondisi perekonomian mulai membaik.

7) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kegunaan APM ini untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM



menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APM dan APK Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.41
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Urusan Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD / MI	99,72	99,55	99,61	99,63	99,65
	SMP / MTs	69,36	70,64	73,18	73,63	73,75
2	angka partisipasi kasar (APK)					
	SD / MI	122,68	113,74	112,08	112,96	112,98
	SMP / MTs	83,25	77,64	80,49	81,56	81,75

Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023

APM dan APK Kota Pariaman untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berfluktuatif. Hanya pada tahun 2018 pada jenjang pendidikan SD/MI dengan nilai APM 100, sedangkan tahun 2018 hingga 2021 nilai APM berkisar di atas 99 %. Sementara itu, nilai APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga berfluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022 secara berurut yaitu 69,36; 70,64; 73,18; 73,63 dan 73,75. Begitu juga dengan nilai APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman cenderung berfluktuatif tetapi tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. Pada tahun 2022 nilai APK jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 112,98 dan 81,75 sedangkan pada tahun 2021 nilai APK yaitu 112,96 dan 81,56



2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1) Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi hal yang penting dalam mendukung bidang kesehatan Kota Pariaman.

Sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam dalam terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kota Pariaman seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.42
Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	4	5	5	5	5
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Poliklinik	7	6	6	8	8
4	Pustu	12	10	10	10	10
5	Puskesmas	7	7	7	7	7
6	Poskesdes	33	51	54	33	33
7	Posyandu	137	137	137	137	137
8	Apotek	13	13	13	13	13
9	Polindes	26	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel diatas bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan menambah sarana kesehatan. Disamping menyediakan tujuh puskesmas, pemerintah daerah juga menyediakan sepuluh puskesmas pembantu guna menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas. Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan 54 poskesdes dan 71 posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kota Pariaman untuk masyarakat desa sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat karena jangkauan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.



Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia yang harus terpenuhi baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan. Seluruh tenaga kesehatan harus tersebar merata dan sebanding dengan kepadatan dan penyebaran penduduk sehingga pelayanan kesehatan yang optimal akan tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Spesialis	3	3	3	4	4
2	Dokter	21	30	30	37	37
3	Dokter gigi	6	9	10	10	10
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	30	52	52	82	82
5	Farmasi/ Apoteker	18	15	31	13	13
6	Sarjana Kesehatan (S2)	8	7	7	10	11
7	Sarjana Non Kesehatan	13	0	2	21	21
8	Dokter (PTT)	0	0	0	0	0
9	Bidan (PNS)	121	116	129	137	137
10	Bidan (PTT)	7	0	0	0	0
11	Ahli Gizi	0	21	17	23	23
12	Perawat	77	78	82	83	88
	Total					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dalam usaha untuk pemenuhan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga melakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak untuk menunjang pelayanan kesehatan. Disamping itu juga mengajukan kebutuhan tenaga kesehatan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK dengan menghitung formasi yang dibutuhkan. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Berikut rasio jumlah posyandu dan Balita di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.44
Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Posyandu	Unit	137	137	137	137	137
2.	Jumlah Balita	Anak	8.042	7.986	8.517	7.976	8.115
3.	Rasio Posyandu/Jml Balita	Per 1.000 balita	17,04	17,16	16,09	17,18	16,75

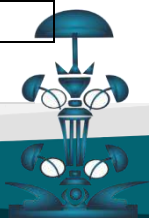
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari tahun 2018-2022 jumlah posyandu di Kota Pariaman adalah 137 posyandu. Pemerintah daerah menyediakan minimal satu posyandu aktif setiap desa agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dari nilai rasio posyandu per jumlah balita diatas dari tahun ke tahun sebenarnya tidak mengalami masalah yang berarti. Setiap posyandu pada tahun 2021 rata-rata melayani kurang lebih 17-18 balita setiap tahunnya dan masih mampu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berikut rasio jumlah kunjungan balita ke posyandu di Kota Pariaman tahun 2022.

Tabel 2.45
Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Persentase Kehadiran Di Posyandu
1	Pariaman Selatan	Marunggi	Padang Cakur	111,76%
2	Pariaman Tengah	Pauh	Taratak	59,41%
3	Pariaman Selatan	Marunggi	Pasir Sunur	68,42%
4	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Pauh Kurai Taji	65,33%
5	Pariaman Selatan	Marunggi	Palak Aneh	28,71%
6	Pariaman Timur	Santok	Cubadak Mentawai	100,00%
7	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Utara	87,14%
8	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi li	29,69%
9	Pariaman Utara	Sikapak	Tungkal Selatan	68,99%
10	Pariaman Timur	Santok	Bungo Tanjung	94,29%
11	Pariaman Utara	Naras	Manggung	62,66%
12	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa I	70,21%
13	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air	59,80%
14	Pariaman Utara	Naras	Ampalu	100,59%



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Persentase Kehadiran Di Posyandu
15	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Perak	68,12%
16	Pariaman Selatan	Marunggi	Sikabu	125,00%
17	Pariaman Timur	Santok	Kaluat	76,79%
18	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Punggung Lading	70,51%
19	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Timur	86,58%
20	Pariaman Tengah	Pauh	Pauh Barat	86,93%
21	Pariaman Timur	Santok	Sungai Pasak	70,00%
22	Pariaman Timur	Padusunan	Kp. Baru Padusunan	56,91%
23	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Marabau	127,27%
24	Pariaman Tengah	Pauh	Cimparuh	72,94%
25	Pariaman Utara	Naras	Padang Birik-Birik	100,00%
26	Pariaman Selatan	Marunggi	Marunggi	64,14%
27	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Simpang	78,26%
28	Pariaman Timur	Santok	Kajai	66,18%
29	Pariaman Timur	Padusunan	Koto Marapak	57,04%
30	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Baru	45,60%
31	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Sungai Kasai	73,68%
32	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Selatan	66,67%
33	Pariaman Selatan	Marunggi	Taluk	76,87%
34	Pariaman Tengah	Pauh	Lohong	49,14%
35	Pariaman Utara	Naras	Naras Hilir	90,51%
36	Pariaman Utara	Naras	Sintuk	85,51%
37	Pariaman Utara	Naras	Balai Naras	81,03%
38	Pariaman Timur	Santok	Kampung Tengah	146,43%
39	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Balai Kurai Taji	67,29%
40	Pariaman Timur	Padusunan	Talago Sarik	74,82%
41	Pariaman Utara	Sikapak	Cubadak Air Utara	87,10%
42	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Batang Tajongkek	66,67%
43	Pariaman Tengah	Pauh	Rawang	90,98%
44	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Mudik	69,09%
45	Pariaman Tengah	Pauh	Jawi - Jawi I	68,92%
46	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Timur	82,50%
47	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Toboh Palabah	125,00%
48	Pariaman Utara	Naras	Naras I	93,95%
49	Pariaman Timur	Padusunan	Sungai Sirah	100,00%
50	Pariaman Selatan	Marunggi	Kampung Apar	70,49%
51	Pariaman Utara	Naras	Sungai Rambai	80,00%
52	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Kereta Api	80,82%
53	Pariaman Timur	Padusunan	Pakasai	71,43%
54	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Pondok	56,33%
55	Pariaman Tengah	Pauh	Karan Aur	52,17%



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Persentase Kehadiran Di Posyandu
56	Pariaman Utara	Sikapak	Sikapak Barat	80,98%
57	Pariaman Tengah	Pauh	Jati Hilir	68,10%
58	Pariaman Selatan	Kuraitaji	Rambai	63,00%
59	Pariaman Tengah	Pauh	Jalan Baru	79,31%
60	Pariaman Timur	Padusunan	Bato	79,31%
61	Pariaman Utara	Naras	Tanjung Sabar	102,13%
62	Pariaman Tengah	Pauh	Kampung Jawa li	51,04%
63	Pariaman Tengah	Pauh	Alai Gelombang	78,43%
64	Pariaman Timur	Santok	Air Santok	86,11%
65	Pariaman Timur	Padusunan	Kampung Gadang	64,86%
66	Pariaman Utara	Naras	Apar	74,42%
67	Pariaman Tengah	Pauh	Pondok li	68,37%
68	Pariaman Tengah	Pauh	Pasir	42,73%
69	Pariaman Tengah	Pauh	Ujung Batung	133,85%
70	Pariaman Timur	Santok	Kampung Kandang	95,37%
71	Pariaman Timur	Padusunan	Batang Kabung	61,34%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Data di atas menampilkan rasio kunjungan balita ke posyandu di setiap desa. Jumlah balita di setiap desa berbeda-beda sehingga rasio kunjungan di setiap posyandu pun tidak sama. Secara umum pelayanan posyandu di setiap desa masih memadai. Ada beberapa desa yang jumlah kunjungan balita ke posyandu masih nol, ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di desa akan pentingnya pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang balita sejak dini di posyandu guna meningkatkan status gizi balita. Untuk itu masih dibutuhkannya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga masyarakat memperoleh edukasi terkait kesehatan dan tumbuh kembang balita.

3) Rasio Puskesmas, Prakter Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis di tengah masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu tercantum di dalam tabel berikut:



Tabel 2.46
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas	Unit	7	7	7	7	7
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	24	24	24	24	24
3	Jumlah Pustu	Unit	12	10	10	10	10
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	43	41	41	41	41
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	87.626	88.501	94.224	95.294	96.733
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,49	0,46	0,44	0,43	0,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah puskesmas, praktek dokter dan puskesmas pembantu per satuan penduduk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Pariaman yang mengalami peningkatan sementara jumlah sarana kesehatan yang tidak terjadi penambahan.

4) Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Berikut ditampilkan rasio jumlah rumah sakit yang ada di Kota Pariaman:

Tabel 2.47
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	4	5	5	5	5
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	87.626	88.501	94.224	95.294	96.733
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,046	0,057	0,053	0,053	0,052

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Kota Pariaman memiliki 5 rumah sakit, yaitu RSUD Kota Pariaman, RSUD Dr. Sadikin, RS Aisyiyah Pariaman, RS Tamar Medical Centre dan RSIA Citra Aguswar. Pada tahun 2019 ada penambahan satu



rumah sakit, hal ini untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat karena pasien yang datang untuk berobat tidak hanya dari dalam Kota Pariaman saja tetapi dari daerah tetangga.

5) Angka Kematian dan Kelahiran Bayi

Jumlah kematian dan kelahiran hidup bayi di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48
Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	25	21	14	16	15
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1.628	1.612	1.560	1.672	1.645

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya kematian bayi. Pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 15 bayi, ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

Angka kelahiran hidup bayi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 jumlah kelahiran bayi sebanyak 1.672 nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.560 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 1.645 bayi. Angka kelahiran ini menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pariaman. Diharapkan seluruh keluarga di Kota Pariaman dapat memperhatikan dan membentuk keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan program keluarga berencana.

Jumlah kematian ibu di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Puskesmas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Puskesmas Naras	0	1	0	0	0
2.	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0	0	0	0	0
3.	Puskesmas Pauh	0	1	0	0	0
4.	Puskesmas Kurai Taji	0	1	0	0	0
5.	Puskesmas Marunggi	0	0	0	0	0



NO	Puskesmas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Puskesmas Air Santok	0	1	0	0	0
7	Puskesmas Sikapak Barat	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	4	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Secara umum semua puskesmas yang ada di Kota Pariaman jumlah kematian ibu nihil. Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 4 orang yang tersebar di beberapa puskesmas. Pada tahun 2019 ini menjadi bahan evaluasi bagi puskesmas dan setiap pihak terkait di bidang kesehatan khususnya untuk menekan angka kematian ibu di tahun berikutnya. Hal tersebut diupayakan dengan serius dan terbukti pada tahun 2020 dimana angka kematian ibu nol (nihil). Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu adalah 0. Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu.

6) Prosentase Kasus Stunting Balita

Stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Persentase kasus stunting balita di Kota Pariaman pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.50
Pravelensi Kasus Stunting Balita di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PADANG CAKUR	14	36,8
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH	TARATAK	19	31,7
3	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PASIR SUNUR	4	13,8
4	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PAUH KURAI TAJI	14	28,6
5	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	PALAK ANEH	7	24,1
6	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	CUBADAK MENTAWAI	17	23,3
7	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL UTARA	14	23
8	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI II	12	20,7
9	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	TUNGKAL SELATAN	16	18
10	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	BUNGO TANJUNG	17	17,2
11	PARIAMAN UTARA	NARAS	MANGGUNG	17	17,2
12	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA I	11	16,7
13	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR	10	16,4
14	PARIAMAN UTARA	NARAS	AMPALU	27	15,9



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
15	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PERAK	7	14,9
16	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	SIKABU	5	14,3
17	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KALUAT	6	14
18	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	PUNGGUNG LADING	15	13,6
19	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH TIMUR	17	13,2
20	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PAUH BARAT	20	13,1
21	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	SUNGAI PASAK	9	12,9
22	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KP. BARU PADUSUNAN	9	12,9
23	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	MARABAU	10	10,2
24	PARIAMAN TENGAH	PAUH	CIMPARUH	22	11,8
25	PARIAMAN UTARA	NARAS	PADANG BIRIK-BIRIK	10	11,4
26	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	MARUNGGI	21	11,3
27	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SIMPANG	6	11,1
28	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAJAI		
29	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KOTO MARAPAK	9	11,1
30	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG BARU	16	11
31	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	SUNGAI KASAI	3	10,7
32	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR SELATAN	6	10,7
33	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	TALUK	25	10,6
34	PARIAMAN TENGAH	PAUH	LOHONG	6	10,5
35	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS HILIR	13	10,5
36	PARIAMAN UTARA	NARAS	SINTUK	6	10,2
37	PARIAMAN UTARA	NARAS	BALAI NARAS	16	11,3
38	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG TANGAH	4	9,8
39	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BALAI KURAI TAJI	7	9,7
40	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	TALAGO SARIK	10	9,6
41	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	CUBADAK AIR UTARA	10	9,3
42	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	BATANG TAJONGKEK	4	8,7
43	PARIAMAN TENGAH	PAUH	RAWANG	9	8,1
44	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI MUDIK	3	7,9
45	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JAWI - JAWI I	4	7,8
46	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK TIMUR	5	7,6
47	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	TOBOH PALABAH	9	7,5
48	PARIAMAN UTARA	NARAS	NARAS I	15	7,4
49	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	SUNGAI SIRAH	2	7,1
50	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	KAMPUNG APAR	3	7,0
51	PARIAMAN UTARA	NARAS	SUNGAI RAMBAI	5	6,9
52	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN KERETA API	4	6,8



No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
53	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	PAKASAI	5	6,7
54	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG PONDOK	5	5,9
55	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KARAN AUR	6	5,6
56	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK	SIKAPAK BARAT	7	5,3
57	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JATI HILIR	4	5,1
58	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI	RAMBAI	3	4,8
59	PARIAMAN TENGAH	PAUH	JALAN BARU	5	4,3
60	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATO	3	4,3
61	PARIAMAN UTARA	NARAS	TANJUNG SABAR	2	4,2
62	PARIAMAN TENGAH	PAUH	KAMPUNG JAWA II	2	4,1
63	PARIAMAN TENGAH	PAUH	ALAI GELOMBANG	3	3,8
64	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	AIR SANTOK	3	3,2
65	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	KAMPUNG GADANG	2	2,1
66	PARIAMAN UTARA	NARAS	APAR	1	1,6
67	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PONDOK II	1	1,5
68	PARIAMAN TENGAH	PAUH	PASIR	0	0
69	PARIAMAN TENGAH	PAUH	UJUNG BATUNG	0	0
70	PARIAMAN TIMUR	SANTOK	KAMPUNG KANDANG	0	0
71	PARIAMAN TIMUR	PADUSUNAN	BATANG KABUNG	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase anak stunting di setiap desa bervariasi. Untuk persentase stunting pada anak yang paling rendah yaitu terdapat di empat desa yaitu Desa Pasir, Ujung Batung, Kampung Kandang dan Batang Kabung dimana keempat desa tersebut persentase stuntingnya adalah 0 %. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Desa Padang Cakur yaitu sebesar 36,8 %. Tidak meratanya jumlah kasus stunting yang ada di setiap desa ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait di bidang kesehatan untuk lebih serius lagi dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Upaya konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan.

Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistem Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Publikasi Stunting, Melakukan Evaluasi Stunting untuk memastikan :

- a. Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data



- b. Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukkan pada perencanaan dan penganggaran
- c. Melakukan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
- d. Melakukan Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

7) Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Pariaman dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	Uraian	Indikator	Tahun	
			2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	90,3 %	92,4 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	92,3 %	91,45 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	92,63 %	99,47 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	59,42 %	89,12 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	0 %	86,31 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37 %	47,96 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	68,61 %	57,75 %
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu	15,62 %	27,98 %



NO	Uraian	Indikator	Tahun	
			2021	2022
		satu tahun		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	62 %	87,41 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37,85 %	41,24 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	55,3 %	72,8 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 indikator pencapaian SPM bidang kesehatan, namun pada tahun 2022 dari 12 indikator pencapaian SPM tersebut 9 indikator diantaranya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Indikator tersebut yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. Sementara 2 indikator lainnya mengalami penurunan dan 1 indikator sama dengan tahun yang sebelumnya. Penyebab dari penurunan capaian SPM ini adalah karena adanya pandemi Covid 19 yang masih ada di tahun 2021 membuat masyarakat khususnya ibu hamil masih khawatir pergi tempat pelayanan kesehatan begitu juga dengan masyarakat yang enggan membawa anaknya ke posyandu.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan kota merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil (perumahan atau perkebunan), antar persil, dan antar pusat pemukiman di kota. Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di



Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	112.403	126.158	133.835	134.820	135.650
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	410.325	411.896	412.844	268.287	269.264
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	55,65	60,25	62,35	64,45	65,75

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas menunjukkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pariaman dari tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu meningkat seiring juga dengan bertambahnya panjang jalan kota. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah kota pariaman serius dalam mendukung pembangunan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Konsistensi ini akan tetap di pertahankan dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini adalah dengan menambah pembuatan bahu jalan dan drainase yang berfungsi dengan baik. Selain itu juga melakukan kegiatan perbaikan jalan rusak yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Hal ini harus diimbangi dengan anggaran yang ada karena anggaran yang dimiliki oleh daerah terbatas karena adanya pandemi Covid 19 yang masih melanda.

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.53
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	Km	25.325	25.325	25.325	25.325	26.245
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	268.287	268.287	268.287	268.287	269.264



NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	%	9.44	9.44	9.44	9.44	9,45

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel diatas panjang jalan di Kota Pariaman adalah 268.287 Km. Tidak ada penambahan trotoar jalan di Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dimana persentase jalan yang memiliki trotoar yaitu 9,45 %.

2) Proporsi Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	23.18	25.24	25.65	26.04	26,15
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	63.58	63.58	63.58	63.58	65,56
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	%	36.46	39,71	40.34	40.96	41,92

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 36,46 %. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2018 dengan kondisi baik 39,71 %. Panjang drainase dengan kondisi baik terus bertambah hingga tahun 2022 secara berurutan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu 40,34 %, 40,96 % dan 41,92 %. Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih fokus pada perbaikan drainase yang sudah ada di Kota Pariaman agar dapat berfungsi lebih baik.

3) Proporsi Irigasi Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau pengairan menjadi hal penting dalam pertanian. Tanpa adanya pengairan yang baik maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen nantinya. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.55
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Pariaman
Tahun 2018-2021

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	2.732	2.732	2.732	110,971	112.982
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	2.131	2.240	2.322	80,14	81,15
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	78	82	85	72,21	73,25

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2023

4) Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen. Status irigasi di Kota Pariaman adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	1.383	1.383	1.321	1.383	1.395
2	Luas Lahan Budi Daya (Ha)	Ha	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	%	77,48	77,48	77,48	77,48	78,15

Sumber : Dinas PUPR & Pertanahan Kota Pariaman, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase luas lahan pertanian yang terairi irigasi di Kota Pariaman sebanyak 77,48%, kemudian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 77,48%; 77,48 dan 78,15%.

5) Sanitasi dan Air Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 adalah



sebagai berikut:

Tabel 2.57
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga	18.799	18.977	19.581	19.685	19.710
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	4.952	5.270	5.482	5.568	5.597

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2022

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang ada di Kota Pariaman terus meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini. Begitu juga dengan rumah tangga dengan akses air bersih juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga. Hal ini berdampak pada persentase proporsi rumah tangga dengan akses air minum yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kebutuhan air bersih akan selalu meningkat dengan selarasnya peningkatan jumlah penduduk dan rumah tangga serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih harus selalu ditingkatkan, hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih juga melindungi masyarakat dari penyakit diare.

Menurut Depkes RI, 2004 jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. 2) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau serangga maupun tikus 3) Mudah dibersihkan dan aman penggunaanya 4) Cukup penerangan 5) Lantai kedap air 6) Ventilasi cukup baik 7) Tersedia air dan tersedia alat pembersih 8) Dilengkapi dinding dan atap penutup. Persentase RT Yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58
Persentase RT Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah	Unit	17.393	17.748	17.748	18.036	18.315
2	Jumlah rumah yang diperiksa	Unit	17.393	17.748	17.748	18.036	18.315
3	Jumlah rumah dengan jamban	Unit	10.610	11.048	11.048	11.722	11.790
4	Persentase rumah dengan jamban	%	61,00	62,25	62,25	64,99	64,37
	Kota						

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023



Persentase rumah dengan jamban selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dimana persentase rumah dengan jamban pada tahun 2018 yaitu 61 % meningkat menjadi 62,25 % di tahun 2019, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah rumah diiringi dengan bertambahnya jumlah rumah yang memiliki jamban di Kota Pariaman. Namun pada tahun 2020 dengan adanya Covid 19 dimana sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Kota Pariaman. Sehingga pada tahun 2020 tidak ada peningkatan jumlah rumah dan persentase rumah dengan jamban tetap 62,25 %. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 64,99 %. Seiring dengan mulai normalnya kondisi perekonomian di Kota Pariaman maka jumlah rumah juga mulai bertambah sementara rumah yang belum memiliki jamban juga dilakukan pembangunan jamban guna meningkatkan kebiasaan hidup sehat. Buruknya sanitasi di lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit di lingkungan tersebut. Selain itu perilaku masyarakat juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Salah satu perilaku masyarakat tersebut yaitu perilaku BABS. Bertambahnya jumlah penduduk yang berperilaku BABS maka alam semakin tidak mampu dalam mendaur ulang limbah manusia tersebut, sehingga dibutuhkan jamban yang memenuhi syarat di setiap rumah tangga agar dapat merubah pola perilaku BABS masyarakat yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesehatan dan taraf hidup masyarakat.

Saluran pembuangan air limbah atau yang sering disingkat dengan SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa saluran perpipaan maupun yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat buangan air limbah. Perilaku masyarakat yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap ekosistem dan timbulnya berbagai masalah sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yaitu pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja, air limbah, tempat pembuangan sampah, pembawa penyakit dan kondisi lingkungan perumahan. Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah	Unit	17.393	17.748	17.748	18.036	18.315
2	Jumlah rumah yang diperiksa	Unit	17.393	17.748	17.748	18.036	18.315
3	Jumlah rumah dengan SPAL	Unit	10.610	16.901	17.041	17.345	17.491
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	Unit	8.577	11.048	11.188	11.722	11.890
5	Persentase yang memenuhi syarat	%	77,63	62,25	62,54	64,99	67,98



Kota

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2023

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Pariaman. Setiap tahun terjadi lonjakan peningkatan jumlah rumah tetapi kurang berimbang dengan peningkatan jumlah rumah yang memiliki SPAL dan memenuhi syarat. Sehingga tampak persentase SPAL yang memenuhi syarat menurun. Pencapaian jumlah rumah yang memiliki SPAL harus terus ditingkatkan demi menunjang taraf hidup yang lebih baik lagi. Untuk mencapai jumlah rumah yang memiliki SPAL, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan pengarahannya dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya SPAL di rumah tangga.

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kasawan Permukiman

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 meter kubik perkapita pertahun masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter kubik perkapita pertahun. Namun, jika ditinjau ketersediaannya per pulau akan sangat lain dan bervariasi. Pulau Jawa yang luasnya mencapai tujuh persen dari total daratan wilayah Indonesia hanya mempunyai empat setengah persen dari total potensi air tawar nasional, namun pulau ini dihuni oleh sekitar 65 persen total penduduk Indonesia. Kondisi ini menggambarkan potensi kelangkaan air di Pulau Jawa sangat besar. Jika dilihat ketersediaan air perkapita pertahun, di Pulau Jawa hanya tersedia 1.750 meter kubik per kapita per tahun, masih di bawah standar kecukupan yaitu 2000 meter kubik per kapita pertahun. Jumlah ini akan terus menurun sehingga pada tahun 2020 diperkirakan hanya akan tersedia sebesar 1.200 meter kubik perkapita pertahun. Apabila fenomena ini terus berlanjut maka akan terjadi keterbatasan pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah tersebut karena daya dukung sumberdaya air yang telah terlampaui.

Sumber daya air berupa sungai juga terdapat di Kota Pariaman. Pada umumnya sungai di Kota Pariaman mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di



Kota Pariaman pada umumnya relatif besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam penggunaannya. Wilayah yang lebih tinggi ke wilayah dataran di bagian barat daya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 3 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Mangor yang berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Panjang sungai Batang Piaman adalah 12,00 Km, Batang Manggung 11,50 Km, dan Batang Mangor 11,80 Km. Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Kapasitas yang ada saat ini tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota.

Rencana pengembangan utilitas air minum diarahkan pada:

- Pencarian sumber air minum alternatif, misalnya dengan membuat DAM, membuat reservoir, atau memanfaatkan sungai kecil.
- Peningkatan sistem jaringan distribusi
- Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran pelayanan air minum dapat meliputi seluruh masyarakat.

Untuk rencana sistem penyediaan air minum di masa mendatang lebih dikonsentrasikan di pusat kota yang juga merupakan pusat kegiatan lokal yaitu di seluruh Kecamatan Pariaman Tengah dan pada pusat-pusat unit lingkungan. Rencana sistem tersebut juga diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk air minum pada daerah-daerah pinggiran kota Pariaman akan dibangun sumur bor, tepatnya di daerah Simpang Tigo Surau Pasar, Kampung Baru (Kecamatan Pariaman Utara) dan Sungai Sasak (Kecamatan Pariaman Tengah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga 2030	Jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah @230 L/RT/hari	Kebutuhan sambungan rumah (RT)	Jumlah kebutuhan air untuk kran umum @30 L/hari	Kebutuhan sambungan kran umum
Pariaman Utara	4.991	1.147.930	549.036	748.686	6.487
Pariaman Tengah	5.123	1.178.290	705.132	788.499	7.747
Pariaman Selatan	3.928	903.440	432.075	589.193	5.892



Pariaman Timur	2.139	491.970	209.978	201.678	3.155
Jumlah	15.520	3.721.630	1.707.241	2.328.056	23.281

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2022

Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman. Permasalahan lain yang sering terjadi pada masyarakat perkotaan salah satunya sanitasi, Pemerintah Kota Pariaman memberikan fasilitas dan akses sanitasi pada setiap pemukiman masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Pariaman pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah tangga pengguna air bersih	Unit	17.748	17.748	17.748	18.036	18.315
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	88,75	88,75	89,43	91,10	92,45
3	Rumah tangga pengguna listrik	%	99,75	99,72	99,80	99,80	99,90
4	Rumah tangga bersanitasi	%	94.10	96.70	95.84	96.17	96.85
5	Pengurangan luasan pemukiman kumuh	%	6,20	6,20	68,22	57,40	57,40
6	Rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	14.901	14.901	17.041	17.345	17.345

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2023

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat. Pemerintah daerah konsisten untuk terus meningkatkan jumlah pengguna air bersih oleh rumah tangga untuk meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 88,75 %. Sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,43 %. Peningkatan terhadap pelayanan air bersih terus dilakukan hingga tahun 2021 dimana persentase bertambah menjadi 91,10 %. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik



di Kota Pariaman pada tahun 2021 sudah mencapai 99,80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 0,2% lagi yang belum memiliki akses listrik. Lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Pemerintah daerah akan terus gencar dalam menurunkan persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pariaman. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Kota Pariaman adalah program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Kegiatan Kotaku ini selain untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Program pemerintah daerah ini merupakan bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan, guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tabel 2.62
Kawasan Pemukiman Kumuh Per kecamatan Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh					
	Pariaman Tengah	7	7	7	7	7
	Pariaman Utara	3	3	3	3	3
	Pariaman Selatan	3	3	3	3	3
	Pariaman Timur	1	1	1	1	1
2	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh					
	Pariaman Tengah	50,63	50,63	50,63	50,63	50,63
	Pariaman Utara	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
	Pariaman Selatan	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99
	Pariaman Timur	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
3	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Dikawasan Pemukiman Kumuh					
	Pariaman Tengah	485	485	485	485	485
	Pariaman Utara	311	311	311	311	311
	Pariaman Selatan	149	149	149	149	149
	Pariaman Timur	69	69	69	69	69

Sumber : Disperum, Perkim & LH Kota Pariaman, 2023

2.4.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Pariaman.

1) Cakupan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



Rasio jumlah polisi pamong praja mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2. 63
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Petugas Pol PP	189	283	285	181	198
Jumlah Penduduk	87.626	88.501	94.224	95.294	96.773
Rasio Jumlah Petugas Pol PP/10.000 Penduduk	1 : 21	1 : 31	1 : 20	1 : 19	1:20

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah personil Satpol PP. Begitu juga jumlah penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat, rasio petugas satpol PP dengan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertambahan penduduk dengan petugas satpol PP.

Petugas Satpol PP bertugas menjalankan patroli dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan SPM tersebut. Target capaian kinerja SPM Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Apabila telah tercipta kondisi ini maka kinerja minimal pelaksanaan patrol tersebut telah dianggap terpenuhi.

Selain itu, Satpol PP juga rutin melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketertiban dan bekerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya penegakkan Perda di Pariaman. Petugas Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Pariaman. Berikut data kriminalitas di Kota Pariaman :

Tabel 2.64
Angka kriminalitas di Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Curat (pencurian dan pemberatan)	75	62	7	17	17
Penggelapan	29	40	22	19	19
KDRT	-	-	-	-	-



Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penipuan	29	29	30	22	22
Pengrusakan	16	7	10	6	6
Perkosaan	-	-	-	2	2
Pembunuhan	-	-	2	1	1
Jumlah criminal	338	308	228	160	155
Jumlah penduduk	87.626	88.501	94.224	95.294	96.773
Angka kriminalitas (%)	0,386	0,348	0,242	0,168	0,160

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2023

Dilihat dari tabel di atas jumlah angka kriminalitas Kota Pariaman dari tahun 2018-2022 secara umum mengalami penurunan dari 338 Tahun 2018 menjadi 308 di Tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami penurunan dimana jumlah kriminal secara berurutan 228 dan 160. Pada tahun 2022 jumlah kriminal yaitu 155, jumlah ini merupakan jumlah terkecil selama lima tahun terakhir. Secara presentase jika dibandingkan dengan jumlah penduduk juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 sebesar 0,386 %, kemudian terjadi penurunan di Tahun 2019 menjadi 0,348%. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 juga mengalami penurunan, dimana angka kriminalitasnya adalah 0,242%, 0,168% dan 0,160%. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Pariaman adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Pariaman dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Pariaman. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Pariaman yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

2) Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Pariaman. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2018-2022 di Kota Pariaman.

Tabel 2.65
Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kebakaran	5	2	2	3	2

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2023



3) Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pariaman merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingga beberapa kawasan di Kota Pariaman menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana yang terjadi di Kota Pariaman

Tabel 2.66
Data Bencana di Kota Pariaman Tahun 2018-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banjir	3	8	1	1	1
2	Gunung Meletus	-	-	-	-	-
3	Longsor	-	-	-	1	-
4	Gempa	-	1	-	-	-
5	Angin puting beliung	-	-	-	-	-

Sumber : Satuan Pol PP & Damkar Kota Pariaman, 2022

2.4.1.6 Urusan Sosial

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Indikator kegiatan dinas sosial dilihat dari Jumlah PPKS, Penanganan PPKS, PPKS yang memperoleh bantuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

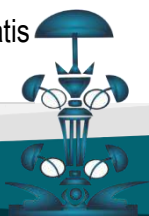
No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	4	4	4	4
2.	PPKS yang memperoleh bantuan	3.341	2.755	3.369	2.695	2.963
3.	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS	3.341	2.755	3.369	2.695	2.963
4.	Jumlah PPKS	5.879	5.879	11.135	4.510	4.510

Sumber : Dinas Sosial Kota Pariaman, 2023

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis



berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, pembangunan di Kota Pariaman menggambarkan kinerja yang cukup baik. Berikut perkembangan angkatan kerja yang bekerja dan yang menganggur di Kota Pariaman periode 2018-2022., sebagai berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,65	68,95	64,16	62,7	60,41
2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	52,35	52,35	64,39	35	40,65
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,82	5,42	5,73	6,09	5,19
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	66,70	36,32	64	93,91	94,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang potensial untuk memproduksi barang dan jasa, dan jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, mereka mampu untuk berpartisipasi didalamnya. Batasan usia > 15 tahun ini sesuai dengan ketentuan batasan penduduk usia kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan ini diberlakukan mengingat juga ada pekerja anak dengan kategori rentang umur antara 10-14 tahun.

Selain tingkat tenaga kerja, di dalam demografi penduduk juga perlu diperhatikan aspek kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam urusan pemberdayaan perempuan pemerintah Kota Pariaman sangat serius terhadap permasalahan rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani



penurunannya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk kesetaraan gender menunjukkan peningkatan perbaikan dengan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga seperti lembaga hukum, politik, ekonomi, dan social dan jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) dibandingkan dengan tahun lau sudah mengalami peningkatan. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.69
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,61	98,19	98,49	98,49	98,78
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	51,34	52,24	53,15	53,42	53,55
3.	Rasio KDRT		100	100	100	40	35
4.	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	%	64.60	65.33	66.20	100	100
5.	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga	%	64	65	66	45	55
6.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	6	10	10	10	10
7.	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus	Orang	98	99	100	NA	NA
8.	Jumlah lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	Lembaga	4	4	4	2	2
9.	Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	Rumah	1	1	1	2	2
10.	Jumlah Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Orang	78	78	78	78	78
11.	Jumlah Pemberdayaan Perempuan						
-	Bidang Politik	Orang	1	1	1	2	2
-	Bidang Hukum	Orang	42	43	43	43	43
-	Bidang Sosial	Orang	81	88	88	88	88
-	Bidang Ekonomi	Orang	1.359	1.426	1.510	1.520	1.540

Sumber : Dinas P3AKB Kota Pariaman, 2023

2.3.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam suatu wilayah, diharapkan tercapai ketahanan pangan, yang



juga menjadi kebutuhan dasar penduduk. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kota Pariaman mendapatkan akses pangan yang baik, dari jumlah maupun mutu pangan.

Secara umum, berdasarkan Tabel 2.39 ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.70
Perkembangan Indikator Urusan Pangan Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Daerah Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Skor PPH Kota Pariaman	Nilai	86,00	86,00	86	86,6	86,8
2.	Regulasi ketahanan pangan	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan pangan utama	Ton	237,95	237,95	240,15	241,15	242,50
4.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati	Ton	62.838	63.145	64.165	65.250	66,145
5.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Ton	8.501	9.564	9.745	8.639	8.856
6.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	85	85	85	100	100
7.	Persentase Keamanan Penanganan Pangan	%	90	90	90	90	90
8.	Ketersediaan Pangan Perkapita/Tingkat konsumsi	Kg/Kapita/Tahun	2.023	2.200	2.150	2.200	2.215
9.	Jumlah Kelembagaan Pangan Masyarakat (Gapoktan)	Lembaga	71	71	71	69	69

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2023

Berdasarkan data tabel diatas secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Kota Pariaman ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 skor PPH tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dengan skor PPH 86. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 dengan skor PPH 86,6. Untuk ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman pada tahun 2018 – 2022 cenderung fluktuatif. Ketersediaan pangan di Kota Pariaman berasal dari daerah lain di sekitar Kota Pariaman dan juga hasil produksi di wilayah Kota Pariaman. Di



samping itu, perhitungan ketersediaan pangan di kota Pariaman didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Pada Urusan Pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi banyaknya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan, dan peralihan peralihan hak tanah atas sebabnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Banyaknya Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan	42,80	45,68	-	1.126	1.244
-	Hak Milik	902	284	787	831	893
-	Hak Guna Bangunan	142	-	94	212	286
-	Hak Wakaf	18	2	2	6	6
-	Hak Pakai	13	9	32	77	80
2.	Peralihan Hak Tanah dan sebabnya	-	-	-	-	-
-	Jual Beli	720	799	738	707	752
-	Hibah	8	10	3	9	9
-	Pemisahan	499	491	419	221	254
-	Lainnya	67	68	21	152	108

Sumber : Dinas PU, PR & Pertanahan Kota Pariaman, 2023

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Lampiran 1 Permendagri menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Dari 8 indikator itu hanya 4 indikator yang dapat disajikan 1) Persentase penanganan sampah, 2) cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, 3) tempat pembuangan sampah (TPS) dan persentase penanganan sampah per satuan penduduk.

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Indikator persentase penanganan sampah di Kota Pariaman berdasarkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan LH Kota



Pariaman menggunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan volume sampah. Analisis terkait dengan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penanganan Sampah (%)	70.15	70.40	70,60	68,30%	69,25%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (Ton)	0.096	0.097	0,097	0,098	0,099
4.	Rata-rata Perkiraan Timbunan Sampah Perhari (Ton/hari)	22.131	22.370	22.570	22.580	22.670
5.	Indeks Pencemaran Udara	90,85	91.25	91.25	90,08	90,08
-	Abrasi Pantai	16	16	16	-	-
-	Erosi	2	2	2	-	-
6.	Jumlah Lokasi Pencemaran air Sungai	4	5	4	4	4
7.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Bersih (%)	78,42	82,49	82,65	91,10	92,5

Sumber : Disperum, Perkim & LH 2023

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data di bawah ini bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman sudah baik, Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Pada penerapan Nasional KTP berbasis NIK Kota Pariaman sudah melaksanakannya sudah 100%, Jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK dan Kepemilikan KTP terus meningkat, artinya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dalam kependudukan sudah baik.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 70,46% dari 23.824 orang penduduk wajib ber-e KTP. Sementara itu untuk Kepala Keluarga di Kota Pariaman sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 27.442 dari 27.795 yang wajib mempunyai KK ini berarti sebesar 98,73 % di Pariaman. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Pariaman terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e-KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Namun, dari keberhasilan diatas masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran yang baru mencapai 55,91 %. Dan kepemilikan Kartu Identitas





Anak (KIA) yang pencapaiannya masih sebesar 48,06 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.73
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah kepala keluarga			Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	5.182	1.704	6.886	5.125	1.660	6.785
2	Kecamatan Pariaman Tengah	7.300	2.145	9.445	7.229	2.116	9.345
3	Kecamatan Pariaman Selatan	4.385	1.528	5.913	4.320	1.482	5.802
4	Kecamatan Pariaman Timur	4.235	1.316	5.551	4.209	1.301	5.510
Total		21.102	6.693	27.795	20.883	6.559	27.442

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023

Tabel 2.74
Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Penduduk Memiliki KTP - EI			% Kepemilikan KTP-EI		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	11.459	11.349	22.808	8.309	8.382	16.691	72,51	73,86	73,18
2	Kecamatan Pariaman Tengah	16.288	15.817	32.105	11.427	11.629	23.056	70,16	73,52	71,84
3	Kecamatan Pariaman Selatan	10.264	10.054	20.318	6.931	7.179	14.110	67,53	71,40	69,47
4	Kecamatan Pariaman Timur	10.117	9.946	20.063	6.666	6.841	13.507	65,89	68,78	67,34
Total		12.032	11.792	23.824	8.333	8.508	16.841	69,02	71,89	70,46

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023



Tabel 2.75
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran			% Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	11.459	11.349	22.808	6.434	6.543	12.977	56,15%	57,65%	56,90%
2	Kecamatan Pariaman Tengah	16.288	15.817	32.105	8.651	8.646	17.297	53,11%	54,66%	53,89%
3	Kecamatan Pariaman Selatan	10.264	10.054	20.318	5.593	5.764	11.357	54,49%	57,33%	55,91%
4	Kecamatan Pariaman Timur	10.117	9.946	20.063	5.702	5.718	11.420	56,36%	57,49%	56,93%
Total		12.032	11.792	23.824	6.595	6.668	13.263	55,03%	56,78%	55,91%

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023

Tabel 2.76
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			% Kepemilikan KIA		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Pariaman Utara	3.610	3.381	6.991	1.621	1.530	3.151	44,90	45,25	45,07
2	Kecamatan Pariaman Tengah	4.844	4.387	9.231	2.272	2.195	4.467	46,90	50,03	48,39
3	Kecamatan Pariaman Selatan	3.167	2.875	6.042	1.407	1.338	2.745	44,43	46,54	45,43
4	Kecamatan Pariaman Timur	3.026	2.747	5.773	1.558	1.553	3.111	51,49	56,53	53,89
Total		14.647	13.390	28.037	6.858	6.606	13.474	46,82	49,34	48,06

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023



Sementara itu dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis pekerjaan di Kota Pariaman pada tahun 2022 didominasi oleh belum/tidak bekerja (24,14%) Pelajar/ Mahasiswa (24,28%), Wiraswasta (20,61%), dan pekerjaan lainnya (20,14%). Dan komposisi penduduk berdasar tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk setingkat SLTA/ sederajat (25,18 %). Penduduk tidak/ belum sekolah (21,24 %) dan penduduk tamat SD/Sederajat (14,42%) serta penduduk tamat SLTP/Sederajat (14,34%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2022 Kota Pariaman

No	Pekerjaan	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Belum/Tidak Bekerja	12381	10702	23083	24,14
2	Aparatur/Pejabat Negara	2384	2669	5053	5,28
3	Tenaga Pengajar	172	519	691	0,72
4	Wiraswasta	16966	2748	19714	20,61
5	Pertanian/Peternakan	1981	85	2066	2,16
6	Nelayan	1238	4	1242	1,30
7	Agama Dan Kepercayaan	52	-	52	0,05
8	Pelajar/Mahasiswa	12303	10918	23221	24,28
9	Tenaga Kesehatan	44	285	329	0,34
10	Pensiunan	530	400	930	0,97
11	Lainnya	84	19175	19259	20,14
Total		48135	47505	95640	100

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023

Tabel 2.78
Data Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Kota Pariaman

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN			%
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tidak/Blm Sekolah	10631	9684	20315	21,24
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	6351	5995	12346	12,91
3	Tamat Sd/Sederajat	6782	7009	13791	14,42
4	SLTP/Sederajat	7354	6361	13715	14,34
5	SLTA/Sederajat	12698	11380	24078	25,18
6	Diploma I/II	172	605	777	0,81
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	717	1541	2258	2,36
8	Diploma IV/Strata I	3145	4682	7827	8,18
9	Strata-II	274	242	516	0,54
10	Strata-III	11	6	17	0,02
Total		47.697	48135	47505	95640

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman Tahun 2023



2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak, yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2019 hingga tahun 2021 telah dapat dicapai angka 100% untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK, PKK aktif, POsyandu aktif, dan jumlah LPM yang sudah ada per desa/kelurahan.

Tabel 2.79
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK	100	100	100	100	100
2.	PKK Aktif	100	100	100	100	100
3.	Kelompok Binaan PKK	76	76	76	76	76
4.	Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
5.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	55	55	55	55	55
6.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	12	11	11	11	11
7.	Jumlah LPM	71	71	71	71	71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Rasio akseptor KB, cakupan KB, jumlah balai KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	3	3	2,2	2,26
2.	Rasio Akseptor KB	65,85	66,75	64,69	98,2	99,25
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	65,85	66,75	64,69	70,61	70,61
4.	Jumlah Petugas KB	13	13	13	12	12
5.	Jumlah Balai KB	4	4	4	4	4

Sumber : DP3AKB, 2023

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Kinerja Pemerintah pada urusan perhubungan tidak terlepas dari transportasi. Pelayanan transportasi di Kota Pariaman belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan warning light tahun 2018-2022, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.81
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	184.182	119.130	513.246	558.943	592.128
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	180	111	126	127	127
3.	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	1	1	1	1	1
4.	Kepemilikan KIR angkutan umum	14,25	27,91	30,25	32,11	34,05
5.	Jumlah rambu-rambu yang dipasang	592	823	823	823	823
6.	Jumlah kecelakaan Lalu Lintas	179	160	117	125	110

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di bidang perhubungan ini, jumlah kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pariaman meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah angka kecelakaan Lalu lintas adalah sebesar 179 kasus, Kemudian tahun 2019 turun menjadi 160. Serta pada tahun 2020 turun lagi menjadi 117. Sementara itu jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021 naik lagi menjadi 125 kasus



Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan menurun menjadi 110. Dengan kondisi seperti perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara di jalan raya.

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Hotspot	-	-	15	15	15
2	Jumlah Aplikasi yang dikelola	9	17	25	25	25
3	Persentase OPD yang memiliki akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	100	100	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,61	2,87	2,87	2,64	-
5	Jumlah ASN Pengelola TIK	8	18	18	18	18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Tabel 2.83
Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Pariaman Tahun 2022

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
1	Kecamatan Pariaman Utara	Desa Tungkal Utara	√	√	√		
		Desa Tanjung Sabar	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Selatan	√	√	√		



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
		Desa Tungkal Selatan	√	√	√		
		Desa Apar	√	√	√		
		Desa Sikapak Barat	√	√	√		
		Desa Manggung	√	√	√		
		Desa Ampalu	√	√	√		
		Desa Balai Naras	√	√	√		
		Desa Naras I	√	√	√		
		Desa Sintuk	√	√	√		
		Desa Naras Hilir	√	√	√		
		Desa Sikapak Timur	√	√	√		
		Desa Cubadak Air Utara	√	√	√		
		Desa Sei Rambai	√	√	√		
		Desa Cubadak Air	√	√	√		
		Desa Padang Birik-Birik	√	√	√		
		2	Kecamatan Pariaman Tengah	Kelurahan Jalan Baru	√	√	√
Kelurahan Pasir	√			√	√		
Kelurahan Pondok II	√			√	√		
Kelurahan Karan Aur	√			√	√		
Kelurahan Kampung Pondok	√			√	√		
Kelurahan Kampung Perak	√			√	√		
Kelurahan Jawi-Jawi I	√			√	√		
Kelurahan Kampung Jawa I	√			√	√		
Kelurahan Kampung Jawa II	√			√	√		
Kelurahan Taratak	√			√	√		
Kelurahan Ujung Batung	√			√	√		
Kelurahan Alai Gelombang	√			√	√		
Kelurahan Jati Hilir	√			√	√		
Kelurahan Jawi-Jawi II	√			√	√		
Kelurahan Jalan Karet Api	√			√	√		
Kelurahan Lohong	√			√	√		
Desa Pauh Timur	√			√	√		
Desa Rawang	√			√	√		
Desa Jati Mudik	√			√	√		
Desa Cimparuh	√			√	√		
Desa Kampung Baru	√	√	√				
Desa Pauh Barat	√	√	√				
3	Kecamatan Pariaman Timur	Desa Kaluat	√	√	√		
		Desa Sungai Pasak	√	√	√		
		Desa Batang Kabung	√	√	√		
		Desa Cubadak Mentawai	√	√	√		



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KET
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
		Desa Bato	√	√	√		
		Desa Sungai Sirah	√	√	√		
		Desa Kp. Baru Padusunan	√	√	√		
		Desa Kampung Tengah	√	√	√		
		Desa Bungo Tanjung	√	√	√		
		Desa Air Santok	√	√	√		
		Desa Kajai	√	√	√		
		Desa Kampung Kandang	√	√	√		
		Desa Talago Sarik	√	√	√		
		Desa Koto Marapak	√	√	√		
		Desa Pakasai	√	√	√		
		Desa Kampung Gadang	√	√	√		
4	Kecamatan Pariaman Selatan	Desa Sikabu	√	√	√		
		Desa Pasir Sunur	√	√	√		
		Desa Batang Tajongkek	√	√	√		
		Desa Kampung Apar	√	√	√		
		Desa Padang Cakur	√	√	√		
		Desa Palak Aneh	√	√	√		
		Desa Punggung Lading	√	√	√		
		Desa Marunggi	√	√	√		
		Desa Pauh Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Balai Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Marabau	√	√	√		
		Desa Toboh Palabah	√	√	√		
		Desa Simpang Kurai Taji	√	√	√		
		Desa Rambai	√	√	√		
		Desa Sungai Kasai	√	√	√		
		Desa Taluk	√	√	√		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

Tabel 2.84
Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di Kota Pariaman Tahun 2022

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
1	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	Desa Tungkal Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Tanjung Sabar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Cubadak Air Selatan	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Tungkal Selatan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Apar	Indihome (TELKOM)	20 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Desa Sikapak Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Manggung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Ampalu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Naras	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Naras I	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Sintuk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Naras Hilir	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sikapak Timur	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air Utara	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sei Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Air	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Padang Birik-Birik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		2	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	Kelurahan Jalan Baru
Kelurahan Pasir	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Pondok II	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Karan Aur	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Kampung Pondok	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Kampung Perak	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Jawi-Jawi I	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Kampung Jawa I	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Kampung Jawa II	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Taratak	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Ujung Batung	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Alai Gelombang	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Jati Hilir	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Jawi-Jawi II	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Jalan Kareta Api	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Kelurahan Lohong	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Desa Pauh Timur	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Desa Rawang	Icon net (PLN)			10 Mbps
Desa Jati Mudik	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Desa Cimparuh	Indihome (TELKOM)			20 Mbps
Desa Kampung Baru	Indihome (TELKOM)	20 Mbps		
Desa Pauh Barat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps		
3	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	Desa Kaluat	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Pasak	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Batang Kabung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Cubadak Mentawai	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Bato	Icon net (PLN)	10 Mbps



No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH / KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)
		Desa Sungai Sirah	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Kp.Baru Padusunan	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Tengah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Bungo Tanjung	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Air Santok	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kajai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Kandang	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Talago Sarik	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Koto Marapak	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pakasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Gadang	Icon net (PLN)	10 Mbps
4	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	Desa Sikabu	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Pasir Sunur	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Batang Tajongkek	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Kampung Apar	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Padang Cakur	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Palak Aneh	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Punggung Lading	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marunggi	Icon net (PLN)	10 Mbps
		Desa Pauh Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Balai Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Marabau	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Toboh Palabah	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Simpang Kurai Taji	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Rambai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
		Desa Sungai Kasai	Indihome (TELKOM)	20 Mbps
Desa Taluk	Indihome (TELKOM)	20 Mbps		

Sumber : Dinas Kominfo, 2023

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	5	5	5	5	5
2	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	28	27	16	16	16
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	3	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kominfo, 2023



2.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tahun 2021 produktivitas UKM di Kota Pariaman tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 namun sedikit mengalami kenaikan. Kota Pariaman berusaha untuk menumbuhkan kembali gairah para pelaku UKM dengan program-program yang mendukung salah satunya dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UKM. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku UKM dapat lebih bersemangat dan gita lagi guna meningkatkan perekonomian keluarga serta usaha yang dijalankan bisa semakin maju. Dari Tahun 2017-2021 jumlah koperasi yang aktif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2021 sebanyak 80 koperasi dari 91 total koperasi. Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dari tahun 2020 karena terkait masa pandemic Covid 19 sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sangat terbatas untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dilihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 2.86
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi (unit)	79	84	88	91	91
2	Jumlah Koperasi Aktif	68	73	77	80	80
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	11	11	11	11	11
4	Jumlah Koperasi RAT	36	37	39	32	32
5	Jumlah Anggota orang	8.543	9.066	9.039	9.184	9.213
6	Jumlah Karyawan	53	27	27	27	27



No	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Volume Usaha (Rp))	51.755.342	54.796.945	55.571.503	56.655.120	57.286.345
8	Modal Sendiri (Rp)	48.989.870	54.172.499	56.769.440	59.496.952	60.267.842
9	Modal Luar (Rp)	17.213.813	16.870.484	17.381.599	16.367.242	17.963.147
10	Asset (Rp)	61.203.683	65.241.987	74.151.039	75.784.026	76.853.247
11	SHU (Rp)	3.873.031	4.021.421	4.089.921	4.080.331	4.095.987

Sumber : Dinas Koperindag & KUKM 2023

Tabel 2.87
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sehat	7	4	4	5	5
2	Cukup sehat	18	20	11	11	11
3	Kurang sehat	0	0	1	1	1
4	Belum dinilai	11	5	25	25	25

Sumber : Dinas Koperindag & KUKM 2023

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kota Pariaman sudah mulai menunjukkan '*trend positif*' sejak tiga setahun terakhir. Walaupun perkembangan kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun ini tetap menjadi komitmen daerah Kota Pariaman bagaimana menumbuhkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Pariaman. Bila dilihat dari sumber daya alam Kota Pariaman mempunyai potensi untuk investor menanamkan investasinya. Yang perlu disediakan oleh Kota Pariaman adalah bagaimana bisa memberikan kemudahan dan daya minat yang tinggi bagi investor tersebut. Dan sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kota Pariaman untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kota Pariaman tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Pariaman untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli. Berikut ini dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.88
Perkembangan Indikator Urusan Urusan Penanaman Modal
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator Kinerja Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	6	6	8	21	21
2	Jumlah Perusahaan PMDN yang berinvestasi	13	167	295	21	21



NO	Indikator Kinerja Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	80.400.000	36.000.000	42.000.000-	25.898.500	20.841.368
4	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	5.352.000	45.600.000	25.600.000	34.032.497	35.126.987
5	Kenaikan/Penurunan Realisasi PMDN	-17,09	-55,22	-85,05	31,41	31,41
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	6,38	3,78	-	93,91	94,12
7	Jumlah Perizinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui	6	6	-	179	150

Sumber : DPM, PTSP & Naker, 2023

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi di urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.89
Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Organisasi Pemuda	22	22	22	22	22
2	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	3



NO	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9
5	Gelanggang/Balai Remaja	0	0	0	0	0
6	Lapangan Olahraga	54	54	54	54	54

Sumber : Dikpora, 2023

Berdasarkan data di atas, perkembangan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meningkat signifikan, pada tahun 2021 jumlah organisasi pemuda sebanyak 22 organisasi untuk perkembangan jumlah organisasi olahraga yang naik pada tahun 2022 hanya berjumlah 35 Organisasi.

2.3.2.14 Urusan Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date. Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2017 hingga 2021 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi

Tabel 2.90
Perkembangan Indikator Urusan Statistik Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo, 2023

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Pariaman telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya



penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

2.3.2.15 Urusan Persandian

Target dari pengamanan informasi pada urusan persandian berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala OPD. Pada saat ini Tanda Tangan Elektronik (TTE) baru tersedia bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk OPD lainnya di Kota Pariaman saat ini proses penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen masih dalam tahap pembentukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerjasama ini diharapkan dapat segera terbentuk sehingga kedepannya seluruh Kepala OPD dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam setiap penandatanganan dokumen.

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kebudayaan Kota Pariaman cukup beranekaragam terutama kebudayaan minang yang masih terjaga samapai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung kebudayaan di Kota Pariaman adalah Pesta Budaya Tabuik Kota Pariaman mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2019, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Namun pada tahun 2020 hingga 2021 pegelaran festival seni budaya di Kota Pariaman tidak dilaksanakan. Hal ini karena pandemi Covid-19 sehingga seluruh masyarakat kota harus mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.91
Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	7	10	10	10
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	52	52	52	52	52
4.	Jumlah Sanggar Kesenian	40	41	41	41	41
5.	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	3	3	3
6.	Jumlah Group Kesenian	40	40	42	42	42

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023



2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.92 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah.

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan
Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan	104	165	165	165	165
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	193.715	191.180	91.218	199.211	235.852
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.995	12.002	12.102	12.173	12.523
4.	Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, 2023

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, diantaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2019, sudah 30 SKPD yang diberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengelolaan arsip secara baku	30	30	30	30	30
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	2	2	3
3	Jumlah OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	3	3	3	3	3



No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase OPD Yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	8	9	10	10	10

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, 2023

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman

2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan oleh Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Pariaman yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Potensi subsektor perikanan Darat dan Laut merupakan lapangan usaha yang mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

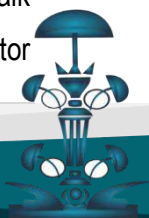
Pada urusan Kelautan dan Perikanan, secara rinci perkembangan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.94
Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.011	6.106	6.206	6.229	6.327
2	Capaian Produksi Perikanan	Ton	61,62	76,29	77,29	79,29	81,25
3	Perikanan Darat	Ton	192	254	258	260	262
4	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	38,89	38,89	38,89	43,46	44,85
5	Capaian Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	121,53	115,60	105,60	68,75	70,28
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	315,44	318,81	322,42	322,02	346,12
8	Jumlah Kasus Pencurian Ikan	Kasus	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2023

Produksi perikanan tangkap dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap mencapai sebesar 6.011 ton. Kemudian pada tahun 2019 naik lagi menjadi 6.106 ton. Hingga pada tahun 2022 menjadi 6.327 ton. Kondisi ini juga terjadi pada indikator



yang lain seperti capaian produksi perikanan pada tahun 2019 sebanyak 61,62 % sedangkan pada tahun 2019 sebesar 76,29 % perikanan darat sebanyak 254 ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 258 ton, dan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebanyak 318,81 ton pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 322,42 ton. Namun untuk indikator capaian konsumsi ikan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dapat dilihat capaian konsumsi ikan pada tahun 2019 sebanyak 115,60 ton sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 105,60 ton dan pada tahun 2021 konsumsi ikan turun menjadi 68,75 ton.

2.3.2.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Selain itu pengertian pariwisata yang lainnya adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Tabel 2.95
Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2022

No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
Pariaman Tengah			
1	Pantai Gandorih	Kel. Pasir	Wisata Alam
2	Pantai Cermin	Kel. Karan Aur	Wisata Alam
3	Pulau Angso Duo	Pulau Angso Duo	Wisata Alam
4	Pulau Tengah	Pulau Tengah	Wisata Alam
5	Talao Pauh	Desa Pauh Pariaman	Wisata Alam
6	Kuburan Panjang	Pulau Angso Duo	Wisata Sejarah
7	Pesta Tabuik	Kel. Pasir	Wisata Budaya
8	Mariam Kuno	Kampung Pondok	Wisata Sejarah
9	Mesjid Tua	Kampung. Perak	Wisata Sejarah
10	Rumah Gadang Moh. Sholeh	Kampung Perak	Wisata Budaya
11	Gandorih Bridge	Kel. Pasir	Wisata Buatan
12	Taman Anas Malik	Kel. Pasir	Wisata Alam
Pariaman Selatan			
1	Pantai Sunur	Desa Sunur	Wisata Alam
2	Pantai Kata	Desa Taluak	Wisata Alam
3	Pulau Ujung	Pulau Ujung	Wisata Alam



No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
4	Surfing	Desa Taluak	Wisata Alam
5	Mesjid Tua Kuraitaji	Desa Balai Kuraitaji	Wisata Sejarah
Pariaman Timur			
1	Benteng jepang Santok	Air Santok	Wisata Sejarah
2	Benteng Santok II	Air Santok I	Wisata Sejarah
3	Guci Badano	Bungo Tanjung	Wisata Sejarah
Pariaman Utara			
1	Pantai Teluk Belibis	Desa Padang Birik-Birik	Wisata Alam
2	Talao Manggung/ Mangrove	Desa Manggung	Wisata Alam
3	Pulau Kasiak	Pulau Kasiak	Wisata Alam
4	Penangkaran Penyu	Desa Apar	Wisata Minat khusus
5	STIB	Apar	Wisata Alam
6	Balon Udara/ Sepeda gunung	Tungkal Selatan	Wisata Alam

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2023

Objek wisata yang ada di Kota Pariaman cukup beragam jenis dan lokasinya. Dari beberapa potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun asing. Berikut dapat kita lihat perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Pariaman dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.96
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Objek Wisata	Objek	22	23	25	25	25
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.320.825	3.925.086	112.278	736.000	1.250.342
3	Jumlah destinasi Wisata Alam Yang Di Kembangkan	Destinasi	12	12	15	15	15
4	Jumlah Kawasan Wisata Laut	Kawasan	4	4	4	4	4
5	Jumlah Restoran	Restoran	103	90	91	91	91
6	Jumlah Hotel	Hotel	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan domestik adalah sebanyak 3.320.825 orang dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.925.086 orang. Namun, pada tahun 2020 dengan terjadinya musibah pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020. Musibah pandemi ini melumpuhkan sebagian besar sektor kegiatan tidak hanya di Kota Pariaman



tetapi juga melanda ke seluruh belahan dunia. Dengan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti *social distancing* yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan serta larangan untuk mengunjungi tempat wisata. Hal ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman. Dapat dilihat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman selama tahun 2020 hanya 112.278 orang. Pada tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman yaitu sekitar 730.000 orang. Hal ini karena sudah banyaknya peningkatan destinasi wisata di Kota Pariaman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk setiap wisatawan yang berkunjung.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata di Kota Pariaman. Banyaknya event-event pariwisata oleh Pemerintah Kota Pariaman seperti Festival Tabuik, Lomba Triathlon, Pariaman Fashion Parade, Pariaman Expo, Tour de Singkarak, Pariaman Batagak Gala dan lain-lain yang biasanya rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Tetapi untuk tahun 2021 tidak semua event tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya. Namun demikian, ada beberapa event yang dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke suatu daerah maka diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung seperti hotel dan penginapan. Pada tahun 2021 jumlah hotel, penginapan dan homestay yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebanyak 42 buah dengan rincian 10 unit hotel dan 32 unit homestay dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

2.3.2.3 Urusan Pertanian

Pertanian sebagai salah satu kategori dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman mempunyai peranan yang sangat penting. Kontribusi pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam kategori pertanian ini adalah produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata. Perkembangan indikator kinerja urusan pertanian dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.97
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	86	87	89	100	100
2	Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian	Unit	333	333	340	340	340
3	Jumlah Ketersediaan Alat Mesin Pertanian	Unit	669	669	705	707	710



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Ha	Ton	5,24	5,5	5,62	5,63	5,71
5	Luas Sawah	Ha	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
6	Luas Panen Padi sawah	Ha	6.708	4.710	4.769	4.472	4.396
7	Produksi Padi Sawah	Ton/Ha	5,83	6,18	5,62	5,63	5,63
9	Jumlah pemotongan sapi potong	Ekor	1.708	1.913	1.888	2.019	2.132

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan, 2023

Luas lahan sawah pada tahun 2021 adalah seluas 1.785 hektar atau sekitar 24,33% dari 7.336 hektar total dan terus mengalami penurunan di wilayah Kota Pariaman. Dimana pada tahun 2017 luas lahan sawah Kota Pariaman adalah 2.493 Ha. Penurunan luas lahan sawah ini dikarenakan adanya pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah. Begitupun dengan jumlah bina kelompok tani dan ketersediaan alat pertanian juga berkurang karena jumlah lahan sawah yang akan digarap juga berkurang. Produktivitas padi di Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Hal ini seiring dengan berkurangnya lahan sawah, namun Pemerintah Kota Pariaman tetap berupaya untuk meningkatkan produktivitas padi. Dapat dilihat pada tahun 2018 produktivitas padi Kota Pariaman adalah 5,24 Ton/Ha dimana terjadi penurunan dari 5,89 ton/Ha pada tahun 2017. Kemudian jumlah produktivitas padi meningkat lagi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 5,5 ton/Ha dan 5,62 ton/Ha. Sementara untuk tahun 2021 produktivitas padi sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,63 ton/Ha.

Untuk tanaman perkebunan seperti bawang merah, masyarakat Kota Pariaman sudah banyak yang menanam bawang merah di lahan mereka sendiri. Adanya potensi pengembangan perkebunan bawang merah di Kota Pariaman akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Dengan adanya pengembangan perkebunan bawang merah di Kota Pariaman maka masyarakat Kota Pariaman akan terbantu karena adanya pasokan bawang merah dengan harga yang stabil. Pengembangan inovasi dan teknologi sangat diperlukan guna menunjang produksi bawang merah yang maksimal di Kota Pariaman. Kota Pariaman berkomitmen untuk terus menjalankan program dan kegiatan yang mendukung sektor pertanian untuk meningkatkan keanekaragaman budidaya tanaman termasuk hortikultura seperti bawang merah.

2.3.2.4 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Pariaman. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir data yang ada memperlihatkan jumlah pedagang yang mengurus izin usaha perdagangan (SIUP) di Kota Pariaman mengalami perkembangan yang fluktuatif dan



cenderung menurun di 5 tahun terakhir. Pedagang yang mengurus SIUP terdiri dari klasifikasi pedagang kecil, pedagang menengah, dan tidak ada klasifikasi pedagang besar di Kota Pariaman.

Masih di bidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanannya, dilakukan peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya pasar modern seperti minimarket. Pada Tahun 2021 jumlah pasar tradisional 8 unit masih sama dengan tahun 2020, dan jenis perizinan yang dikeluarkan menjadi sebanyak 192 izin.

Tabel 2.98
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin	-	-	-	38	45
-	Perdagangan Kecil dan Mikro	Izin	108	137	138	140	142
-	Pedagang Menengah	Izin	30	16	25	7	7
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	55	57	60	60	65
3.	Jumlah Pasar tradisional	Buah	7	7	8	8	8
4.	Sistem Pelayanan Perizinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jenis Perizinan	Buah	115	135	192	192	192

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM, 2023

Jumlah izin perdagangan kecil dan mikro serta izin pedagang menengah Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuatif. Sedangkan jumlah cakupan bina pedagang/usaha informal di Kota Pariaman cenderung meningkat dimana pada tahun 2018 menjadi 55% meningkat pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 57% dan 60%. Pada tahun 2020 terjadi penambahan satu pasar tradisional di Kota Pariaman, sehingga yang awalnya jumlah pasar tradisional sebanyak 7 pasar, pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 8 pasar tradisional. Seiring berkembangnya jenis usaha dan perdagangan di Kota Pariaman, jenis perizinan juga selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 ada 115 jenis perizinan, tahun 2019 dan 2020 secara berurutan ada 135 dan 192 jenis perizinan. Pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 jenis perizinan sebanyak 192 buah.

2.3.2.5 Urusan Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian, sektor ini memegang peranan yang penting dalam setiap aktivitas sektor lainnya. Jika sektor industri berkembang dengan pesat maka sektor lainnya seperti investasi, perdagangan dan jasa juga akan ikut berkembang. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan dinilai dari perkembangan sektor industrinya, jika semakin baik laju



pertumbuhan sektor industrinya maka daerah tersebut juga akan semakin cepat maju dan berkembang. Hal ini nantinya akan memberikan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mengurangi nilai pengangguran dan kemiskinan.

Industri yang berkembang di Kota Pariaman masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangannya industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.99
Perkembangan capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Industri	1,70	1,60	0,20	0,34	0,38
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,44	6,86	6,89	7,04	7,15
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Termasuk Pembinaan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindagkop & KUKM, 2023

2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Tabel 2.100
Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2023

2.4.4.2 Urusan Sekretariat Dewan

Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya hanya tepat waktu pada tahun 2021.



Tabel 2.101
Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Perda APBD Perubahan	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Bagian Hukum SETDAKO, 2023

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.5.1 Unsur Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.102
Perkembangan Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan
Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda 2023

2.4.5.2 Unsur Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan



kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Pariaman, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.98

Tabel 2.103
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Opini Publik
1.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat

2.4.5.3 Unsur Kepegawaian

Selama kurun waktu tahun 2018 – 2022, jumlah PNS berfluktuasi. Tapi mulai tahun 2018 jumlah PNS Kota Pariaman mulai menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat serta dengan ditariknya pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi akibatnya guru SMA/SMK menjadi pegawai provinsi. Pada tahun 2021 jumlah PNS Kota Pariaman mulai meningkat dengan adanya penerimaan PNS untuk pemerintah daerah Kota Pariaman. Data urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.104
Perkembangan Indikator Urusan Kepegawaian Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

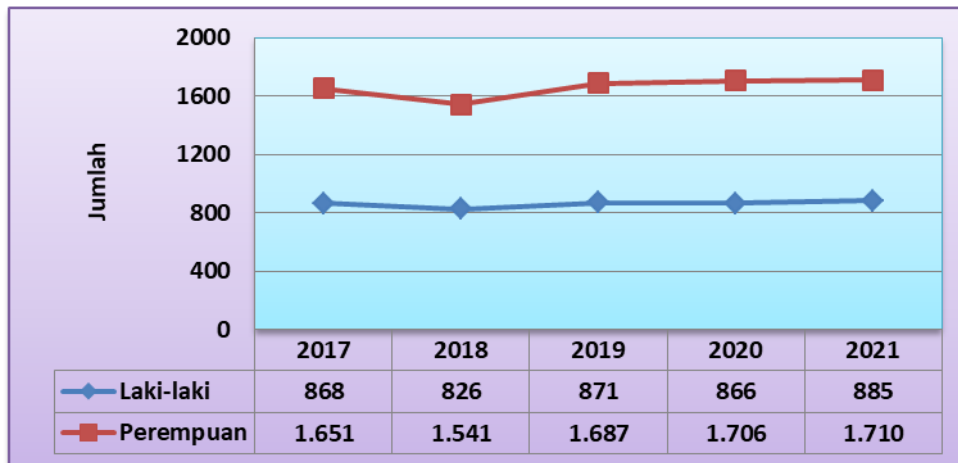
No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laki	826	871	866	885	890
2.	Perempuan	1.541	1.687	1.706	1.710	1.765
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
1.	SD	10	7	7	6	6
2.	SMP	13	10	19	5	5



No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	SMA	291	271	228	224	224
4.	D-I dan D-II	109	91	49	5	5
5.	D-III	314	368	403	405	425
6.	D-IV/S-1	1.480	1.623	1.718	1.695	1.725
7.	S-2	150	188	148	207	210
8.	S-3	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

Gambar 2.14
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman
Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

2.4.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, maka dilaksanakanlah pendidikan dan pelatihan. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PNS kepada masyarakat.

Tabel 2.105
Perkembangan Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	60	62	63	64	65
2	Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	35	37	40	42	45
3	Persentase ASN yang difasilitasi Tugas	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0



No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Belajar dan Izin Belajar					
4	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	20,5	23,5	25,0	25,0	25,0

Sumber : BKPSDM, 2023

2.4.5.5 Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan daya saing daerah, Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Pariaman antara lain :

1. Penciptaan manajemen administrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Pariaman.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Pariaman.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Pariaman.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.



a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

Tabel 2.106
Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator

No	Indikator Kinerja Daerah	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepala Daerah	0	0	0	0	0
2	Anggota DPRD	0	0	0	0	0
3	ASN	0	0	0	0	0
4	Perangkat Daerah	4	36	83	87	103
5	Masyarakat	0	0	0	0	0

Sumber : Bappeda, 2023

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Pariaman

Tabel 2.107
Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Pariaman tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dikpora	11	12.6
2	Dinkes	5	5.75
3	DPUPR & Pertanahan	2	2.30
4	DisperkimLH	1	1.15
5	Satpol PP & Damkar	3	3.45
6	BPBD	2	2.30
7	Dinsos	4	4.60
8	DP3AKB	5	5.75
9	Disdukcapil	7	8.04
10	DPMDes	3	3.45
11	Dishub	2	2.30
12	Diskominfo	8	9.20
13	Disperindagkop	2	2.30
14	DPMPTSP & Naker	6	6.70
15	DPPP	4	4.60
16	Disparbud	5	5.75
17	BPKPD	2	2.30
18	BKPSDM	2	2.30
19	Bappeda	3	3.45
20	Inspektorat	1	1.15
21	Kantor Kesbangpol	2	2.30
22	Kecamatan Pariaman Utara	3	3.45
23	Kecamatan Pariaman Tengah	2	2.30



No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
24	Kecamatan Pariaman Selatan	1	1.15
25	Kecamatan Pariaman Timur	1	1.15
Total		87	100

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2022

2.4.5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Pariaman dimana unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Pariaman menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Dalam penerapan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP.

Tabel 2.108
Jumlah Auditor di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Uraian Jabatan Fungsional	2022	Ket
1	Auditor		
	Utama	0	
	Madya	4	
	Muda	7	
	Pertama	18	
	Penyelia	-	
	Pelaksana Lanjutan	-	
	Pelaksana	-	
	2	P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)	
Madya		6	
Muda		4	
Utama		-	
Pertama		1	
3	Auditor Kepegawaian	-	

Sumber : Inspektorat Kota Pariaman, 2023



Tabel 2.109
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No.	Urain	Tahun					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai Sakip	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	61,08 (B)	
2.	Indeks RB	49,25 (C)	51,62 (CC)	53,42 (CC)	58,19 (CC)	62,68 (B)	

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia, 2023

2.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Pariaman urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

- 1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat



pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di bawah yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman selama tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018 rasio lulusan S1, S2, dan S3 yaitu sebesar 1:1,12 Dan pada tahun 2018 rasio lulusan S1, S2, dan S3 naik menjadi 1:1,04. Begitu juga untuk tahun 2019 dan tahun 2020 rasio lulusan S1, S2, dan S3 selalu naik yaitu sebesar 1:1,05. Pada tahun 2021 rasio lulusan S1, S2, dan S3 sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 1:1,07. Berikut ini tabel perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Tabel 2.110
Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 yang bekerja	1:1,04	1:1,05	1:1,05	1:1,07	1:1,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 - 65 tahun dan usia tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Pariaman pada tahun 2022 adalah 56,21 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2018 hingga 2022, rasio ketergantungan ini cukup mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Pariaman semakin kecil setiap tahunnya.

Tabel 2.111
Rasio Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Ketergantungan	56,21	56,21	56,21	56,21	56,21

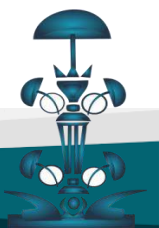
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



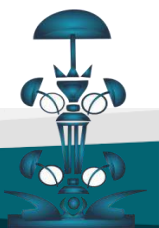
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan Kota Pariaman didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021. Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung



dan tidak langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oleh karena itu, pada RPD 2024-2026 ini Sub Bab Kinerja Keuangan Masa Lalu akan disajikan dalam dua (2) Sub, yaitu penjabaran mengenai Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2020 (Sub Subbab 3.1.1.) dan Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2021-2022 (Sub Subbab 3.1.2). Adapun gambaran keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018-2023 dan proyeksi kedepan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

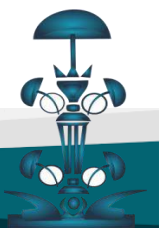
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2022

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

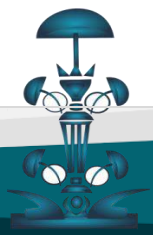
Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, secara umum pendapatan daerah Kota Pariaman mengalami penurunan dari Tahun 2018-2019, namun pada Tahun 2020 s.d 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Sehingga secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Pariaman dari Tahun 2018-2022 hanya sebesar 0,004 %, yang didukung dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,149 %, Pendapatan Transfer sebesar - 0,003 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar - 0,095 %. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut.

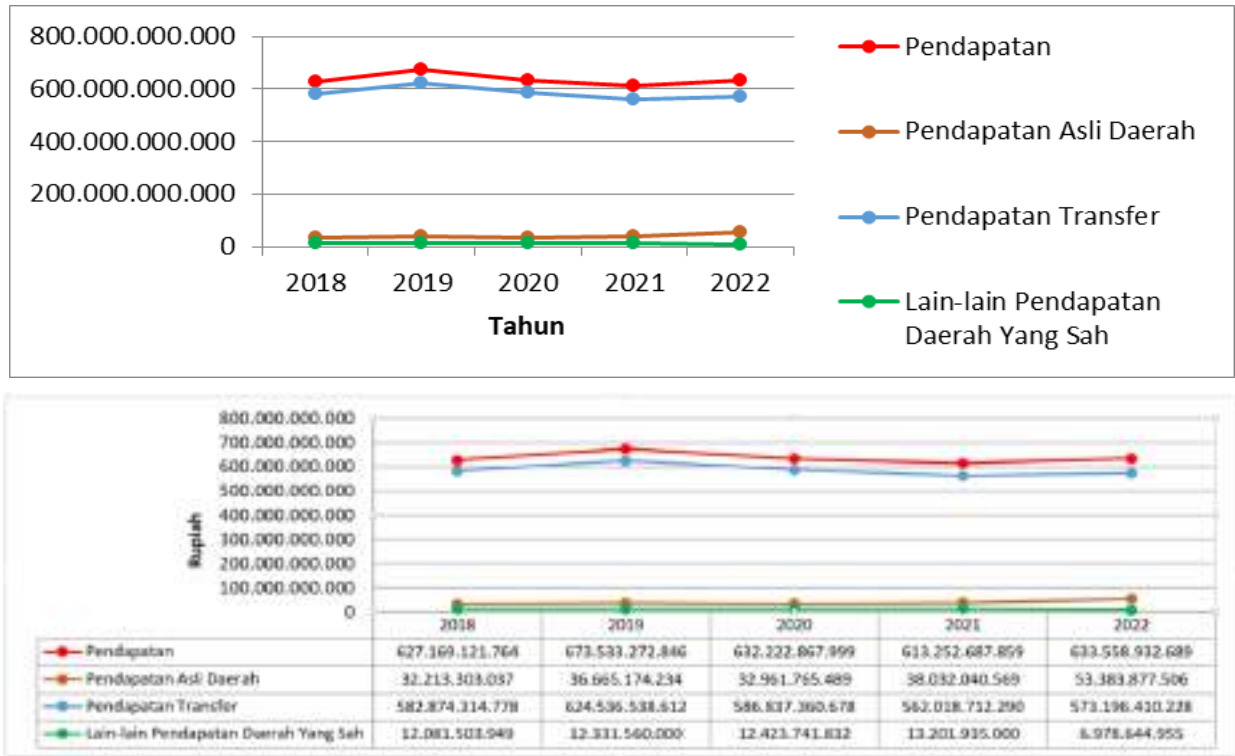


Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Rata-rata Perumbuhan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Pendapatan	627.169.121.764	673.533.272.846	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	0,004
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.213.303.037	36.665.174.234	32.961.765.489	38.032.040.569	53.383.877.506	0,149
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.982.897.861	10.064.592.854	10.043.594.333	10.881.362.969	11.110.000.000	0,028
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.184.671.257	4.390.195.539	6.635.664.791	11.325.131.000	20.525.367.276	0,520
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.752.048.233	6.673.276.954	7.242.632.803	6.986.510.155	8.972.938.163	0,185
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.293.685.686	15.537.108.887	9.039.873.562	8.839.036.445	12.775.572.067	0,043
1.2	Pendapatan Transfer	582.874.314.778	624.536.538.612	585.837.360.678	562.018.712.290	573.196.410.228	-0,003
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	509.927.165.546	526.296.352.131	487.428.440.555	475.712.378.238	488.268.602.000	-0,010
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.588.903.939	9.686.847.678	11.888.237.053	17.197.093.499	12.658.809.000	0,061
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	415.241.327.000	428.104.412.000	389.252.498.000	382.767.313.000	382.767.313.000	-0,019
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.096.934.607	88.505.092.453	86.287.705.502	75.747.971.739	92.842.480.000	0,036
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	49.770.376.154	70.671.299.995	75.614.489.000	56.907.244.000	48.458.051.000	0,024
1.2.2.1	Dana Desa	41.270.376.154	48.050.233.995	48.819.423.000	49.758.531.000	39.543.276.000	-0,001
1.2.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	8.500.000.000	22.621.066.000	26.795.066.000	7.148.713.000	8.914.775.000	0,340
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	23.176.773.078	27.568.886.486	23.794.431.123	29.399.090.052	36.469.757.228	0,132
1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.176.773.078	27.568.886.486	23.794.431.123	29.399.090.052	36.469.757.228	0,132
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.081.503.949	12.331.560.000	12.423.741.832	13.201.935.000	6.978.644.955	-0,095
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.081.503.949	12.331.560.000	12.423.741.832	13.201.935.000	2.500.000.000	-0,180
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	4.478.644.955	0
	Jumlah	627.169.121.764	673.533.272.846	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	0,00



Gambar 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

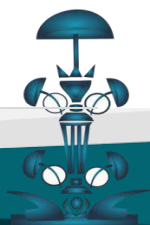


Pendapatan daerah Kota Pariaman pada Tahun 2018-2022 masih didominasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan Kontribusi rata-ratanya sebesar 91,2 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusinya sebesar 6,1 %. Kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata kontribusinya sebesar 1,8 %.

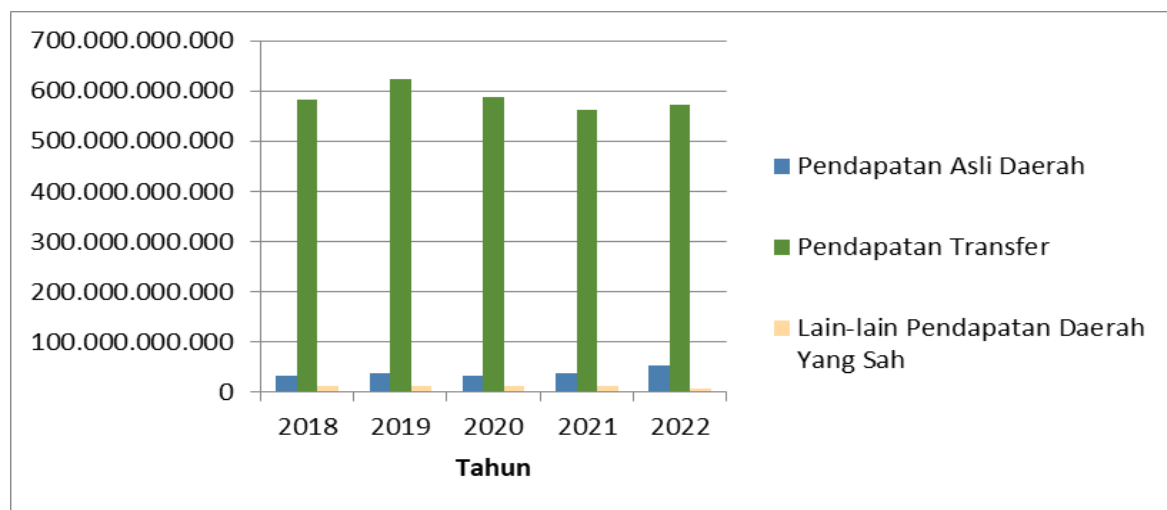
Tabel 3.2
Rata-rata Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Rata-rata Kontribusi (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Pendapatan	627.169.121.764	673.533.272.846	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.213.303.037	36.665.174.234	32.961.765.489	38.032.040.569	53.383.877.506	6,1
1.2	Pendapatan Transfer	582.874.314.778	624.536.538.612	586.837.360.678	562.018.712.290	573.196.410.228	92,1
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.081.503.949	12.331.560.000	12.423.741.832	13.201.935.000	6.978.644.955	1,8
	Jumlah	627.169.121.764	673.533.272.846	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2022



Gambar 3.2
Komposisi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2022

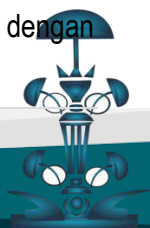
Pemerintah Kota Pariaman masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat atau pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan adanya :

1. Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada Penerimaan PBB P2, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil.
2. Sistem pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal maka potensi pendapatan belum seluruhnya dijadikan target pendapatan sehingga *potential losses* masih tinggi.
3. Perubahan kewenangan bidang perhubungan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari kedua bidang tersebut, diantaranya retribusi terminal dalam bidang perhubungan.
4. Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dibentuk belum beroperasi sehingga pendapatan yang diharapkan dari pengelolaan BUMD ini belum memberikan terhadap PAD.

Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Dalam memaksimalkan dan mendorong laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, memperbaiki basis data pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan cara-cara pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dengan



elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara pendataan potensi obyek pajak baru, menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru pula. Dalam penyusunan perda baru tersebut diupayakan sebagai respon terhadap perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah, retribusi daerah, untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan manapun, termasuk oleh pemerintah pusat. Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan, mengembangkan sistem evaluasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.

2. Optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Upaya mendongkrak perolehan setoran PAD kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan modal BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD, pemberian pedoman tata kelola BUMD, dan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMD.

3. Pengelolaan APBD secara efektif dan efisien

Pengelolaan APBD secara ekonomis, efektif, dan efisien akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB disamping konsumsi masyarakat, investasi, ekspor dan impor. Pemerintah daerah menentukan prioritas dan memilih program kegiatan yang dapat menjadi pengungkit atau *leverage* bagi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan aparatur daerah dapat secara inovatif dan kreatif mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan menggerakkan semua sektor perekonomian yang ada secara cepat dan ini sekaligus dapat menimbulkan lapangan-lapangan usaha, sehingga akan dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola pemetaan untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, teknologi yang digunakan dan sumber daya



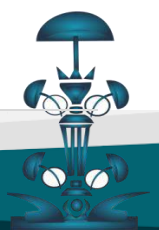
alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pembangunan dalam lingkup daerah tidak selalu merata dan seringkali terjadi kesenjangan antar daerah.

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu sebagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran masuk dana dari luar wilayah. Dengan melihat data di atas, Pemerintah Kota Pariaman perlu membuka akses dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru seperti daerah-daerah Kota Pariaman yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

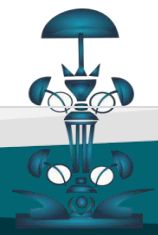
Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan klasifikasi belanja yang dilaksanakan mulai tahun 2021. Klasifikasi belanja tahun 2017-2020 menggunakan klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung, sedangkan mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer Belanja Daerah Kota Pariaman dari tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.



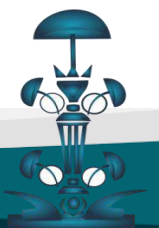
Tabel 3.3
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Rata-rata Perumbuhan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
2	Belanja	634.781.641.182	703.483.292.078	645.135.093.144	613.179.797.663	641.914.693.376	
2.1	Belanja Operasi						
2.1.1	Belanja Pegawai	234.833.152.521	266.691.016.395	280.653.181.289	266.326.392.272	293.093.870.141	0,238
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	159.338.201.516	166.159.708.871	165.437.219.053	175.213.524.735	187.853.577.191	0,198
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,000
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,000
2.1.5	Belanja Hibah	14.640.293.271	16.503.272.667	12.191.902.747	1.520.007.328	3.471.785.000	0,275
2.1.6	Bantuan Sosial	4.483.229.000	2.572.500.000	0	4.072.788.000	1.577.520.000	-0,456
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0,000
	Jumlah Belanja Operasi	410.294.876.308	451.926.497.933	427.282.303.089	447.132.712.336	485.996.762.332	0,180
2.2	Belanja Modal						
2.2.1	Belanja Tanah	0	2.748.500.000	2.633.337.991	0	3.000.000.000	0,097
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.866.572.870	19.701.038.197	41.900.384.698	17.523.370.099	12.016.909.074	0,233
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	36.069.169.688	72.124.615.488	20.639.966.545	16.544.636.959	10.802.887.600	-0,269
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.536.647.661	58.746.416.880	26.147.717.098	35.610.134.342	39.484.670.576	-0,274
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.165.008.461	3.074.072.107	3.148.144.112	17.000.000	1.883.442.864	108,568
	Jumlah Belanja Modal	132.430.598.580	156.394.642.681	94.469.539.442	69.704.141.367	67.187.810.014	-0,513
2.3	Belanja Tak Terduga						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	0	26.043.161.776	0	500.000.000	-0,662
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	26.043.161.776	-	500.000.000	-0,662
2.4	Belanja Transfers						
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan						
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	920.608.033	857.806.941	898.793.424	1.096.946.170	3.138.442.630	2,061
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	378.001.646	384.661.005	568.566.081	642.133.392	-	-0,020
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.299.609.679	1.242.668.546	1.467.379.505	1.739.079.562	3.138.442.630	1,077
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan						
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	-	1.210.800.000	4.066.800.000	5.199.600.000	6.006.000.000	2,792
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	90.322.604.566	92.272.726.003	89.282.986.002	89.204.264.399	79.085.888.200	-0,125
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	433.752.000	415.664.915	542.623.330	-	-	-
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	90.756.558.595	93.899.482.918	93.872.709.332	94.403.864.399	85.091.888.200	-0,060
	Jumlah Transfers	92.056.166.274	95.142.161.464	95.340.083.837	96.342.943.961	88.230.331.030	-0,036
	Jumlah Belanja	634.781.641.182	703.483.292.078	645.135.093.144	613.179.797.663	641.914.693.376	0,02

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2022

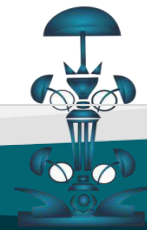


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2022 total belanja cenderung mengalami fluktuatif, dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 0,02 %. Pada Tahun 2018 s.d 2019 mengalami peningkatan. Dan Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian Tahun 2022 naik lagi jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,6 %.



Tabel 3.4
Kontribusi rata-rata sub belanja daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rok	Uraian	Realisasi (Rp)					Target	Kontribusi (%)					Rata-rata kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022	
I	Belanja	834.781.641.182	793.483.292.979	648.138.093.144	613.179.797.663	641.914.693.378							
2.1	Belanja Operasi												
2.1.1	Belanja Pegawai	236.833.152.521	299.891.016.395	259.053.181.289	266.326.392.272	293.093.870.141	39,66	37,91	40,25	43,43	45,88	40,85	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	159.338.201.516	199.159.708.871	155.437.219.053	175.213.534.735	197.853.577.191	24,83	25,82	24,09	28,57	29,39	26,94	
2.1.3	Belanja Bangsa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	14.840.263.271	16.803.272.997	12.161.902.747	1.500.007.328	3.471.788.000	2,31	2,35	1,88	0,25	0,54	1,47	
2.1.6	Bantuan Sosial	4.483.229.000	2.572.500.000	0	4.072.798.000	1.977.820.000	0,71	0,37	0,00	0,98	0,25	0,40	
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja Operasi	419.284.876.308	491.828.497.833	427.262.393.089	447.132.712.336	495.998.782.332	64,64	64,24	66,23	72,82	79,71	68,79	
2.2	Belanja Modal												
2.2.1	Belanja Tanah	0	2.748.000.000	2.033.337.991	0	3.000.000.000	0,00	0,39	0,41	0,00	0,47	0,25	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.886.572.070	19.701.038.197	41.906.394.896	17.523.379.089	12.019.969.074	3,19	2,80	6,48	2,89	1,67	3,42	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	36.059.169.588	73.124.815.488	30.839.955.549	16.544.938.656	10.803.587.500	5,64	10,25	3,20	2,70	1,68	4,70	
2.2.4	Belanja Jalan, Bangsal dan Jembatan	72.539.847.561	59.749.416.839	39.147.717.058	35.819.134.342	39.484.670.070	11,43	8,35	4,05	5,81	5,15	7,16	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.185.008.401	3.074.072.107	3.148.144.112	17.000.000	1.883.442.864	0,99	0,44	0,48	0,00	0,29	0,36	
	Jumlah Belanja Modal	132.438.988.580	196.394.642.691	84.468.939.442	69.704.141.367	67.187.816.014	25,86	22,23	14,84	11,57	10,47	15,91	
2.3	Belanja Tak Terduga												
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	0	28.043.161.779	6	500.000.000	0,00	0,00	4,35	0,00	0,09	0,08	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	0	0	28.043.161.779	6	500.000.000	0,00	0,00	4,35	0,00	0,08	0,08	
2.4	Belanja Transfer												
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan												
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	920.008.033	857.806.941	858.793.424	1.096.948.170	3.139.442.030	0,15	0,12	0,14	0,18	0,49	0,21	
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	378.801.848	384.861.805	568.986.081	842.133.350	-	0,06	0,05	0,06	0,14	0,00	0,07	
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.298.809.881	1.242.668.746	1.427.779.505	1.939.081.520	3.139.442.030	0,21	0,17	0,20	0,32	0,49	0,28	
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan												
2.4.2.1	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	-	1.210.800.000	4.066.800.000	5.199.000.000	6.000.000.000	0,00	0,17	0,63	0,85	0,94	0,52	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	90.322.804.900	92.272.726.003	89.262.996.000	89.204.284.289	79.085.888.200	14,23	13,12	13,84	14,56	12,32	13,91	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partisipasi	433.752.000	415.054.919	542.923.330	-	-	0,07	0,06	0,08	0,00	0,00	0,04	
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	90.756.556.900	93.898.480.919	93.872.709.330	84.403.884.289	85.981.888.200	14,30	13,35	14,55	15,46	13,28	14,17	
	Jumlah Transfer	92.056.166.274	95.142.151.464	95.340.988.837	86.342.943.861	86.229.321.030	14,50	13,52	14,78	15,71	13,74	14,45	
	Jumlah Belanja	834.781.641.182	793.483.292.979	648.138.093.144	613.179.797.663	641.914.693.378							



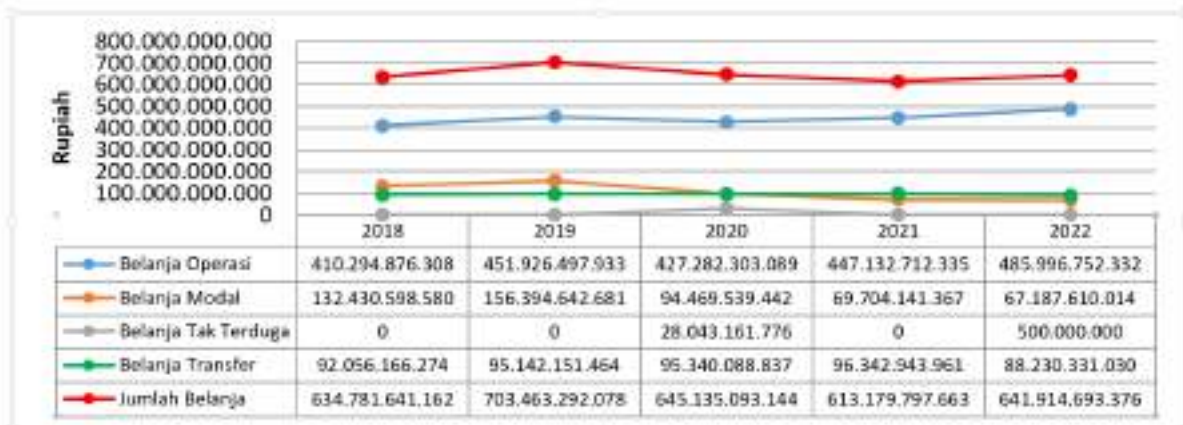
Berdasarkan tabel diatas dari total belanja daerah, rata-rata proporsi belanja terbesar masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 40,85 %. Dan ikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 26,04 %. Serta kemudian belanja tranfers bantuan keuangan desa sebesar 13,61 %. Kemudian jika dilihat dari kelompok belanja maka rata-rata proporsi belanja terbesar adalah belanja operasi 68,75 %, kemudian diikuti oleh belanja modal 15,91 %, belanja tranfers 14,45 % dan terakhir belanja tidak terduga sebesar 0,88 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Komposisi Rata-rata Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

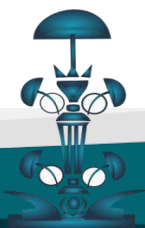
Kode Rek	Uraian	Realisasi (Rp)				Target	Rata-rata Kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja						
1	Belanja Operasi	410.294.876.308	451.926.497.933	427.282.303.089	447.132.712.335	485.996.752.332	68,75
2	Belanja Modal	132.430.598.580	156.394.642.681	94.469.539.442	69.704.141.367	67.187.610.014	15,91
3	Belanja Tak Terduga	0	0	28.043.161.776	0	500.000.000	0,88
4	Belanja Tranfers	92.056.166.274	95.142.151.464	95.340.088.837	96.342.943.961	88.230.331.030	14,45
	Jumlah Belanja	634.781.641.162	703.463.292.078	645.135.093.144	613.179.797.663	641.914.693.376	100

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2022

Gambar 3.3
Komposisi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2022



3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

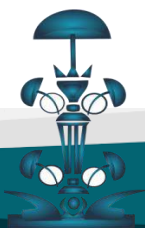
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan Kota Pariaman Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Sak	Uraian	Realisasi				Target	Ket
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Penggunaan SLPA tahun sebelumnya	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636	2.782.870.490	2.855.760.687	
3.1.2	Pencaian Dana Cabang	0	0	0	0	0	
3.1.3	Hasil Perjanjian Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	8.000.000.000	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	
3.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636	2.782.870.490	10.855.760.687	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.800.000.000	0	8.650.000.000	0	2.500.000.000	
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
3.2.4	Pembayaran Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
3.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.800.000.000	0	8.650.000.000	0	2.500.000.000	
3.3	PEMBAIYAHAN BERSIH / NETTO	61.887.634.270	54.275.114.870	15.695.095.636	2.782.870.490	8.355.760.687	
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	54.275.114.870	24.345.095.636	2.782.870.490	2.855.760.687	-	

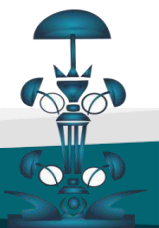
Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2022

Dari tabel pembiayaan daerah dapat dilihat bahwa, penerimaan pembiayaan mengalami kecenderungan yang menurun mulai dari tahun 2018 sebesar Rp. 63.687.634.270,- hingga tahun 2021 menjadi Rp. 2.782.870.490,- Walaupun tahun 2022 mengalami peningkatan namun relatif kecil menjadi Rp 10.855.760.687,- Hal ini pun disumbangkan dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 8.000.000.000,- Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun sudah bagus dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan daerah yang sudah efektif dan efisien. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan mengalami fluktuasi dan tidak rutin tiap tahunnya.



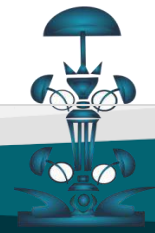
3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Data pertumbuhan neraca daerah tahun 2018 s/d 2022 selengkapnya seperti tabel dibawah ini.

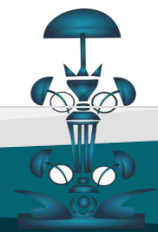


Tabel 3.7
Perkembangan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

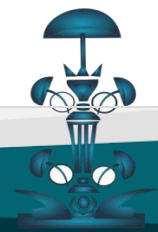
NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aset						
1.1	Aset Lancar						
1.1.1	Kas dan Bank						
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	54.012.007.331,00	23.376.723.044,96	1.480.710.180,38	5.324.262.445,06	671.014.196,47	
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.365.952,00	353.627.663,60	4.261.336,00	-	
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	74.219.064,00	-	-	172.917.200,00	-	
1.1.1.4	Kas Lainnya	185.627.675,00	967.730.502,00	383.303.480,00	85.296.642,00	-	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	581.650.747,38	321.538.311,38	-	
1.1.3	Piutang						
1.1.3.1	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	
1.1.3.2	Piutang Pajak Daerah	4.961.088.098,00	1.395.564.869,00	2.084.592.063,00	2.898.506.002,00	3.433.752.179,00	
1.1.3.3	Piutang Retribusi Daerah	351.180.230,00	638.442.744,00	697.624.387,00	1.082.219.638,67	1.656.113.696,00	
1.1.3.4	Piutang Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-	-	
1.1.3.5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	
1.1.3.6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana	-	2.364.843.024,00	-	-	-	
1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	
1.1.3.8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2.191.710.628,00	1.794.471.914,00	4.994.635.816,00	6.017.751.497,00	3.260.058.055,00	
1.1.3.9	Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	
1.1.3.10	Penyisihan Piutang Pendapatan	(4.355.534.076,80)	(870.381.672,25)	(913.938.676,02)	(1.202.911.539,55)	-	
1.1.3.11	Piutang Lainnya	154.430.780,17	790.782.641,17	755.707.685,83	674.606.001,46	945.240.000,60	
1.1.3.12	Penyisihan Piutang Lainnya	(146.360.548,17)	(146.099.882,17)	(723.543.234,85)	(658.748.832,31)	(1.867.818.008,62)	
1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	
1.1.5	Persediaan	3.768.432.379,00	4.747.064.186,48	6.014.169.321,00	5.792.752.627,98	4.901.841.837,80	
	JUMLAH ASET LANCAR	61.286.754.538,65	35.065.698.215,79	16.589.339.723,13	26.475.921.229,70	12.949.227.230,98	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Nonpermanen						
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						
1.2.1.2	Investasi dalam Obang						
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
1.2.1.4	Dana Bergulir						
1.2.1.5	Penyisihan Dana Bergulir						
1.2.1.6	Deposito Jangka Panjang						
1.2.1.7	Investasi Non Permanen Lainnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	



NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.1.8	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(1.705.495.500,00)	(1.701.996.500,00)	(1.700.700.500,00)	(1.740.423.500,00)	-	
1.2.3	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	
1.2.3.1	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	48.022.899.000,00	48.022.899.000,00	50.672.898.000,00	50.672.899.000,00	50.172.899.000,00	
1.2.3.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	48.757.403.500,00	48.780.902.500,00	57.412.138.500,00	57.426.475.500,00	50.926.475.500,00	
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	82.855.452.772,25	9.5.844.576.346,25	98.290.251.028,25	98.868.788.028,25	102.235.645.028,25	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	185.812.458.515,54	191.825.465.370,88	228.433.238.307,24	232.772.581.054,00	243.275.542.205,41	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	446.078.981.729,57	478.208.875.795,00	497.738.203.155,00	525.890.568.142,72	537.882.838.778,45	
1.3.4	Jalan, Jangkar, dan Jembatan	716.787.591.804,91	774.184.026.389,91	809.014.409.820,40	834.738.817.310,89	889.090.764.182,54	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	65.911.718.507,70	70.948.012.296,25	77.808.877.352,58	78.131.932.472,58	70.727.522.968,56	
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.657.146.899,00	66.983.672.809,31	58.298.079.801,00	65.617.242.127,72	88.077.600.463,72	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(815.994.431.859,99)	(910.358.894.826,88)	(1.019.274.871.487,00)	(1.124.908.838.026,31)	(1.124.938.838.026,31)	
	JUMLAH ASET TETAP	718.818.929.549,28	784.736.735.533,63	752.106.428.940,99	710.681.392.117,49	775.362.376.679,63	
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Perjualangungan	-	-	-	-	-	
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.625.781.098,18	2.953.357.075,87	2.433.377.709,87	2.510.188.683,88	-	
1.5.3	Kemiskinan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	687.162.000,00	687.162.000,00	687.162.000,00	687.162.000,00	687.012.000,00	
1.5.5	Kas yang Dibekal Penggunaannya	-	-	-	128.935.944,00	-	
1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(502.748.583,34)	(602.103.610,00)	(564.381.100,67)	(687.162.000,00)	(687.162.000,00)	
1.5.7	Aset Lain-lain	1.812.775.779,49	15.395.962.700,88	18.523.128.920,84	15.025.110.804,92	17.581.067.446,79	
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	(17.055.473.488,27)	(13.129.065.280,45)	(13.129.065.280,45)	
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.622.960.293,34	18.233.978.185,78	3.033.803.975,77	4.533.153.132,34	4.462.452.185,34	
	JUMLAH ASET	833.400.059.881,17	866.797.314.216,18	830.023.711.147,89	793.316.941.979,53	852.700.531.575,95	
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhibungan Pihak Ketiga (PFK)	688.200,00	2.624.524,00	175.800.028,00	3.113.264.201,00	481.315,00	
2.1.2	Utang Potongan Pajak Pusat dan Tilikan Lainnya	-	-	-	-	-	
2.1.3	Utang Bunga	-	-	-	-	-	

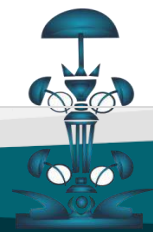


NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
2.1.4	Bagan Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	75.390.702,32	37.619.029,46	19.306.400,00	70.908.010,00	-	
2.1.6	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	-	116.890.429,00	2.707.046.901,00	714.876.188,00	-	
2.1.7	Utang Transfer out	-	-	200.546.407,00	-	-	
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	4.672.366.280,50	7.937.000,00	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	76.035.982,32	157.103.981,46	7.775.094.627,50	3.906.984.415,60	714.493.883,60	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	JUMLAH KEWAJIBAN	76.035.982,32	157.103.981,46	7.775.094.627,50	3.906.984.415,60	714.493.883,60	
3	EKUITAS						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-	
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Cadangan Prutang	-	-	-	-	-	
3.1.4	Cadangan Periodean	-	-	-	-	-	
3.1.5	Cadangan Belanja yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran	-	-	-	-	-	
3.1.7	Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR						
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Dinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
3.2.2	Dinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	
3.2.3	Dinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI						
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN						
3.3.1	Dinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN						
3.4	EKUITAS	833.324.020.978,85	866.640.216.234,72	822.248.616.520,39	789.409.957.563,93	853.843.590.884,99	
	JUMLAH EKUITAS	833.324.020.978,85	866.640.216.234,72	822.248.616.520,39	789.409.957.563,93	853.843.590.884,99	



NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	833.400.056.881,17	866.797.314.216,18	830.023.711.147,89	793.316.941.979,53	854.558.084.768,59	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2022



1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

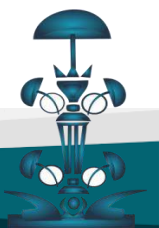
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rata-rata pertumbuhan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah 34,54 % menandakan bahwa roda pemerintahan dijalankan dengan tidak sepenuhnya mengandalkan pinjaman.



3. EKUITAS

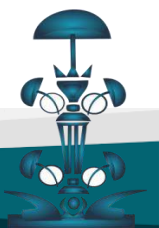
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Nilai ekuitas dari tahun 2018–2022 rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 8,97 % menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki kekayaan bersih yang menjadi modal kerja dalam pelaksanaan program kegiatan.

3.1.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perbedaannya Rasio Cepat sudah mengeluarkan nilai persediaan dari aset lancar, karena persediaan meskipun termasuk aset lancar dianggap kurang cepat untuk dicairkan (kurang likuid). Angka rasio diatas 100% menunjukkan hasil yang baik. Artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang ada. Sedangkan angka dibawah 100 % menunjukkan hasil yang kurang.

Rasio likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar dan Rasio Cepat memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Rasio Lancar tahun 2018 sebesar 804,89 %, yang berarti kemampuan membayar Kewajiban Jangka Pendek hampir 8 (delapan kali lipat. Sedang Rasio Cepat (*quick ratio*) sebesar 755,33 %, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Pariaman membayar Kewajiban Jangka Pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid sangat baik lebih dari 7 kali lipat. Namun pada Tahun 2022 Rasio Lancar menjadi 5,24 %. Nilai-nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Sementara pada Quick Ratio pada Tahun 2022 menjadi 3,76 %. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Pariaman setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.8
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rasio Lancar	804,89	223,20	2,13	5,24	18,12	
2	Quick Ratio	755,33	192,98	1,28	3,76	11,26	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023 (Diolah)

3.1.3.2 Rasio Solvabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi jangka panjangnya dengan aset yang dimilikinya. Rasio solvabilitas yang dihitung adalah rasio kewajiban terhadap aset (*Total Debt to Total Asset Ratio*) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*).

Tabel 3.9
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset (Total Debt to Total Asset Ratio)	0,91%	1,81%	90,87%	49,25%	8,38%	
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)	0,91%	1,81%	94,96%	49,48%	0,38%	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023 (Diolah)

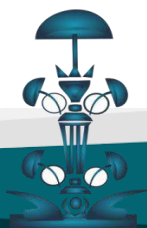
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2018 sebesar 0,91 % dan pada tahun 2022 sebesar 8,38 %. Jika dilihat dari hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan selama tahun 2018-2022 masih mampu untuk memenuhi semua kewajibannya.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas tahun 2018 sebesar 0,91 % dan pada tahun 2022 sebesar 0,08 %. Perhitungan diatas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya masih dalam kategori baik. Kinerja keuangan Pemda yang sangat baik, karena ekuitas dana yang dijadikan jaminan kewajiban hanya kecil sekali yaitu berada di kisaran angka 1 %.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

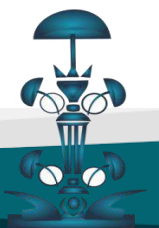
Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota



Pariaman pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

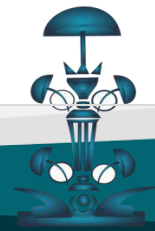
Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kota Pariaman.



Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2018-2022

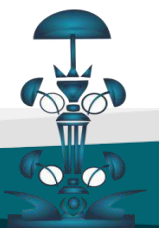
No.	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		Rata-rata Pencapaian
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Daerah	715.253.647.657	634.701.681.164	732.935.723.418	710.863.292.079	704.726.685.521	645.135.993.145	674.126.831.748	613.179.701.663	641.914.993.376	606.442.569.314	
1	Belanja Operasi	445.138.880.882	419.254.070.388	484.802.521.539	451.926.497.933	453.294.258.866	427.282.363.889	496.726.974.675	447.132.712.335	485.996.752.332	456.296.436.754	
-	- Belanja Pegawai	243.998.663.371	235.434.442.521	277.253.489.733	269.457.066.399	258.770.057.630	251.891.125.789	286.107.123.420	256.326.392.272	293.093.873.141	280.295.169.308	
-	- Belanja Barang	186.486.579.291	164.089.091.767	194.294.608.438	176.346.311.538	192.274.200.258	163.693.577.300	202.729.856.395	175.213.524.735	187.853.577.191	175.967.527.796	
-	- Belanja Hibah	7.960.973.650	6.286.113.020	20.719.253.368	3.500.600.000	2.170.000.000	1.790.900.000	2.778.794.939	1.820.007.328	3.471.785.000	3.342.699.850	
-	- Belanja Bantuan Sosial	4.962.364.500	4.403.229.000	2.625.000.000	2.572.500.000	0	0	511.260.000	40.727.680.000	15.775.000.000	6.199.000.000	
2	Belanja Modal	176.974.791.133	132.436.598.562	171.956.619.758	158.364.642.682	123.705.351.915	94.489.538.443	79.451.123.879	89.744.941.387	87.987.890.614	81.316.159.565	
-	- Belanja Tanah	1.609.300.000	-	5.759.800.000	2.748.500.000	3.961.843.460	2.633.337.992	-	-	3.000.000.000	2.737.000.000	
-	- Belanja Peralatan dan Mesin	23.447.463.009	21.805.344.243	23.836.750.332	21.527.377.895	44.595.614.870	40.032.441.637	20.131.725.991	17.523.370.065	12.016.505.074	10.610.882.800	
-	- Belanja Bangunan dan Gedung	59.695.293.919	35.976.109.589	80.131.160.676	72.079.639.488	24.690.042.027	20.529.078.195	16.732.751.757	16.544.636.996	10.802.587.500	9.410.979.598	
-	- Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	89.651.174.105	72.539.847.661	60.708.311.750	58.751.141.886	45.196.853.679	26.136.217.096	40.538.342.118	36.619.134.342	39.484.670.576	36.971.655.693	
-	- Belanja Aset Tetap dan Lainnya	2.371.450.000	2.109.297.062	1.496.597.000	1.307.587.500	5.431.997.779	5.138.464.611	47.300.000	17.000.000	1.883.442.664	1.596.043.494	
3	Belanja Tidak Terduga	409.866.866	0	298.688.866	0	36.325.962.755	26.843.961.776	938.625.979	-	589.986.888	0	
4	Belanja Transfer	92.748.265.732	92.956.196.274	95.977.582.121	95.942.151.464	97.395.172.863	95.349.868.837	97.617.187.327	96.142.943.961	88.218.331.638	86.689.964.985	
-	- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1.616.163.875	1.299.609.679	2.060.302.100	1.242.688.546	3.074.666.127	1.467.379.595	2.603.442.823	1.939.079.562	3.138.442.630	1.778.075.800	
-	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik	91.122.101.847	90.756.586.595	93.917.280.021	94.699.462.918	94.320.506.736	93.872.708.332	94.403.664.399	94.403.864.399	85.081.886.200	85.091.888.185	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023 (Diolah)



b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

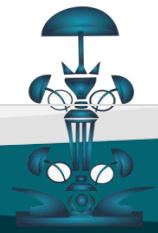
Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pariaman 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 3.11 menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.



Tabel 3.11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Belanja Operasi					
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	174.187.835.386	185.335.442.097	182.868.708.897	165.955.666.846	166.344.463.248
-	Belanja Tambahan Penghasilan	43.268.753.471	58.818.362.872	48.458.882.269	52.308.406.833	70.409.986.223
-	Biaya Pemungutan Pajak	64.849.130	42.658.605	82.712.280	0	9.432.000
-	Insentif Pemungutan Pajak	416.797.351	463.163.370	388.832.848	332.622.500	413.700.000
-	Insentif Pemungutan Retribusi	141.051.747	153.815.788	147.531.000	497.844.480	796.361.021
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	2.373.660.000	2.237.340.000	2.306.400.000	5.910.881.412	5.975.117.627
-	Belanja Honorarium	15.315.946.500	22.771.861.554	22.538.729.277	7.368.649.090	2.798.495.580
-	Belanja Uang Lembur	596.150.000	1.449.802.500	1.588.977.500	0	0
-	Belanja Premi Asuransi	2.999.916.056	6.954.076.139	8.181.427.151	10.835.119.322	9.048.447.755
-	Belanja Pakaian	4.936.944.650	3.074.292.652	2.272.188.300	0	0
-	Belanja Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS	40.638.201.728	37.963.428.400	32.129.221.438	23.129.425.523	24.818.265.244
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	113.500.000	39.900.000	121.250.000	.0	0
-	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	542.041.800	460.305.000	391.125.000	458.923.500	526.130.000
B.	Belanja Modal					
-	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	132.430.598.581	156.394.642.681	94.469.539.442	69.704.141.368	61.316.158.585
	Total	415.026.330.344	476.159.091.658	395.945.525.402	336.501.680.874	342.456.557.283

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023



Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2016-2020

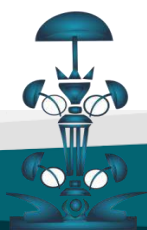
No.	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	%	Ket
		A	b	(a/b) x 100 %	
1	2018	415.026.330.344	636.581.641.163	65	
2	2019	476.159.091.658	703.463.292.078	68	
3	2020	395.945.525.402	653.945.525.402	61	
4	2021	336.501.680.874	613.179.797.664	55	
5	2022	342.456.557.283	608.942.560.334	56	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah berfluktuatif dan cenderung turun dari tahun ke tahun pada periode Tahun 2018–2022.

c. Analisis Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:



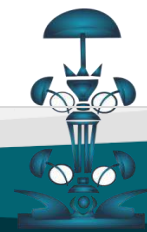
Tabel 3.13
Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
A	Belanja Wajib	328.508.835.966	359.510.653.761	369.210.832.475	327.455.246.360	335.335.849.964	
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	174.187.835.386	185.335.442.097	162.548.492.695	165.955.666.846	166.344.463.248	
-	Tambahan Penghasilan PNS	43.268.753.471	58.818.362.872	78.553.868.989	52.308.406.833	70.409.986.223	
-	Biaya Pemungutan Pajak	64.849.130	42.658.605	0	0	9.432.000	
-	Insentif Pemungutan Pajak	416.797.351	463.163.370	388.832.848	332.622.500	413.700.000	
-	Insentif Pemungutan Retribusi	141.051.747	153.815.788	147.531.000	497.844.480	796.361.021	
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta	2.373.660.000	2.237.340.000	1.885.333.000	5.910.881.412	5.975.117.627	
-	Belanja Hibah	14.640.293.271	16.503.272.667	1760.600.000	1.520.007.328	3382939850	
-	Belanja Bantuan Sosial	448.322.900	2.572.500.000	0	4072788000	619800000	
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	883.286.050	923.400.050	1.467.379.505	1.939.079.562	1.778.076.800	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	91.650.234.660	92.460.264.560	93.872.709.332	94.403.864.399	85.091.888.195	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	433.752.000	433.752	542.923.330	514.085.000	514.085.000	
-	Belanja Tidak Terduga	0	433.752	28.043.161.776	0	0	
B	Belanja Mengikat	2.999.916.056	6.954.076.139	647.517.201	10.835.119.322	9.048.447.755	
-	Belanja Premi Asuransi	2.999.916.056	6.954.076.139	647.517.201	10.835.119.322	9.048.447.755	
C	Pengeluaran Pembiayaan	0	1.850.000.000	8.650.000.000	0	2500.000.000	
-	Penyertaan Modal pada Bank	0	1.850.000.000	8.650.000.000	0	2500.000.000	
	Total (A + B + C)	331.508.752.022	366.464.729.000	378.508.349.676	338.290.365.682	346.884.297.719	

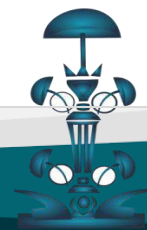


Tabel 3.14
Target Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

NO	Uraian	Proyeksi			Ket
		2024	2025	2026	
A	Belanja Wajib	344.542.566.963	352.383.418.303	362.824.279.961	
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	169.671.352.513	173.064.779.563	178.256.722.950	
-	Tambahan Penghasilan PNS	71.818.185.947	73.254.549.666	75.452.186.156	
-	Biaya Pemungutan Pajak	9.620.640	9.813.053	10.009.314	
-	Insentif Pemungutan Pajak	421.974.000	430.413.480	439.021.750	
-	Insentif Pemungutan Retribusi	812.288.241	828.534.006	845.104.686	
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta	6.094.619.980	6.216.512.379	6.340.842.627	
-	Belanja Hibah	3.450.598.647	3.519.610.920	3.590.002.832	
-	Belanja Bantuan Sosial	632.196.000	644.839.920	657.736.718	
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.813.638.336	1.849.911.103	1.886.909.325	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	86.793.725.959	88.529.600.478	90.300.192.488	
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	524.366.700	534.854.034	545.551.115	



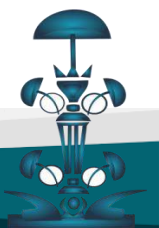
NO	Uraian	Proyeksi			Ket
		2024	2025	2026	
-	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	
B	Belanja Mengikat	<u>9.229.416.710</u>	<u>9.414.005.044</u>	<u>9.602.285.145</u>	
-	Belanja Premi Asuransi	9.229.416.710	9.414.005.044	9.602.285.145	
C	Pengeluaran Pembiayaan	<u>0</u>	<u>2.500.000.000</u>	<u>0</u>	
-	Penyertaan Modal pada Bank	0	2.500.000.000	0	
	Total (A + B + C)	353.771.983.673	364.297.423.347	372.426.565.106	



3.2.2 Pembiayaan Daerah

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

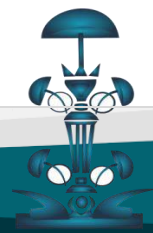
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2018 sampai 2022.



Tabel 3.15
Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pariaman
Tahun 2018-2022

NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	627.169.121.763	673.533.272.845	632.222.867.998	613.252.687.860	606.843.919.953
2	Belanja Daerah	634.781.641.164	703.463.292.078	645.135.093.144	613.179.797.664	606.442.560.334
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.800.000.000	0	8.650.000.000	0	2.500.000.000
A	Defisit Riil	(9.412.519.401)	(29.930.019.233)	(21.562.225.146)	72.280.196	(2.098.640.381)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636	2.782.870.491	2.855.760.688
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
3	Koreksi	0	0	0	0	0
B	Total Realisasi Penerimaan	63.687.634.270	54.275.114.870	24.345.095.636	2.782.870.491	2.855.760.688
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (A+ B)	77.189.993.670	54.275.114.869	24.345.095.637	2.855.150.687	757.120.307

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang cenderung menurun selama kurun waktu 2018 sampai 2022. Pada tahun 2018 nilai SiLPA sebesar Rp. 63.687.634.271,-. Tahun 2019 nilai SiLPA turun menjadi Rp. 54.275.114.870,-. Kemudian pada tahun 2020, 2021, 2022, nilai SiLPA turun lagi dengan masing-masingnya Rp. 24.345.095.637,- Rp. 2.782.870.491,- dan 2.855.760.687,-. Nilai SiLPA yang cenderung turun dari tahun menunjukkan pemerintah Kota Pariaman sudah efektif dalam menyusun perencanaan. Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

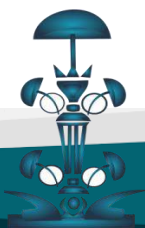
NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	63.687.634.271	54.275.114.870	24.345.095.637	2.782.870.491	2.855.760.687
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	63.687.634.271	54.275.114.870	24.345.095.637	2.782.870.491	2.855.760.687

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir



tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

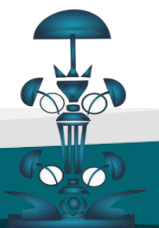
Pada akhir Tahun 2019 dan awal Tahun 2020, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Gambar 3.4
Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Sumber : Bappeda, 2021

Pemerintah Kota Pariaman untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBD nya harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 3.5
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

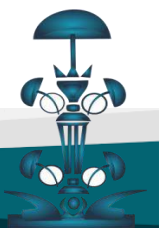
PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pajak Daerah ➢ Retribusi Daerah ➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Lain-lain PAD yg Sah 	Belanja Operasional <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Pegawai ➢ B. Barang & Jasa ➢ B. Bunga ➢ B. Subsidi ➢ B. Hibah ➢ B. Bantuan Sosial 	Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ SILPA ➢ Pencairan Dana Cadangan ➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Penerimaan Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➢ Transfer Pemerintah Pusat ➢ Transfer Antar Daerah 	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. M. Tanah ➢ B. M. Peralatan & Mesin ➢ B. M. Gedung & Bangunan ➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi ➢ B. M. Aset Tetap Lainnya 	Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembentukan Dana Cadangan ➢ Penyertaan Modal Daerah ➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ➢ Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hibah ➢ Dana Darurat ➢ Lain-Lain Pendapatan 	Belanja Tidak Tersebut <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Bagi Hasil ➢ B. Bantuan Keuangan 	

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2023

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman pada Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018- 2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Pemerintah Kota Pariaman. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri



dirumah selama pandemic Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah penangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

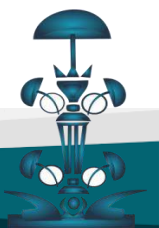
Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2021 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata rata periode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan isu perubahan kebijakan fiskal, di samping sumping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;



10. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
12. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
15. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
16. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
17. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan.

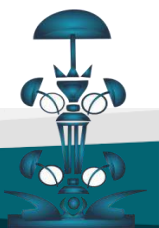
Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pariaman mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Pariaman merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:

- a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
- b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.



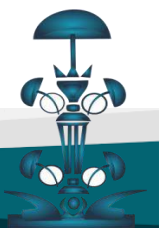
- c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- d. Melaksanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- b. Dalam rangka meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dengan memperhatikan dan mendukung capaian komponen dalam rumusan perhitungan DAU dan OAK, antara lain dengan: Meningkatkan cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan - untuk perhitungan DAU, dan Meningkatkan akurasi dan kualitas data sektor Pendidikan, Kesehatan, dll - untuk perhitungan DAK Fisik.
- c. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (untuk diperhatikan kewenangan).
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.



Tabel 3.17
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Kode Rek	Uraian	Target	Proyeksi (Rp)		
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	645.911.417.397	678.206.988.267	700.683.163.369	710.730.616.876,816
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.957.169.169	61.905.027.627	65.000.279.009	66.950.287.379
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.040.000.000	12.642.000.000	13.274.100.000	13.672.323.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.237.768.976	15.999.657.425	16.799.640.296	17.303.629.505
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155	10.485.835.663	11.010.127.446	11.340.431.269
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.692.890.038	22.777.534.540	23.916.411.267	24.633.903.605
1.2	Pendapatan Transfer	580.954.248.228	610.001.960.639	629.067.884.360	636.966.879.498
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	544.484.491.000	571.708.715.550	588.859.977.017	594.748.576.787
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah	36.469.757.228	38.293.245.089	40.207.907.344	42.218.302.711
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	6.813.450.000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	6.813.450.000,000
1.3.2	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	-	-	-
	Jumlah	645.911.417.397	678.206.988.267	700.683.163.369	710.730.616.877

Sumber : BPKPD Kota Pariaman 2023

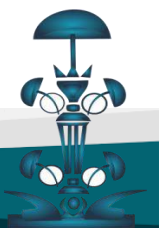


3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahun periode RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

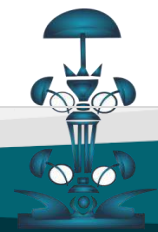
Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai Tahun 2021 struktur APBD harus mengacu kepada PP tersebut, sehingga kedua jenis belanja tersebut menjadi belanja operasional. Berikut ini dapat dilihat target belanja daerah tahun 2023 dan proyeksi belanja daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.18
Target Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan
Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Kode Rek	Uraian	Target	Proyeksi			Ket
		2023	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
2	Belanja	675.911.417.397	683.206.988.267	705.683.163.369	715.730.616.877	
2.1	Belanja Operasi	492.981.310.916	501.159.299.032	506.170.892.022	516.294.309.862	
2.1.1	Belanja Pegawai	285.654.078.057	292.795.430.008	295.723.384.309	301.637.851.995	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.248.692.859	202.254.936.323	204.277.485.687	208.363.035.400	
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	
2.1.5	Belanja Hibah	5.370.780.000	5.397.633.900	5.451.610.239	5.560.642.444	
2.1.6	Bantuan Sosial	707.760.000	711.298.800	718.411.788	732.780.024	
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	
	Jumlah Belanja Operasi	492.981.310.916	501.159.299.032	506.170.892.022	516.294.309.862	
2.2	Belanja Modal	100.449.893.682	98.162.575.373	113.813.306.345	111.093.362.712	
2.2.1	Belanja Tanah	1.620.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.370.432.283	13.437.284.444	14.067.680.052	13.843.090.435	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.240.118.934	55.369.851.751	62.116.632.724	60.298.965.378	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.716.589.465	26.850.172.412	32.118.674.136	34.430.781.078	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	502.753.000	505.266.765	510.319.433	520.525.821	
	Jumlah Belanja Modal	100.449.893.682	98.162.575.373	113.813.306.345	111.093.362.712	
2.3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	
2.4	Belanja Transfer	80.980.212.799	81.385.113.863	82.198.965.002	83.842.944.302	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.727.776.899	2.741.415.783	2.768.829.941	2.824.206.540	
2.4.2	Belanja Bantuan keuangan	78.252.435.900	78.643.698.080	79.430.135.060	81.018.737.762	
	Jumlah Belanja Transfer	80.980.212.799	81.385.113.863	82.198.965.002	83.842.944.302	
	Jumlah Belanja	675.911.417.397	683.206.988.267	705.683.163.369	715.730.616.877	

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023

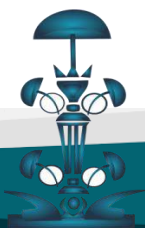


Sementara dari sisi belanja daerah terjadi peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Belanja Daerah diarahkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun. Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan (*input*), keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

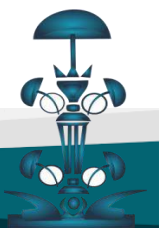
Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Kota Pariaman menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.



Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a) urusan pemerintahan bidang pendidikan, b) urusan pemerintahan bidang kesehatan, c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, d) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, 5) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 6) urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Pelaksanaan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2023, meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan serta Daya Saing SDM; (2) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City; (4) Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (5) Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing; (6) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Dukung Pariwisata; (7) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Dan Optimisasi Pengembangan Water Front City; (8) Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan; (9) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. serta pada Perubahan Tahun 2021 proritas pembangunan ditambah yaitu Percepatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan dan sosial-ekonomi. Serta Pemenuhan sasaran pembangunan serta target dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
3. Mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan tiap tahun dalam bentuk prioritas pembangunan nasional dan program unggulan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
5. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan.



6. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dan total belanja APBD diluar gaji secara konsisten dan berkesinambungan.
7. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP serta meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap dan total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

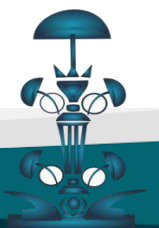
Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Sejak pada Tahun 2020, alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta *acres*. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen belanja untuk tahun 2021 mengalami perombakan yang signifikan. Dalam regulasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terdiri dari : belanja operasi, belanja modal, belanjatidak terduga dan belanja transfer. Seluruh belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan bersama-sama dengan belanja barang dan jasa berada pada belanja operasi.

3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.

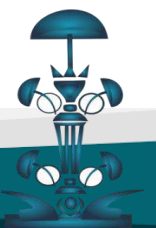


3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari.

Tabel 3.19
Target Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

NO	Uraian	Target	Proyeksi		
		2023	2024	2025	2026
I	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
-	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
-	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
-	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	0	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0			
-	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0
-	Penyertaan modal daerah	0	0	2.500.000.000	0
-	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
-	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023



3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah periode RPJMD yang tersisa. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman
Tahun 2024-2026

NO	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	678.206.988.267	700.683163.369	710.730.616.877
2	Pencairan Dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih (Rill) Perhitungan Anggaran	5.000.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
	Total Penerimaan	683.206.988.267	698.183.163.369	715.730.616.877
	Dikurangi dengan :			
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	353.771.983.673	364.297.423.347	372.426.565.106
	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	329.435.004.594	333.885.740.022	343.304.051.771

Sumber : BPKPD Kota Pariaman, 2023

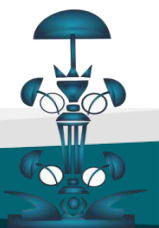
Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

1. **Prioritas I** dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanari dasar.
 - a. **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial).
 - b. **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.





2. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. **Prioritas III** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.





BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi pembahasan dalam BAB ini, yaitu menuangkan permasalahan dan isu strategis tersebut, karena pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Kota Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi Yang Belum Optimal dan Cenderung Melambat

Permasalahan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tergambar dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, antara tahun 2018 sampai 2021, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar 5,47 %. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman turun lagi menjadi 5,30 %. Hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mencapai sebesar -1,32 % akibat pandemi covid-19. Dan pertumbuhan yang minus ini hampir dialami oleh semua



daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 kemaren pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun mencapai 3,53 %. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional masih diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi LPE
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	5,20	5,10	-2,10	3,69	5,31
Sumatera Barat (Provinsi)	5,16	5,05	-1,60	3,29	4,36
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	4,91	4,76	-1,85	2,89	4,94
Pesisir Selatan	5,35	4,81	-1,11	3,37	4,02
Kab.Solok	5,22	5,07	1,12	3,32	4,31
Sijunjung	5,09	4,83	-1,10	3,15	3,95
Tanah Datar	5,07	5,01	-1,13	3,30	4,20
Padang Pariaman	5,46	2,51	-10,46	2,18	6,87
Agam	5,26	4,81	-1,38	3,70	4,21
Lima Puluh Kota	5,26	5,10	-1,16	3,33	4,04
Pasaman	5,00	4,84	-0,87	3,39	4,09
Solok Selatan	5,03	4,89	-1,24	3,35	4,02
Dharmasraya	5,31	4,98	-1,39	3,42	4,28
Pasaman Barat	5,24	4,49	-1,34	3,75	4,17
Kota :					
Padang	6,06	5,65	-1,86	3,66	4,33
Kota Solok	5,65	5,49	-1,42	3,56	4,60
Sawah Lunto	5,65	5,49	-1,27	2,49	3,98
Padang Panjang	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39
Bukittinggi	6,00	5,84	-1,74	3,61	4,68
Payakumbuh	6,02	5,89	-1,66	3,58	4,52
Pariaman	5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Disamping itu dari sisi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Pemerintah Kota Pariaman selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 52,68 juta pada 2018 menjadi Rp. 55,18 juta pada tahun 2021. Namun capaian angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini masih berada di nomor urut ke-6 jika dibandingkan dengan 19 (Sembilan belas) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini



Tabel 4.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah/Jiwa)
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	42,80	45,21	44,03	45,29	50,59
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	47,06	50,44	49,46	54,80	60,91
Pesisir Selatan	28,32	30,25	29,96	29,29	32,14
Kab.Solok	34,10	36,36	35,96	35,72	39,67
Sijunjung	36,31	38,46	37,87	40,31	44,39
Tanah Datar	35,13	37,58	37,34	36,31	40,01
Padang Pariaman	49,45	51,14	42,95	42,62	50,89
Agam	39,24	41,80	41,19	39,96	44,05
Lima Puluh Kota	38,27	40,79	40,24	41,99	46,09
Pasaman	29,87	31,66	31,32	31,12	33,79
Solok Selatan	30,97	32,57	31,81	31,26	34,08
Dharmasraya	40,14	41,78	40,41	46,52	52,12
Pasaman Barat	33,52	34,69	33,75	36,51	40,43
Kota :					
Padang	61,24	65,65	64,67	71,36	79,38
Kota Solok	53,43	57,00	56,05	57,10	63,19
Sawah Lunto	55,00	58,85	58,02	58,62	66,10
Padang Panjang	60,35	64,72	63,82	64,09	70,64
Bukittinggi	62,21	66,49	65,00	74,24	83,35
Payakumbuh	45,88	50,34	49,63	51,64	57,56
Pariaman	52,68	56,56	55,86	55,18	60,52

Sumber : BPS Kota Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4.3
Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	0,306	0,336	0,273	0,321	0,233
Pesisir Selatan	0,255	0,246	0,264	0,253	0,246
Kab.Solok	0,303	0,285	0,277	0,246	0,243
Sijunjung	0,300	0,293	0,269	0,270	0,243
Tanah Datar	0,288	0,278	0,273	0,250	0,251
Padang Pariaman	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245
Agam	0,257	0,251	0,278	0,272	0,298
Lima Puluh Kota	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208



Pasaman	0,266	0,330	0,310	0,248	0,230
Solok Selatan	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253
Dharmasraya	0,264	0,278	0,280	0,268	0,287
Pasaman Barat	0,290	0,283	0,258	0,261	0,277
Kota :					
Padang	0,344	0,312	0,312	0,343	0,354
Kota Solok	0,296	0,271	0,286	0,277	0,288
Sawah Lunto	0,310	0,289	0,300	0,295	0,314
Padang Panjang	0,290	0,322	0,394	0,306	0,296
Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317
Payakumbuh	0,302	0,276	0,325	0,316	0,311
Pariaman	0,316	0,300	0,310	0,301	0,272

Kemudian dari sisi gini ratio Pemerintah Kota Pariaman selama lima tahun terakhir mengalami capaian yang baik ini terlihat dari penurunan angka gini ratio dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2018 gini ratio Kota Pariaman berada pada angka 0,316 menjadi 0,272 pada tahun 2022. Berarti selama 5 (lima) tahun telah mengalami penurunan sebesar 0,044. Capaian angka gini ratio Kota Pariaman (tahun 2022 : 0,272) lebih baik dengan capaian angka gini ratio Provinsi Sumatera Barat (tahun 2022 : 0,300). Dan jika dibandingkan dengan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Capaian gini ratio Kota Pariaman berada nomor urut ke-1 paling bagus. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin di Kota Pariaman tidak terlalu jauh. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini



Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat Kota Pariaman masih perlu ditingkatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan: Pembangunan Ekonomi Pemerintah Kota Pariaman masih perlu ditingkatkan

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan cenderung melambat
		Produktivitas sektor pariwisata sebagai sektor unggulan masih rendah
		Sektor UMKM belum mampu sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat
2.	Investasi dari sektor swasta masih kecil	Masih terbatasnya regulasi terkait investasi.
		Minat Investor yang masih rendah
		Potensi unggulan daerah belum bisa menjadi daya tarik bagi investor
		Investasi yang belum banyak berkembang di Kota Pariaman
3.	Angka Pengangguran yang masih cukup tinggi	Ketidakeimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja
		Kurangnya pendidikan dan keterampilan pencari kerja
		Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai
		Peluang dan kesempatan kerja yang rendah
4.	Angka kemiskinan yang belum tuntas	Distribusi pendapatan yang belum merata
		Terbatasnya Lapangan Pekerjaan
		Rendahnya Tingkat Pendidikan
		Akses Sumber Daya yang Terbatas

2) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Kota Pariaman selama 2018-2022 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia. Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2018-2022, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 76,26 dan pada tahun 2019 capaian IPM meningkat menjadi 76,70. Dan



capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,90 pada tahun 2020 dan 77,07 pada tahun 2021. Serta pada tahun 2022 sebesar 77,65. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi (tahun 2022 : 73,26) dan IPM Nasional (tahun 2022 ; 72,91). Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota lain di provinsi Sumatera Barat. Capaian IPM Kota Pariaman berada pada ranking ke-2 paling bawah dari 7 Kota di provinsi Sumatera Barat. Walaupun dari 19 Kabupaten/Kota capaian IPM Kota Pariaman berada pada ranking ke-6. Hal ini menandakan Kota Pariaman masih bermasalah dalam capaian IPM tersebut. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Sumatera Barat (Provinsi)	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19
Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03	70,84
Kab.Solok	68,60	69,08	69,08	69,24	70,02
Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68,89
Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29
Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63
Agam	71,70	72,37	72,46	72,57	73,29
Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28
Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77	67,41
Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71
Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30
Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57
Kota :					
Padang	82,52	82,68	82,82	82,90	83,29
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41	79,23
Sawah Lunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73
Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97	78,78
Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,70	81,42
Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08	79,53
Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07	77,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Permasalahannya akan lebih terlihat pada komponen pembentuk IPM meliputi : 1) Angka Harapan Lama Sekolah, 2) Angka Rata-Rata Lama sekolah, 3) Umur Harapan Hdup (UHH), dan, 4)



Daya Beli Masyarakat. Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 capaian Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,52 dan menjadi 14,61 pada tahun 2022. Sementara itu capaian pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 sebesar 10,36 dan menjadi 10,78 pada Tahun 2022. Capaian angka harapan lama sekolah Kota Pariaman dan angka rata-rata lama sekolah ini memang jauh lebih baik dari capaian rata-rata angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat (tahun 2022 : 14,10). Dan capaian rata-rata angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat (tahun 2022 : 9,51). Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman masih kalah dari Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke-6 dari 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	13,95	14,01	14,02	14,09	14,10
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	12,39	12,76	12,82	12,89	12,89
Pesisir Selatan	13,30	13,31	13,32	13,33	13,35
Kab.Solok	13,02	13,03	13,04	13,05	13,30
Sijunjung	12,35	12,36	12,37	12,38	12,64
Tanah Datar	13,88	14,32	14,33	14,34	14,59
Padang Pariaman	13,57	13,62	13,67	13,68	13,93
Agam	13,85	13,86	13,87	13,88	13,88
Lima Puluh Kota	13,27	13,28	13,29	13,30	13,40
Pasaman	12,78	12,79	12,80	12,81	13,05
Solok Selatan	12,69	12,70	12,71	12,72	12,73
Dharmasraya	12,41	12,42	12,43	12,44	12,51
Pasaman Barat	13,22	13,40	13,61	13,68	13,69
Kota :					
Padang	16,50	16,51	16,52	16,53	16,54
Kota Solok	14,30	14,31	14,32	14,33	14,34
Sawah Lunto	13,15	13,16	13,17	13,18	13,42
Padang Panjang	15,04	15,05	15,06	15,07	15,07



Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Bukittinggi	14,95	14,96	14,97	14,98	14,99
Payakumbuh	14,24	14,25	14,26	14,27	14,29
Pariaman	14,52	14,53	14,54	14,55	14,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4.7
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	8,58	8,75	8,90	8,97	9,08
Sumatera Barat (Provinsi)	9,10	9,22	9,34	9,46	9,51
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6,95	7,08	7,09	7,20	7,48
Pesisir Selatan	8,14	8,25	8,26	8,27	8,43
Kab.Solok	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89
Sijunjung	7,77	8,10	8,11	8,12	8,30
Tanah Datar	8,44	8,45	8,61	8,62	8,90
Padang Pariaman	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16
Agam	8,69	8,85	8,96	8,97	8,98
Lima Puluh Kota	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08
Pasaman	7,66	7,86	8,09	8,10	8,11
Solok Selatan	8,15	8,16	8,28	8,32	8,41
Dharmasraya	8,25	8,46	8,47	8,55	8,56
Pasaman Barat	7,86	8,06	8,19	8,27	8,55
Kota :					
Padang	11,33	11,34	11,58	11,59	11,60
Kota Solok	11,01	11,02	11,03	11,04	11,35
Sawah Lunto	9,94	9,97	10,17	10,32	10,43
Padang Panjang	11,44	11,45	11,62	11,63	11,92
Bukittinggi	11,31	11,32	11,33	11,34	11,63
Payakumbuh	10,46	10,72	10,73	10,81	10,82
Pariaman	10,36	10,37	10,59	10,67	10,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu pada Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 Usia Harapan Hidup Kota Pariaman sebesar 69,87 menjadi sebesar 70,67 pada Tahun 2022. Capaian usia harapan hidup (UHH) Kota Pariaman ini memang cukup lebih baik dari capaian usia harapan hidup Provinsi



Sumatera Barat (tahun 2022 : 69,90). Namun kondisi ini capaian usia harapan hidup ini masih berada pada nomor urut ke-6 dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	69,01	69,31	69,47	69,59	69,90
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	64,49	64,68	64,73	64,73	64,93
Pesisir Selatan	70,45	70,73	70,86	70,96	71,25
Kab.Solok	67,95	68,34	68,58	68,79	69,19
Sijunjung	65,69	66,02	66,21	66,36	66,70
Tanah Datar	69,38	69,73	69,94	70,12	70,49
Padang Pariaman	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34
Agam	71,83	72,17	72,37	72,53	72,89
Lima Puluh Kota	69,47	69,70	69,79	69,84	70,08
Pasaman	66,82	67,18	67,40	67,59	67,96
Solok Selatan	67,21	67,58	67,81	68,01	68,38
Dharmasraya	70,73	71,10	71,33	71,53	71,90
Pasaman Barat	67,37	67,67	67,82	67,94	68,25
Kota :					
Padang	73,55	73,57	73,65	73,69	73,93
Kota Solok	73,14	73,45	73,61	73,73	73,93
Sawah Lunto	69,59	69,87	70,00	70,10	70,40
Padang Panjang	72,58	72,77	72,82	72,82	73,02
Bukittinggi	73,91	74,22	74,38	74,50	74,82
Payakumbuh	7,33	73,61	73,74	73,84	74,14
Pariaman	69,87	70,15	70,28	70,38	70,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk komponen yang lain dari pembentuk IPM yaitu Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan. Selama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.611,- menjadi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 12.818,-. Kondisi ini sedikit lebih baik karena berada diatas rata-rata angka pengeluaran perkapita disesuaikan provinsi Sumatera Barat (tahun 2021 : 10.733) dan berada pada urutan ke-4 diantara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.9
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rp/Org/Tahun)

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567
Pesisir Selatan	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686
Kab.Solok	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539
Sijunjung	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582
Tanah Datar	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695
Padang Pariaman	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159
Agam	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171
Lima Puluh Kota	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035
Pasaman	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619
Solok Selatan	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560
Dharmasraya	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650
Pasaman Barat	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381
Kota :					
Padang	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889
Kota Solok	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515
Sawah Lunto	9.765	10.238	10.182	10.196	10.537
Padang Panjang	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153
Bukittinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
Payakumbuh	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687
Pariaman	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Rumusan Permasalahan: Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1	Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah	Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini
		Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Pariaman
		Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Kota Pariaman



NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
		Kualitas pendidik yang masih rendah
		Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang masih belum optimal
2	Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis
		Masih cukup tingginya kasus penyakit menular
		Belum optimalnya cakupan total coverage
		Masih cukup tingginya kasus stunting di Kota Pariaman
		Kualitas lingkungan yang sehat masih rendah
3	Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah	Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi
		Produktivitas masyarakat yang masih rendah
		Tingkat pemberayaan masyarakat dari sektor ekonomi yang masih rendah

3) Permasalahan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal.

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

1. Manajemen Perubahan



Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, pemerintah Kota Pariaman saat ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

2. Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2020, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

4. Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangnnya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

5. Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan



secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- **Manajemen Perubahan** bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- **Penguatan Pengawasan** bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.



- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
- **Penguatan Kelembagaan** bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
- **Penguatan Tata Laksana** bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- **Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur** bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
- **Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman** bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.

Tabel 4.11
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

No.	Urain	Tahun					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai Sakip	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	62,58 (B)	
2.	Indeks RB	49,25 (C)	51,62 (CC)	53,42 (CC)	58,19 (CC)	61,08 (B)	

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.12
Rumusan permasalahan: penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal

NO	Pokok Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan
		Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
		Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN
3	Belum optimalnya tata kelola yang kapabel	Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal
		Penataan kelembagaan yang masih belum efektif
		Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan
		Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik

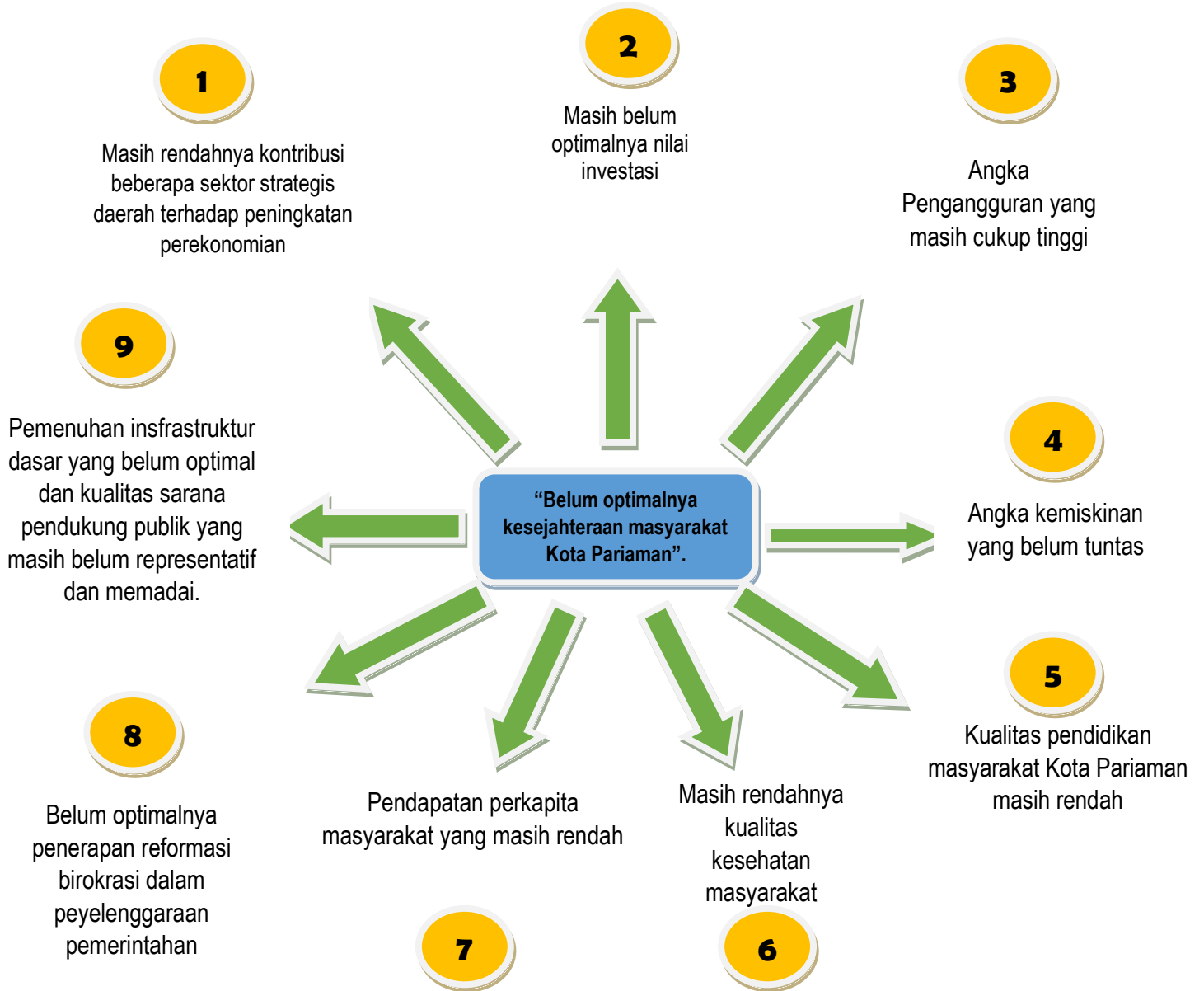
Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:



1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.
2. Masih belum optimalnya nilai investasi
3. Angka Pengangguran yang masih cukup tinggi.
4. Angka kemiskinan yang belum tuntas.
5. Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.
6. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
7. Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah.
8. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan
9. Pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan kualitas sarana pendukung publik yang masih belum representatif dan memadai.



Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah
Kota Pariaman



Permasalahan pembangunan daerah Kota Pariaman diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Pariaman berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Pariaman:

1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kota Pariaman adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Pariaman menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Sektor perdagangan dan jasa yang diharapkan sebagai sektor penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB dalam 5 tahun ini belum tercapai. Bahkan sampai tahun 2021 Sektor pertanian masih yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB yaitu 18,37 % diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 15,54 % . Sektor perdagangan berada pada urutan nomor 3 dengan nilai 15,11 % . Namun demikian, sebagai sebuah kota yang menuju perdagangan dan jasa, Sektor perdagangan ini masih perlu diakselerasi lagi pertumbuhannya karena akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang berhubungan masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.13
Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kurang berkontribusinya sektor sektor lainnya dalam perekonomian daerah	<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pertanian</i>
		<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor perdagangan</i>
		<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pariwisata</i>
		<i>Pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang masih rendah</i>
		<i>Produksi olahan dari sektor pertanian masih rendah</i>
		<i>Tingkat produktifitas koperasi dan Usaha mikro belum maksimal</i>

2. Masih belum optimalnya nilai investasi

Dalam konteks kelembagaan peran kepala daerah sangat besar dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya. Kewenangan kepala daerah dalam menempatkan aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. Untuk menarik investasi masuk Pemerintahan daerah dituntut untuk berinovasi dan membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, namun juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga perlu didukung oleh aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing agar pelaksanaan investasi di daerah dapat berjalan lancar. Adanya lembaga perizinan terpadu dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga sangat penting dalam rangka untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk



pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah.

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap daerah termasuk pemerintah Kota Pariaman harus mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi masyarakat Kota Pariaman.

Tabel 4.14
Rumusan Permasalahan: Masih belum optimalnya nilai investasi

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya nilai investasi	<i>Belum tersedianya peta potensi investasi</i>
		<i>Belum tersedianya dokumen informasi dan dokumen perencanaanaa pendukung investasi (Masterplan, FS, DED, BUSINESS PLAN)</i>
		<i>Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi</i>
		<i>Iklim Investasi yang belum kondusif</i>

3. Angka Pengangguran yang masih cukup tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,61 %. Pada Tahun 2017 s.d Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,97 % dan 5,72 % serta 5,42 %. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 5,73 %. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Pariaman. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Peningkatan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu



peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

4. Angka kemiskinan yang belum tuntas

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 4,10 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2020 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas dan Misi V yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Menurunnya Angka Pengangguran. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

5. Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.

Pendekatan baru dalam pembangunan manusia menuju masyarakat Kota Pariaman yang berbudaya dan religius, harus menekankan pada hubungan antara kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan melalui dua hal:

Pertama, pembangunan dari kebudayaan itu sendiri (warisan/tabuik, kreatifitas, industri-industri budaya, barang-barang kerajinan, wisata budaya);

Kedua, kepastian bahwa kebudayaan bertumpu secara benar di seluruh kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, komunikasi, lingkungan, kepaduan sosial serta kerja sama internasional.

Dunia tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kreatifitas, pengetahuan, keanekaragaman, dan keindahan adalah dasar yang tak terhindarkan bagi



dialog untuk perdamaian, dan kemajuan dari nilai-nilai tersebut pada hakekatnya terhubung dengan pembangunan manusia dan kebebasan-kebebasannya. Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

Pertama, oralitas remaja; krisis moralitas para remaja ditandai dengan hilangnya karakter religius, budaya dan karakter kebangsaan. Hal ini dipicu oleh pengaruh budaya asing yang begitu mudahnya diadopsi oleh remaja, misalnya westernisasi dalam berpakaian, gaya hidup hedonisme dan perilaku anti sosial lainnya. Pendidikan keagamaan belum terealisasi sebagai bekal remaja dalam kehidupannya.

Kedua, kualitas lingkungan sosial; persoalan sosial budaya yang dihadapi oleh Kota Pariaman disinyalir bersumber dari masalah dalam keluarga dan lingkungan sosial. Munculnya berbagai masalah sosial seperti narkoba, LGBT, seks pranikah, perceraian, KDRT dan adanya tempat yang memicu terjadinya penyimpangan perilaku terutama oleh generasi muda. Selain itu dahsyatnya pengaruh budaya asing melalui media sosial dan mudahnya masyarakat terpancing berita hoaks.

Ketiga, kualitas pendidikan di Kota Pariaman, terlihat dari belum optimalnya pencapaian prestasi siswa dan di dunia pendidikan SD dan SLTP atau belum bisanya siswa dan guru di Kota Pariaman dalam kompetisi seperti OSN, OGN dan F2SN baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu kurang terealisasinya pendidikan berbasis agama dan budaya lokal.

Keempat, belum optimalnya 'mengkomersialisasikan' nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pariaman menjadi penyokong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pariaman, baik secara local, nasional, maupun internasional.

SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan Kota yang kuat dan makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Pariaman, antara lain:



1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh di Kota Pariaman, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.
2. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian (character building).
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah Kota memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja.
4. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.
5. Mengoptimalkan potensi budaya menjadi daya jual dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman.

Tabel 4.15
Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	<i>Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini</i>
		<i>Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Pariaman</i>
		<i>Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter</i>
		<i>Rendahnya kualitas sarana fisik</i>
		<i>Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan</i>
		<i>Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan</i>



6. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan suatu negara atau daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai modal untuk pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pembangunan nasional di Indonesia khususnya di Kota Pariaman. Salah satu pembangunan daerah yang terhambat yaitu pembangunan kesehatan yang juga dimuat dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target dalam pembangunan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 4.16
Rumusan Permasalahan: Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<i>Kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah</i>
		<i>Budaya hidup sehat yang belum optimal</i>
		<i>Rendah pola perilaku hidup sehat</i>
		<i>Sarana dan Prasarana kesehatan yang belum memadai</i>

7. Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah

Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam laporan "World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022", Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari US\$4.050 di tahun 2019 menjadi US\$3.870 di tahun 2020.

Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia di tahun 2020 serta pemerintah Kota Pariaman juga merasakan dampaknya. Dengan demikian, maka penurunan pendapatan per kapita tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian melalui respon kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel, Pemerintah mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam.



Sebelum pandemi, Indonesia tengah berada dalam tren yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh minus 2,1 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif moderat pada tahun lalu didukung oleh kerja keras APBN dan kebijakan fiskal yang akomodatif.

Pandemi masih memberikan ketidakpastian yang tinggi terhadap ekonomi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah akan fokus melakukan berbagai langkah yang responsif agar pandemi dapat semakin terkendali dan langkah pemulihan ekonomi dapat terus berjalan. Percepatan vaksin, penguatan 3T, disiplin protokol kesehatan hingga pemberian perlindungan sosial akan terus dilakukan hingga kasus terkendali.

Tabel 4.17
Rumusan Permasalahan: Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah	<i>Tingkat kemiskinan masyarakat Kota Pariaman yang masih cukup tinggi</i>
		<i>Tingkat pengangguran masyarakat Kota Pariaman yang masih tinggi</i>
		<i>Produktivitas masyarakat masih rendah</i>
		<i>Daya saing SDM masyarakat Kota Pariaman yang lemah</i>

8. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.



Demikian pula, secara khusus dari sisi internal di pemerintah Kota Pariaman birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Maka dari itu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.



Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang kapabel; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dari sisi pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era-reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan public tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti.

Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, lamban, tidak merespon kepentingan pelanggan, dan lain-lain adalah sederetan atribut negative yang ditimpakan kepada birokrasi.



Pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi dan distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari keengganan masyarakat berhubungan dengan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain adanya kesan keinginan sejauh mungkin untuk menghindari dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintah apabila menghadapi urusan.

Hal yang membuat birokrasi lemah kinerja adalah mekanismenya yang sangat hirarkis. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan/urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan persetujuan dari atasan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat kurang berkembang.

Peran-peran dominan dan bersifat monopoli oleh pemerintah di bidang pelayanan publik, ternyata belum banyak mengalami perubahan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan yang optimal dalam melakukan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan masih dirasakan tidak fleksibel dan kurang responsif dari organisasi pemerintah dalam menawarkan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal tersebut terkait dengan belum banyaknya kelembagaan pemerintah yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika masyarakat informasi yang terus berkembang. Artinya, perspektif tata aturan suatu pemerintah yang kaku harus mulai dipikirkan dan dipertimbangkan perubahan kearah organisasi yang tidak terkotak-kotak.

Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Akan tetapi, menguatnya iklim demokratisasi di Indonesia saat ini berimplikasi pada semakin menguatnya tuntutan untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dari birokrasi. Keadaan ini banyak dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap hak-hak sebagai konsumen yang telah melakukan kewajibannya seperti dalam hal membayar pajak. Kesadaran terhadap hak diartikulasikan dalam bentuk tuntutan perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diharapkan terdapat pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan lebih baik atau faster, cheaper and better.

Oleh karena itu, orientasi pelayanan birokrasi harus berubah. Dari orientasi pelayanan kepada penguasa, menjadi orientasi pelayanan kepada publik. Aktivitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan yang sesungguhnya adalah pelanggan eksternal dalam hal ini masyarakat luas.



Kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik akan dapat dilakukan apabila pemerintah mampu untuk menilai secara saksama, apakah sebenarnya kebutuhan para pelanggannya.

Pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain. Berdasarkan hasil dari Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 70,3 % responden masih nyaman untuk mengurus secara langsung dibandingkan dengan mekanisme daring atau memakai jasa perantara.

Kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dijadikan upaya bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan beralih ke sistem *online* yang selama ini telah berjalan. Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi edukasi/pemahaman serta sosialisasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik untuk memanfaatkan sistem *online* dalam setiap layanan publik yang akan diakses sehingga pelayanan publik di tengah tatanan kehidupan baru "*new normal*" tidak terganggu dan menjadi lebih efektif dan efisien.

Tabel 4.18
Rumusan Permasalahan: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan kapabel serta pelayanan publik	<i>Penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh pada instansi pemerintah daerah Kota Pariaman</i>
		<i>Sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan</i>
		<i>Belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, sistem pengendalian dan evaluasi</i>
		<i>Masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas</i>



NO	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa</p>
		<p>belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah</p>
		<p>Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip structure follow function.</p>
		<p>penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.</p>
		<p>Struktur organisasi pemerintah Kota Pariaman yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada</p>
		<p>Masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai</p>
		<p>belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS</p>
		<p>sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem reward and punishment yang adil</p>
		<p>Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja</p>
		<p>Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan</p>
		<p>Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>



9. Pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan kualitas sarana pendukung publik yang masih belum representatif dan memadai

Pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara itu, Pemerintah Kota Pariaman masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, diantaranya belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih. Sampai saat sekarang, tingkat layanan air bersih perpipaan sudah hampir 70 %, namun kualitas layanan belum optimal selama 24 jam terutama pada jam-jam sibuk (*peak season*) masih ada kawasan yang tidak mendapatkan layanan air bersih. Kemudian permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan seperti drainase dan trotoar yang layak.

Dari sisi pengelolaan lingkungan hidup terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkat dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Di samping itu, armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Pariaman.

Prasarana jalan yang ada di Kota Pariaman secara umum sudah baik, pada tahun 2022 ini panjang jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai 74,80 % dan kondisi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dari kondisi tahun 2022 tersebut, masih ada jalan yang belum berkondisi mantap sekitar 13,20 % lagi. Ini tentunya menjadi permasalahan juga di Kota Pariaman, karena jalan yang belum mantap akan berakibat pada gangguan lalu lintas, apalagi dengan meningkatnya volume kendaraan dan pemakai jalan lainnya menuntut adanya ketersediaan prasarana dan sarana jalan yang memadai.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di Kota Pariaman, dan akan diidentifikasi di bagian ini berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Kota Pariaman secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk itu, permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;



2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan Pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Urusan pemerintahan umum.

4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kota Pariaman tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain :

- a. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah.
- b. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. Kesadaran dan kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan rendah.
- d. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi.
- e. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pariaman yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain :

- a. Masih tingginya angka kematian bayi.



- b. Masih adanya balita gizi buruk.
- c. Semakin meningkatnya penyakit tidak menular.
- d. Jumlah SDM kurang dan kualitas SDM belum memenuhi standard.
- e. Integrasi aktivitas pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan belum optimal.
- f. Angka stunting Kota Pariaman yang masih cukup tinggi dengan nilai 18,4 % (**SSGI Tahun 2022**)

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.
- b. Belum optimalnya Kualitas infrastruktur jalan.
- c. Belum optimalnya Layanan infrastruktur sumber daya air.
- d. Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi.
- e. Belum optimalnya kesesuaian tata ruang.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Belum menyeluruhnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat di Kota Pariaman.
- b. Penyediaan air bersih dan air minum belum optimal.
- c. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:



- a. Jumlah Satuan Linmas telah mencapai jumlah ideal sesuai kebutuhan, dan memenuhi target pencapaian SPM. Yang dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas Satuan Linmas agar dapat berperan optimal dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran.
- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menegakan Perda.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Sosial di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

- a. Masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Penanganan PPKS yang belum Optimal.
- c. Masih lemahnya penanganan Kemiskinan akibat Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron sehingga menimbulkan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan kepada masyarakat miskin.
- d. Belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kota Pariaman telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.
- c. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor.
- d. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.



2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- b. Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
- c. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial
- d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- e. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini yaitu :

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan.
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan.
- c. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lahan untuk investasi. Terkait hal tersebut permasalahan pertanian yang muncul diantaranya:

- a. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- b. Rendahnya pemanfaatan tanah.
- c. Masih terjadinya intensitas konflik dan sengketa pertanian.



5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, dimana tahun 2022 pengelolaan sampah baru 50 % dari target 80 %, menyebabkan penumpukan sampah meningkat mengakibatkan daya tampung sampah di TPA Tungkal Selatan lahan yang melebihi kapasitas karena luasnya baru 1,3 Ha, seharusnya untuk perkotaan kecil minimal 5 Ha.
- b. Indek kualitas Tutupan lahan pada kondisi waspada pada tahun 2022 dengan angka 24,06 dari target 26. Pencemaran Air Sungai Kota Pariaman yang meningkat dapat dilihat dari Indek kualitas Air tahun 2022 dengan capaian 35,83 dari target 43.

Kondisi :

Kota Pariaman dilalui oleh 4 sungai yaitu Batang Manggung, Batang Pariaman, Batang Jirak dan Batang Mangau Hulu dari 4 buah sungai tersebut berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Muaranya di Laut/ Pantai Kota Pariaman Setiap tahunnya dilakukan pemantauan kualitas air sungai dan air laut di Kota Pariaman.

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa untuk parameter e-coli air sungai dan air laut di Kota Pariaman tercemar berat, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian yang jauh di atas baku mutu yang ditetapkan.

Permasalahan :

Tingginya angka e-coli pada air sungai dan air laut Kota Pariaman diindikasikan oleh buangan domestik, dan buangan domestik tersebut tidak hanya berasal dari Kota Pariaman saja namun buangan domestik dari Kab.Padang Pariaman juga memberikan kontribusi karena sungai yang ada di Kota Pariaman pada bagian hulunya berada di Kab Padang Pariaman.

- c. Permasalahan mengenai Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu :
 - 1) Kurangnya kesadaran dari penghasil limbah tentang pengelolaan limbah B3 (Proses Pengolahan B3 disamakan dengan Limbah Domestik)
 - 2) Masih ditemukan adanya pembuangan limbah B3 Medis ke TPA.
 - 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum mempunyai izin TPS dan TPS Limbah B3.
 - 4) Tidak ada badan usaha yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3 yang mempunyai izin (izin incenerator dari Kementerian Lingkungan Hidup).



5) Tidak ada Transporter yang memenuhi syarat sesuai aturan terkait pengelolaan Limbah B3.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.
- c. Belum tertatanya pengarsipan dengan layak dan secara digital.
- d. Belum optimalnya OPD yang memanfaatkan database kependudukan.
- e. Adanya asumsi minoritas masyarakat bahwa pembuatan dokumen kependudukan lama dan berbelit.
- f. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkannya sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa dalam rangka peningkatan asli desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk



yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.
- b. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
- d. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
- e. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kota Pariaman. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi.
- b. Belum ditetapkannya angkutan perbatasan, sehingga angkutan pedesaan masih banyak beroperasi di dalam wilayah kota Pariaman.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar institusi lalu lintas angkutan jalan.
- d. Penataan Parkir. Penataan parkir sebagai bagian pelayanan lalu lintas dan pendapatan daerah mengalami beberapa kendala. Antara lain : lokasi parkir liar yang mengambil tempat di jalan umum, retribusi parkir yang dilakukan oleh tenaga kontrak masih belum dilaksanakan secara optimal.
- e. Terjadinya alih fungsi terminal Muaro dari Terminal Tipe C menjadi area parkir wisata, yang mengakibatkan tidak adanya simpul transportasi angkutan kota di Pariaman.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan di Wilayah Kota Pariaman.
- g. Belum berkembangnya transportasi laut yang representatif.
- h. Tingkat kecelakaan cukup tinggi akibat dari tidak disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, minimnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan, *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.



10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi di Wilayah Kota Pariaman.
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Pariaman yang belum memadai.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet sehat.
- d. Belum Optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung pariwisata dan pengembangan UMKM.
- e. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi antar OPD di Kota Pariaman.
- f. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik untuk masyarakat.
- g. Belum optimalnya Layanan Aduan.

11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.**

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro.
- b. Dalam pembinaan IKM, ada sebagian pengrajin tidak mau merubah kebiasaan yang selama ini dilakukan sehingga sulit menerima inovasi.
- c. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal koperasi.
- d. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi, dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu :



- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengurus perizinan usaha maupun memperpanjang izin usahanya.
- b. Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di kota pariaman karena sulitnya mencari lokasi/lahan yang tepat.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengurus perizinan usaha dan PBG.
- d. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
- e. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor.
- f. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah.

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pariaman masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- a. Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda.
- b. belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan
- c. Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan.
- d. Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
- e. Belum optimalnya penggunaan Gor Rawang sebagai Youth Center disebabkan bangunan penunjang atau fasilitas pendukung belum lengkap.

14. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.**

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain :

- a. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral.



- b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data olahan spasial
- d. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD.
- e. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan walikota tentang pengelolaan data dan rencana Induk statistik sektoral statistik sektoral.

15. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah :

- a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
- c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

16. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya Kota Pariaman merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain :

- a. Belum tersedianya dokumen sejarah destinasi wisata di Kota Pariaman.
- b. Belum adanya penetapan Cagar Budaya di Kota Pariaman.
- c. Belum optimalnya implementasi ABS-SBK pada generasi muda.
- d. Belum tersedianya data base tradisi dan kesenian di Kota Pariaman.
- e. Belum optimalnya penguatan pelestarian tradisi dan budaya di Kota Pariaman.
- f. Belum adanya standar management pembinaan sanggar.



17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kota Pariaman, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah :

- a. Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) masih rendah.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung perpustakaan.
- c. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.
- d. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.
- e. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan.
- f. Masih rendah nya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kota Pariaman, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
- b. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.
- c. Belum tertatanya Arsip-arsip yang berada di OPD sesuai kaidah kearsipan.
- d. Belum terlaksananya sistem kearsipan yang disetiap OPD.
- e. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan.
- f. Rendahnya kualitas layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Belum optimalnya pembinaan kearsipan di OPD Desa dan Kelurahan.

4.1.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan

1 Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutunya terjamin dan nilai tambah



produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya.
- b. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap.
- c. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- d. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.
- e. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
- f. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.

2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan bagi pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) periode dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini ditandai dengan Visi Kota Pariaman adalah "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**". Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam urusan pariwisata yang teridentifikasi selama ini adalah:

- a. Belum optimalnya kerjasama dengan stake holder Lembaga Pariwisata (ASITA, ASATI, HPI, PHRI, GENPI).
- b. Masih rendahnya minat wisatawan untuk menginap di Kota Pariaman. Ini terlihat angka rata-rata lama tinggal Kota Pariaman masih di angka 0,5 hari.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi Pariwisata Pariaman.
- d. Belum adanya Road Map pengembangan Investasi Pariwisata.
- e. Sistem pengelolaan terpadu di lokasi wisata (destinasi) belum optimal.
- f. Masih rendahnya "SADAR WISATA" pelaku usaha.
- g. Kurangnya "SADAR WISATA" masyarakat di sekitar obyek wisata.

3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:



- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian yang belum memadai.
- c. Sarana pertanian yang belum memadai.
- d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada.
- e. Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
- f. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
- g. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas.

4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Kurangnya daya saing produk usaha mikro
- b. Masih lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro
- c. Masih kurangnya pengembangan permodalan usaha mikro.
- d. Masih lemahnya pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro.
- e. Masih rendahnya pelaku usaha dalam memanfaatkan *e-commerce* dalam memasarkan produk.
- f. Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.

5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dan memang kondisi existing sektor



perindustrian belum begitu baik perkembangannya, sehingga masih banyak permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Masih rendahnya nilai tambah sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum diimbangi oleh peningkatan kualitas produksi sehingga daya saing pasar masih rendah.
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia pada IKM belum memadai sehingga produk yang dihasilkan masih belum memenuhi standar.
- d. Masih terbatasnya promosi hasil produk baik oleh perorangan maupun pendanaan maupun pendanaan dari pemerintah.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM.
- f. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri.
- g. Rendahnya kemampuan industri mikro dalam mengakses teknologi modern dan inovasi produk.

4.1.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

Adapun permasalahan pada unsur Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan.
- b. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti penting bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja bagi masing-masing OPD.
- c. Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian pada Perangkat Daerah terkait.

2. Unsur Sekretariat DPRD

Adapun permasalahan pada unsur Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



4.1.2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Bappeda Kota Pariaman selaku OPD yang mengkoordinir urusan perencanaan namun dalam hal pada setiap tahapan evaluasi perencanaan pembangunan daerah masih adanya tantangan dan permasalahan dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, diantaranya :

- a. Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.
- f. Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja.
- g. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah.

2. Unsur Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
- b. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah.



- c. Belum terwujudnya kehormanan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- e. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.
- g. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah.
- h. Belum adanya database potensi pendapatan daerah.
- i. Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB.
- j. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi.

3. Unsur Kepegawaian

Dengan telah diterapkannya sistem merit sebagai pendukung Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara. Terdapat beberapa permasalahan yang dirujuk dari aspek sistem merit sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya budaya kerja aparatur.
- b. Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
- c. Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis Merit System.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Kota Pariaman harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang professional dan handal, hal itu disebabkan :

- a. Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman.



5. Unsur Unsur penelitian dan pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a. Masih terbatasnya penyelenggaraan penelitian dan pengkajian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
- c. Belum optimalnya perekayasaan dan inovasi teknologi untuk mendukung Daya Saing Produk.
- d. Belum optimalnya uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan.

4.1.2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu ditingkatkan serta bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penerapan SPIP ;
- b. Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi antara APIP dan APH untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal ;
- c. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah
- d. Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel.

4.1.2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan (Kecamatan)

Adapun beberapa permasalahan pada unsur kewilayahan urusan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- a. Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang;



- c. Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal;

4.1.2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan bangsa dan politik)

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Pariaman pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi pada urusan pemerintahan umum (Kesatuan bangsa dan politik) adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideology Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- c. Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat;
- d. Belum optimalnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam dunia politik;
- e. Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu-isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

4.2.1. Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. *Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)*

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan



indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Berikut penjelasan setiap tujuan dalam SDGs beserta logonya :







 <p>1 TANPA KEMISKINAN</p>	<p>Tujuan 1</p> <p>Tanpa kemiskinan (<i>No Poverty</i>). Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.</p>
 <p>2 TANPA KELAPARAN</p>	<p>Tujuan 2</p> <p>Tanpa kelaparan (<i>Zero Hunger</i>). Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi.</p>
 <p>3 KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN</p>	<p>Tujuan 3</p> <p>Kehidupan sehat dan sejahtera (<i>Good Health and Well-Being</i>). Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia</p>
 <p>4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</p>	<p>Tujuan 4</p> <p>Pendidikan berkualitas (<i>Quality Education</i>). Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa di akses oleh semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat</p>
 <p>5 KESETARAAN GENDER</p>	<p>Tujuan 5</p> <p>Kesetaraan gender (<i>Gender Equality</i>). Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan.</p>
 <p>6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI</p>	<p>Tujuan 6</p> <p>Air bersih dan sanitasi layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>). Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih di dunia ini dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia akibat banyak nyawa melayang setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.</p>



	<p style="text-align: center;">Tujuan 7</p> <p>Energi bersih dan terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>). Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 8</p> <p>Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>Decent Work and Economy Growth</i>). Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 9</p> <p>Industri, inovasi dan infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>). Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 10</p> <p>Berkurangnya kesenjangan (<i>Reduce Inequality</i>). Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 11</p> <p>Kota dan komunitas berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>). Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 12</p> <p>Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>). Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan 13</p> <p>Penanganan perubahan iklim (<i>Climate Action</i>). Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama.</p>



 <p>14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT</p>	<p>Tujuan 14</p> <p>Ekosistem laut (<i>Life Below Water</i>). Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal.</p>
 <p>15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT</p>	<p>Tujuan 15</p> <p>Ekosistem darat (<i>Life On Land</i>). Selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama.</p>
 <p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</p>	<p>Tujuan 16</p> <p>Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institution</i>). Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.</p>
 <p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p>	<p>Tujuan 17</p> <p>Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnership for The Goals</i>). Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.</p>



Gambar 4.3
TPB berdasarkan 4 Pilar



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selanjutnya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kota Pariaman, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG's. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Pariaman yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG's.



Tabel 4.19
Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	14	9	1	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	3	1	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	29	4	1	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	5	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	4	1	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	7	1	2
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	0	2
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	8	4	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	2	2	2
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	4	1	1	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	8	4	0	8
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	0	2	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	5	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	8	5	2	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2022

Evaluasi Menurut Pilar

Menurut pilar, capaian TPB Kota Pariaman dapat dijelaskan bahwa Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (67 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (22 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi adalah pilar sosial (25 indikator) sedangkan kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (9 indikator). Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.20
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	97	67	25	4	1
2	Ekonomi	55	26	16	9	4
3	Lingkungan	49	20	12	4	13
4	Hukum dan Tata Kelola	21	13	5	3	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Evaluasi Menurut Kategori Urusan

Kategori urusan wajib pelayanan dasar mempunyai capaian indikator SS sebanyak 79 indikator, diikuti dengan urusan wajib non pelayanan dasar dengan capaian kategori SS 41 indikator. Kedua jenis urusan ini juga mempunyai capaian indikator SB terbanyak yaitu masing-masing 29 indikator dan 19 indikator. Capaian pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut kategori urusan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori Urusan

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Wajib Pelayanan Dasar	119	79	29	4	7
2	Wajib Non Pelayanan Dasar	79	41	19	10	9
3	Pilihan	12	1	5	4	2
4	Penunjang	11	5	5	1	0
5	Absolut	1	0	0	1	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Evaluasi Menurut SPM

Diantara 119 indikator TPB yang termasuk jenis urusan wajib pelayanan dasar terdapat 63 indikator dengan kategori SPM. Dari 63 indikator SPM tersebut, 40 indikator sudah mempunyai



kategori capaian SS (63%) dan 22 indikator dengan kategori SB (35%). SPM Kesehatan mempunyai jumlah indikator SS tertinggi yaitu 20 indikator, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.22
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Kategori SPM

No	Nama SPM	Jumlah Indikator	Persentase
1	Kesehatan	26	41 %
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	19 %
3	Pekerjaan Umum	7	11 %
4	Pendidikan	13	21 %
5	Perumahan Rakyat	1	2 %
6	Sosial	4	6 %
Persentase		63	100 %

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Evaluasi Menurut OPD Penanggung Jawab

Sebaran indikator TPB berdasarkan OPD penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 4.25. Indikator TPB dengan kategori capaian SS terbanyak adalah Dinas kesehatan yaitu 33 indikator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) masing-masing 12 dan 10 indikator dengan kategori SS

Tabel 4.23
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut OPD

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Bagian administrasi pembangunan	1	0	1	0	0
2	Bagian hukum	2	2	0	0	0
3	Bagian organisasi	3	1	1	1	0
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	2	0	2		0
5	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	7	4	2	1	0
6	Badan keuangan daerah	5	4	1	0	0
7	Badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia	1	0	1	0	0
8	Badan penanggulangan bencana daerah	14	12	1	0	1
9	Badan pusat statistik	5	3	2	0	0
10	Dinas kesehatan	40	33	6	1	0
11	Dinas Pertanian Pangan dan	4	3	1	0	0



NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
	Perikanan					
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	7	1	1	0
13	Dinas Koperindag	5	0	1	4	0
14	Dinas Pariwisata dan Budaya	4	1	2	1	0
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	17	9	7	0	1
16	Dinas Perhubungan	6	2	1	0	3
17	Dinas Perkim LH	20	6	2	4	8
18	Dinas P3AKB	12	10	1	1	0
19	Dinas PUPR dan Pertanahan	22	7	10	0	5
20	Dinas Sosial	16	7	9	0	0
21	Disdukcapil	5	5	0	0	0
22	DPMPTSP dan Naker	14	5	5	4	0
23	Inspektorat	1	0	0	1	0
Jumlah		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

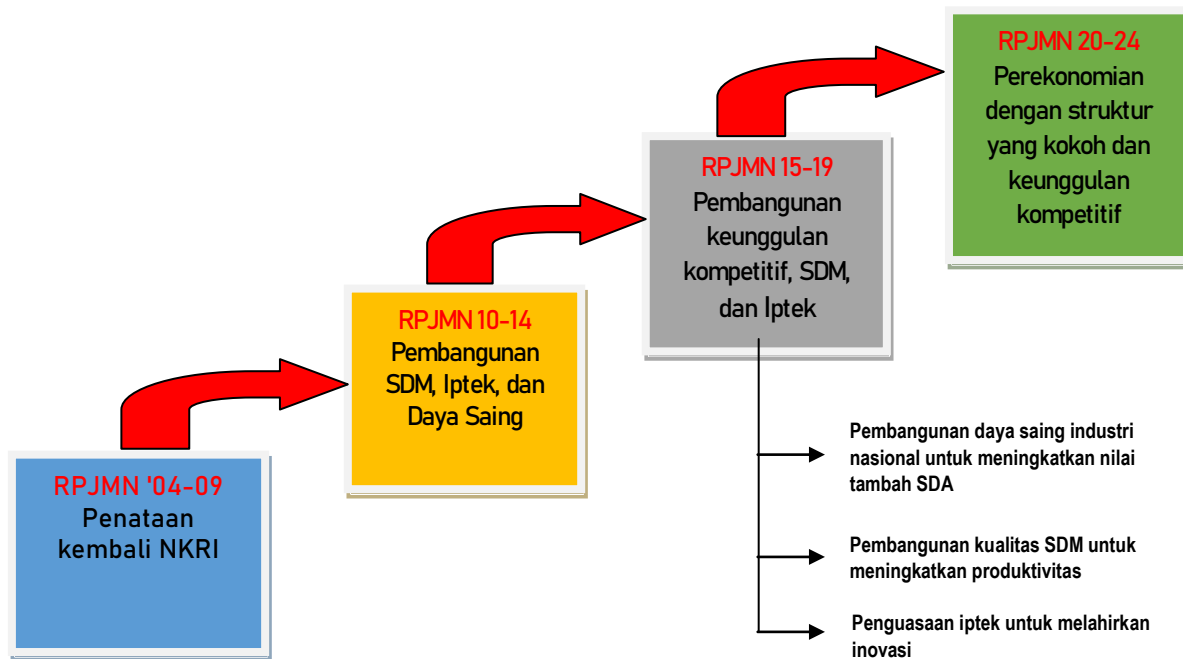
Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

B. RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Pariaman mengikuti periode RPJMN III dan IV, maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Pariaman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024).



Gambar 4.4
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan



hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikedukung terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

1. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;



2. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
3. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
4. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

C. RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 4.5
Nawacita kedua RPJMN 2020-2024



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 4.6
5 Arahan Utama Presiden



Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

D. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai



gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional,



nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah **Pertumbuhan Ekonomi**, **Keberlanjutan Sosial** dan **Keberlanjutan Lingkungan**. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :



1. Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan informasi visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

1. Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Sebagai Kawasan sepadan pantai.



3. Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Dan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
4. Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
5. Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi : 1) Kawasan yang dikembangkan, 2) Kawasan Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo.

Tabel 4.24
Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

NO	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat RPJMD Tahun 2021-2026	NO	Program Unggulan Kota Pariaman RPJMD Tahun 2018-2023
1	Sumbar Sehat dan Cerdas	1	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
		2	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
		3	Kartu Pariaman Pintar
		4	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
		5	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
		6	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
2	Sumbar Religius dan Berbudaya	1	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
		2	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)
		3	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
		4	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
3	Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan	1	Program Pariaman Sejahtera
		2	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		3	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

E. Isu Regional Provinsi Sumatera Barat

- a. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dan Kabupaten Pasaman Barat.



- b. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) — Pariaman sebagai jalan alternatif dan Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.

F. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis yaitu terdiri atas:

1. SPM Bidang Pendidikan
2. SPM Bidang Kesehatan
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat
6. SPM Bidang Sosial

PP Nomor 2 Tahun 2018 ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur lebih rinci dalam penerapan SPM oleh Pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini keenam jenis SPM dirinci lagi kepada bentuk-bentuk pelayanan yang diprioritaskan sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan

Mutu dan pelayanan dasar terkait dengan bidang pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini.

Untuk pendidikan anak usia dini ini pelayanan diberikan pada warga Negara usia 5 - 6 Tahun

- b. Pendidikan dasar.



Untuk warga Negara usia 7 - 15 Tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan Kesetaraan

c. Pendidikan kesetaraan.

Untuk warga Negara usia 7 – 18 tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Isu strategis untuk pencapaian SPM di Bidang Pendidikan :

1. Implementasi penerapan SPM bidang pendidikan di Kota Pariaman masih rendah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait termasuk warga sekolah, komite dan pihak swasta serta pembenahan kurikulum yang diberikan di tingkat satuan pendidikan.

1. SPM Bidang Kesehatan

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan adalah:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; untuk ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; untuk ibu melahirkan
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; untuk bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita; untuk balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; untuk usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; untuk usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; untuk usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; untuk penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; untuk penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; untuk orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; untuk orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); untuk orang beresiko HIV



Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum terkait pada :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; untuk seluruh warga negara
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat; untuk seluruh warga negara

Mutu pelayanan dasar pada SPM PUPR meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

3. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; untuk Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana
- b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah; untuk Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

4. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima layanan dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :



- a. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
- c. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran
Mutu pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

5. SPM Bidang Sosial

Jenis pelayanan minimum bidang sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Penerima layanan dasar SPM Sosial adalah Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut usia telantar, Gelandangan dan pengemis, Korban bencana di tingkat provinsi, Korban bencana di tingkat kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM Sosial meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri ini juga diatur tahapan Penerapan SPM dengan empat tahapan yaitu :

- 1) Tahap pengumpulan data;
- 2) Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Tahap penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 4) Tahap pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



G. RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

Kota Pardagangan merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.

Kota Jasa Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.

Wilayah Pesisir Barat Sumatera merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

Masyarakat Madani merupakan Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:



1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, maka pada RPJM ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.

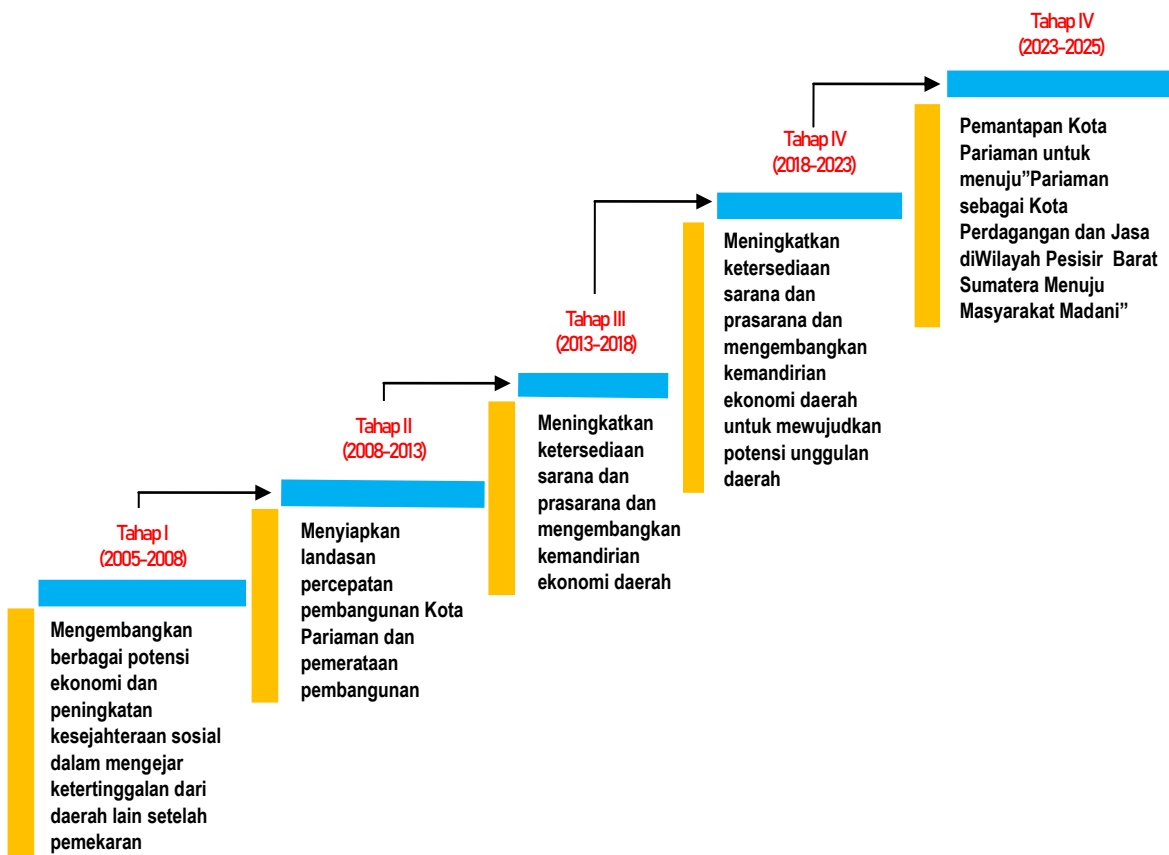
Berbagai tujuan dan target pencapaian SDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan Kota Pariaman untuk jangka panjang yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target :
 - a. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari.
 - b. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
 - c. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target :
 - a. Menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target :
 - a. Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.
4. Menurunkan angka kematian anak dengan target : menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal.
5. Meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua.
6. Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target:



- a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
- b. Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.
- c. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh

Gambar 4.7
Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025



H. RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan



masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang sendiri dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan *input*, *proses* dan *output*. *Input* yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan *input* ini diproses dengan menganalisis *input* tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan *output* berupa rencana tata ruang yang menyeluruh.

RTRW Nasional merupakan perencanaan makro strategis Nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Sedangkan RTRW Propinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah Propinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan propinsi, terminal maupun pelabuhan regional. Sementara itu RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan utama kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal atau regional seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang ada.

Gambaran kondisi tersebut sering kita jumpai di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman yang resmi terbentuk pada tahun 2002 mengalami perkembangan pembangunan yang sangat cepat yang jika tidak diiringi dengan pengaturan pemanfaatan ruang akan mengakibatkan pembangunan tumbuh secara sporadis pada beberapa kawasan tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman merupakan dasar/arahannya bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pariaman. Arahannya ini harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholders pembangunan (pemerintah, *private/* swasta serta masyarakat) dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Penjabaran aktivitas tersebut tercermin dari pola pemanfaatan ruang (tata guna lahan) yang ada. Selain itu RTRW juga harus mempunyai visi dan misi ke depan yang jelas terutama dalam penataan ruang dan pembangunan Kota Pariaman. Aktivitas masyarakat kota (fisik, ekonomi, sosial dan politik) yang sangat dinamis secara langsung maupun tidak langsung turut memiliki andil dalam perkembangan Kota Pariaman.



Perubahan secara fisik berupa adanya perkembangan dan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan dalam bidang ekonomi terutama terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Perubahan dalam bidang sosial politik adalah adanya perubahan besar sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat *top down* menjadi *bottom up*. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berakibat pada perubahan karakteristik masyarakat yang berkembang ke arah demokrasi, yang salah satunya diwujudkan dalam proses pembangunan yang transparan dalam arti pemerintah harus terbuka pada seluruh masyarakat (terutama untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat).

Kota Pariaman telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui bantuan teknis Dirjen Penataan Ruang pada tahun 2004 dan telah di Perdakan pada tahun 2005. Dalam perjalanannya RTRW Kota Pariaman tersebut sudah dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam pengembangan wilayah Kota Pariaman. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 maka semua produk RTRW baik di tingkat Provinsi maupun Kota harus disesuaikan karena terdapat beberapa perbedaan dengan materi yang terdapat pada RTRW yang sebelumnya antara lain tentang jangka waktu rencana di mana pada RTRW yang lama jangka waktu untuk RTRW Kota adalah selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan menurut undang-undang yang baru adalah selama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian juga menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ini produk RTRW harus lebih menekankan kepada sanksi dan adanya penetapan kawasan strategis di setiap tingkatan RTRW baik Provinsi maupun Kota. Selain itu dengan keluarnya perubahan undang-undang penataan ruang dari undang-undang nomor 24 tahun 1992 menjadi undang-undang nomor 26 tahun 2007 di mana pada Bab XIII pasal 78 menyatakan bahwa RTRW Provinsi dan Kota harus sudah disesuaikan dan diperda kan sesuai materi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 paling lambat dua tahun bagi provinsi dan tiga tahun bagi Kota dan kota sejak undang-undang tersebut diundangkan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kota Pariaman

Berdasarkan Visi dan Misi yang terdapat pada dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dari RTRW Kota Pariaman, yaitu:

“Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”



Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penataan ruang Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata pesisir; sektor pariwisata sangat diharapkan dapat menjadi lokomotif pengembangan kegiatan ekonomi Kota Pariaman di masa mendatang, hal ini terutama berdasarkan pertimbangan atas potensi SDA kelautan dan potensi kekayaan budaya yang dimiliki serta posisi geografis Kota Pariaman yang sangat strategis. Selain itu juga dipertimbangkan keterbatasan pengembangan sektor lain seperti pertanian dan perkebunan yang terkendala oleh minimnya lahan yang dapat dikembangkan serta adanya persaingan di sektor perdagangan & jasa dengan kota lainnya. Kegiatan sektor pariwisata ditekankan pada pemanfaatan potensi bahari yang mencakup kawasan pantai, laut dan pulau-pulau kecil serta pengembangan dan peningkatan kegiatan festival Tabuik yang sudah menjadi kalender acara nasional. Puncak kegiatan pariwisata setiap tahunnya dilaksanakan pada setiap pelaksanaan Festival Tabuik. Sebagai maskot pariwisata Kota Pariaman, sudah selayaknya kegiatan Festival Tabuik ini dapat diagendakan dan disiapkan dengan lebih matang serta mendapatkan dukungan dari berbagai sektor kegiatan lainnya. Dari sisi aspek infrastruktur kota, diperlukan penataan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur khusus untuk pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya seperti rumah tabuik yang permanen dan lebih representatif, jalur jalan yang lebar dan dipersiapkan khusus untuk mengarak tabuik, areal pertemuan 2 tabuik dan lokasi pengarungan tabuik di pantai Gondoriah. Lokasi-lokasi tersebut harus disiapkan dan dipersiapkan dengan baik, terencana dan terukur sehingga dapat menampung membludaknya penonton yang bisa mencapai ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Madani; sesuai dengan karakter masyarakat Pariaman yang agamais maka pengembangan kegiatan pariwisata maupun perdagangan dan jasa yang akan mendukung pengembangan wilayah akan membawa dampak positif terhadap masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata yang dikembangkan harus yang bercirikan islami.
- 2) Perdagangan dan Jasa; untuk menunjang pencapaian visi Kota Pariaman yakni memantapkan kerangka pemerintahan yang optimal menuju kota perdagangan dan jasa, dengan membenahi sarana dan infrastruktur pasar yang masih bersifat tradisional di Kota Pariaman. Di bidang industri produksi industri kecil dan rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Beberapa



jenis produk hasil kerajinan industri kecil sudah memasuki pasar luar negeri, seperti produk sulaman, mukena, pakaian muslim. Produk makanan olahan tradisional seperti kipang kacang dan emping melinjo juga sudah memasuki pasar regional seperti Pekanbaru, Medan dan Jakarta namun masih terbatas dalam skala kecil. Terdapat sebanyak sekitar 200 lebih unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 2.000 orang lebih.

- 3) Berwawasan lingkungan; merupakan upaya pengembangan kegiatan kota yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana serta memperhatikan ruang terbuka hijau kota.

B. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kota;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Karakteristik wilayah kota; dan
- 3) Kata-kata kunci dari isu-isu strategis Kota Pariaman.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
- 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Strategi Penataan Ruang



Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kota; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota;
- 2) Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
- 3) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Strategi Dasar Pengembangan Kota Pariaman

Strategi dasar pengembangan Kota Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan kota sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kota lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan.

Adapun strategi pengembangan fungsi dan peran Kota Pariaman dalam pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi tempat pasar (marketplace function), dimana barang, jasa konsumsi dan investasi dijual kepada masyarakat di sekitar Kota Pariaman .



- 2) Masih merupakan fungsi tempat pasar, tetapi merupakan arus balik dari fungsi tempat pasar yang pertama, yaitu sebagai tempat pemasaran hasil pengolahan pertanian dan industri. Fungsi ini merupakan kegiatan yang potensial berkembang di Kota Pariaman, mengingat Pasar di Pariaman masih menjadi orientasi pasar bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Pariaman yang dulunya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu pola perdagangan yang melayani ke wilayah belakangnya, selain tempat pemasaran juga sebagai tempat distribusi dan koleksi barang-barang dari luar maupun dari dalam wilayah Kota Pariaman.
- 3) Merupakan terminal jasa distribusi, yang meliputi sektor angkutan perdagangan yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pemasaran secara lebih tegas yaitu menghubungkan pusat produksi dan pusat pemasaran.
- 4) Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit pertanian dari pemerintah, hal ini biasanya dibarengi oleh arus baliknya, berupa tabungan pedesaan yang disalurkan oleh bank-bank yang hirarkinya lebih tinggi.
- 5) Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan kegiatan pertanian dan industri.
- 6) Fungsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, peribadatan, rekreasi, pemerintahan dan lainnya yang mencerminkan fungsi Kota Pariaman sebagai pusat pelayanan kota.
- 7) Fungsi pelayanan dan koordinasi pertahanan dan keamanan.

E. Rumusan Strategi Penataan Ruang

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pengembangan kawasan perumahan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi:
 - a) mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan tinggi di pusat kota, kepadatan sedang dan kepadatan rendah dipinggir kota dan pada kawasan rawan bencana;



- b) mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
 - c) mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata;
 - d) mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kegiatan industri.
- 2) Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :
- a) menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga;
 - c) mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman dan sepanjang koridor jalan regional guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku kota dan kemudahan akses transportasi.
- 3) Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan meliputi:
- a) mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
 - b) mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah;
 - c) mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorih yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal;
 - d) mengembangkan potensi wisata alternatif kota untuk meragamkan objek dan kawasan wisata kota.
- 4) Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi:
- a) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan kota (LP2B) dan pembatasan pembangunan prasarana yang memotong kawasan persawahan untuk mempertahankan fungsinya sebagai aset kota dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan nasional;



- b) mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis;
- 5) Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi;
 - a) meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 - b) meningkatkan pemasaran hasil industri pada kawasan pasar dan rekreasi untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman.
- 6) Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi;
 - a) merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam;
 - b) mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana;
 - c) membatasi pembangunan sarana dan prasarana publik yang strategis seperti kesehatan dan pendidikan di kawasan sepanjang pantai; dan
 - d) dalam jangka panjang merelokasi fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintahan pada kawasan bebas bencana tsunami.
 - e) menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
 - f) meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
- 7) Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai bagian PKN PASOPALAPA meliputi;
 - a) mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya;
 - b) mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- 8) Strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi;



- a) Mengembangkan pulau untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- b) Melakukan konservasi pulau Kasiak dan pesisir pulau untuk perlindungan penyu dan terumbu karang.
- c) Mengembangkan potensi perikanan dan pariwisata pesisir dengan membangun prasarana dan sarana pemasaran perikanan dan pendukung wisata.

I. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). Pada prinsipnya KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD periode 2018-2023 yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pembobotan, maka isu strategis KLHS Perubahan RPJMD Kota Pariaman adalah : rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, tingginya intensitas alih fungsi lahan, rendahnya kapasitas penyediaan sumber air baku, rendahnya kapasitas pengelolaan limbah, berkurangnya kawasan hijau, dan minimnya sanitasi perkotaan.

Berikut ini Rekomendasi Perbaikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Visi-Misi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Tabel 4.25
Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Indikasi Program
1	Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Sampah	Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis 5R (Reduce,	1 Pengembangan pengelolaan sampah dengan ekoenzim dan maggot. 2 Pengembangan pembuatan kompos dari sampah organik.



No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Indikasi Program
		reuse, recovery, reutilization, and recycling).	3 Pemanfaatan sampah untuk energi. 4 Peningkatan pemilahan sampah / obat bekas dan baterai bekas. 5 Pengembangan pola hidup minim sampah
		Meningkatkan pengetahuan tentang sampah dan pendayagunaan sampah	1 Pengembangan pembuatan bahan bangunan berbasis sampah 2 Peningkatan informasi tentang nilai ekonomi sampah. 2 Pengembangan organisasi lokal pengelola sampah
		Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah	1 Peningkatan peran ulama, tokoh adat dan pendidik dalam pengelolaan sampah. 2 Pengembangan skema pemodal usaha pemanfaatan sampah untuk pellet energi.
2	Penurunan Kualitas Air	Meningkatkan Kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten dan daerah tetangga	1 Intensifikasi koordinasi teknis pengendalian pencemaran air sungai. 2 Pengembangan kebijakan pemanfaatan sungai antar daerah 3 Pengembangan pengelolaan sempadan sungai (taman kota, taman rekreasi)
		Mengembangkan system pengelolaan air limbah	1 Pengembangan rencana sewage system 2 Pengintegrasian pengelolaan air limbah dengan penyediaan air minum 3 Pengembangan infrastruktur pengendalian air limbah (IPLT, IPAL komunal) 4 Peningkatan pendidikan masyarakat tentang pemanfaatan ulang air limbah
3	Sanitasi Lingkungan yang Tidak Terkelola Baik	Meningkatkan kesadaran publik tentang sanitasi lingkungan	1 Peningkatan peran generasi muda dalam penyadaran pentingnya sanitasi 2 Pengembangan Kerjasama penyediaan infrastruktur sanitasi. 3 Peningkatan teknologi sanitasi lingkungan (teknologi jamban, pengelolaan air limbah)
		Mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan berorientasi ekologis	1 Peningkatan kerjasama pendidikan sanitasi dengan perguruan tinggi. 2 Pengembangan pusat informasi kesehatan lingkungan
4	Peningkatan Abrasi	Meningkatkan resiliensi kawasan pesisir	1 Pengembangan kelompok relawan pemeliharaan ekosistem mangrove 2 Pendayagunaan Kawasan pesisir sebagai objek wisata Pendidikan 3 Pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi (groin).



No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Indikasi Program
		Meningkatkan kualitas ekosistem laut dan pesisir	1 Peningkatan kapasitas penduduk dalam pemeliharaan terumbu karang pencegah abrasi. 2 Peningkatan pengelolaan limbah penyebab penurunan tutupan terumbu karang 3 Pengembangan terumbu karang buatan (fish apartment) 4 Pemeliharaan kualitas terumbu karang. 5 Pengendalian pembangunan perumahan di Kawasan pesisir. 6 Pengayaan vegetasi pantai (Ketaping, cemara laut, waru) 7 Peningkatan koordinasi pengelolaan kawasan pesisir (termasuk terumbu karang, mangrove)
5	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Meningkatkan dukungan implementasi LP2B Mengembangkan penataan ruang untuk pengurangan tekanan terhadap lahan pertanian.	1 Pengembangan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B. 2 Pengembangan pemodalan usaha untuk petani remaja. 3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan 1 Pengembangan infrastruktur pengalihan pemukiman dari Kawasan pertanian. 2 Pengetatan perizinan dalam pengendalian alih fungsi lahan.
		Mengembangkan dukungan untuk peningkatan kualitas RTH menuju Pariaman sebagai kota taman	1 Pengembangan kualitas dan jenis destinasi wisata berbasis taman kota 2 Pengembangan Kerjasama berbasis filantropi untuk peningkatan nilai guna taman kota. 3 Peningkatan infrastruktur pemeliharaan taman.

Tabel 4.26
Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB

No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan	Indikasi Program
SPM Bidang Pendidikan			
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan	1 Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pendidikan
		2 Meningkatkan kualitas pengawasan pada proses	1 Optimalisasi fungsi dan peranan pengawas



No Indikator	Indikator TPB		Arah Kebijakan		Indikasi Program
			pembelajaran		sekolah
				2	Penyempurnaan sistem pelaporan pengawasan sekolah
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan	1	Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pendidikan
		2	Meningkatkan kualitas pengawasan pada proses pembelajaran	1	Optimalisasi fungsi dan peranan pengawas sekolah
				2	Penyempurnaan sistem pelaporan pengawasan sekolah
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1	Mempertahankan APK SD/MI/ sederajat yang tinggi	1	Peningkatan kualitas pendidikan untuk menurunkan anak mengulang kelas
				2	Peningkatan layanan khusus bagi anak didik yang potensial mengulang kelas
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1	Mempertahankan APK SMP/MTs/ sederajat yang tinggi	1	Peningkatan kualitas pendidikan untuk menurunkan anak mengulang kelas
				2	Peningkatan layanan khusus bagi anak didik yang potensial mengulang kelas
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Peningkatan pemahaman orang tua akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
				2	Pengembangan TK Negeri per kecamatan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1	Meningkatkan koordinasi lanjutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan Dinas Pendidikan Provinsi	1	Peningkatan koordinasi lanjutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan Dinas



No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan		Indikasi Program	
			Sumatera Barat		Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
SPM Bidang Kesehatan					
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat imunisasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi tentang imunisasi
		2	Meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang halal-haramnya imunisasi	1	Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam penyampaian informasi tentang halal haramnya imunisasi
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang PMBA	1	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat
		2	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Peningkatan keterampilan ibu dan keluarga dalam penyediaan makanan bernilai gizi tinggi
				2	Peningkatan kerjasama lintas sektor
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif	1	Menyediakan sarana informasi melalui media cetak maupun media elektronik tentang manfaat ASI eksklusif
		2	Meningkatkan dukungan keluarga melalui dorongan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1	Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam memberikan informasi
		3	Optimalisasi implementasi regulasi bagi penyediaan ruang laktasi ditempat-tempat umum	1	Peningkatan sarana dan prasarana bagi ibu menyusui di lingkungan kerja dan ruang public
				2	Peningkatan pemahaman keagamaan tentang kewajiban memberikan ASI



No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan		Indikasi Program	
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kurangnya pengetahuan ibu dalam mengenal tanda-tanda bahaya penyakit pada balita	1	Meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan balita
		2	Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memanfaatkan fasyankes	1	Peningkatan kerjasama Lintas sektor terkait dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam memanfaatkan fasyankes
		3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak balita	1	Peningkatan SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan anak balita
				2	Peningkatan sarana dan prasarana fasyankes
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	1	Peningkatan intensitas penyampaian informasi tentang imunisasi lengkap	1	Intensifikasi informasi tentang imunisasi lengkap berbasis media sosial
		2	Meningkatkan peranserta tokoh masyarakat dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap di desa/kel	1	Peningkatan kerja sama dengan Kepala pemerintahan di Desa/Kelurahan
SPM Bidang Pekerjaan Umum					
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1	Pengembangan sistem pembiayaan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih
				2	Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
				3	Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
				4	Pengembangan perencanaan SPAM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	Mengembangkan sarana dan prasarana sanitasi layak	1	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak
				2	Penyusunan Kebijakan



No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan	Indikasi Program
			tentang pengelolaan air limbah domestik
		2 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak	1 Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak
			2 Peningkatan kapasitas SDM Pengelola air limbah domestik
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1 Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1 Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
			2 Peningkatan Lingkungan sehat perumahan
			3 Pemberdayaan komunitas perumahan
			4 Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga.	1 Meningkatkan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
			2 Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
			3 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1 Meningkatkan kapasitas infrastruktur layanan sumber air	1 Peningkatan infrastruktur sistem penyediaan air minum
			2 Peningkatan Lingkungan sehat perumahan
			3 Pemberdayaan komunitas perumahan



No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan		Indikasi Program	
				4	Pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat penyelenggara SPAM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak
				2	Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak
				3	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola air limbah domestik
				4	Penyusunan Kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik
SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat					
11.5.1.(a)	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	1	Pengembangan regulasi Rencana Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
SPM Bidang Sosial					
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1	Meningkatkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas		
		2	Mengembangkan infrastruktur yang ramah disabilitas		
		3	Mengembangkan kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas		
		4	Meningkatkan Kerjasama/MOU dengan Pihak ketiga (BAZ, CSR, Donatur, dll) untuk penyediaan sarana dan prasarana		
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1	Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar korban bencana melalui gudang logistik	1	Revitalisasi kearifan lokal dalam penyediaan logistik berbasis kelurahan/desa
		2	Meningkatkan Kerjasama	1	Peningkatan kerjasama



No Indikator	Indikator TPB	Arah Kebijakan		Indikasi Program	
			dengan OPD Terkait (Kesbangpol) untuk melakukan pemetaan data Potensi Konflik Sosial		dengan OPD Terkait untuk penanganan Rehabilitasi Korban Bencana Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1	Mengembangkan kelembagaan trauma healing bagi kelompok siaga bencana, lembaga dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk trauma healing	1	Peningkatan keterampilan trauma healing bagi kelompok siaga bencana
				2	Peningkatan kerjasama dengan tokoh agama untuk trauma healing

4.2.2 Rumusan Isu Strategis Kota Pariaman

Berdasarkan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan diatas baik sectoral, regional, nasional maupun internasional, maka isu-isu strategis RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Produktivitas sektor pariwisata yang masih rendah

Potensi permasalahan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata di kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kota Pariaman, umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kondisi saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan pesisir untuk wisata adalah:

- 1) Potensi obyek pariwisata pantai dan pariwisata pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Selain itu juga belum dilakukan promosi yang maksimal terhadap potensi wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Belum diprioritaskannya pembangunan wisata pada kawasan pesisir yang berbasis bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah kota Pariaman, karena pembangunan kawasan pesisir



yang berbasis pada bahaya bencana gempa dan tsunami belum disikapi secara optimal oleh sektor terkait

- 3) Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya pesisir yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan.

Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola dengan baik untuk pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkan.

Dilihat dari isu permasalahan dalam pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir Kota Pariaman yang sedang terjadi saat ini, maka diperlukan smart solution untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pariaman sebaiknya dilakukan dengan Co-Management dimana pengelolaan ini melibatkan unsur-unsur dari pemerintah (government based management) baik Pemerintah Kota maupun OPD terkait yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat lokal (community based management) serta investor (private sector) yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan sarana atau fasilitas penunjang kawasan wisata pesisir di Kota Pariaman.
- 2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ini juga seharusnya dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity) wilayah tersebut.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yaitu:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pariaman masih kecil.
3. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya.

Kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

1. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan..
2. Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat.
3. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi.



4. Belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal

2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Pariaman telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait akses untuk pendidikan PAUD dan sarana dan prasarana Sekolah SD yang belum memadai serta distribusi tenaga pendidik yang berkualitas belum merata.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa terutama Sekolah SMP yang berasal dari luar Kota Pariaman, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan membenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pariaman. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas Bagi masyarakat Pariaman (*multiplier effect*) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Kemudian proses penyelenggaraan pendidikan sejak bulan maret 2020 sampai saat ini tidak bisa terlaksana seperti biasa dalam kondisi normal karena pandemi covid-19. Siswa belajar dari rumah dengan sistem online, akan tetapi tidak bisa berjalan optimal karena keterbatasan jaringan dan alat komunikasi serta tenaga pendidik yang belum siap memberikan bahan ajar melalui media online. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sangat mempengaruhi pelaksanaan dunia pendidikan karena terjadi perubahan mendasar dalam proses pendidikan, jadi diperlukan



peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, percepatan digitalisasi pendidikan dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di fasilitas pendidikan.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran. Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Pariaman masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekrutmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

3. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas kesehatan akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.



4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat akan dilaksanakan melalui Misi V RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 5,20 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2017 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas dan Misi V yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



Prioritas utama Kota Pariaman dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Pariama dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Pariaman. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas dengan pembangan Mall Pelayanan Publik.

Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi akan dijawab melalui Misi III RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

Isu Strategis Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup akan dijawab melalui Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan



Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran Terwujudnya Tata Ruang yang Berdaya Guna serta Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

8. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

Peningkatan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui Misi I dan Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra dan Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

9. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19

Struktur perekonomian daerah Kota Pariaman yang didominasi oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan industri pengolahan, walaupun disadari sektor pertanian dari tahun sebelumnya mengalami kontribusi yang sedikit menurun yang disebabkan karena mulai naiknya sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pada satu sisi sektor ini memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya





dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.





BAB V

TUJUAN DAN SASARAN



BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada RPD Kota Pariaman 2024-2026 mengacu Tujuan dan Sasaran Pokok pada dokumen RPJPD Kota Pariaman 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah :

1) Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.

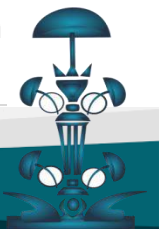
Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Pariaman antara lain adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk tercapai tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan



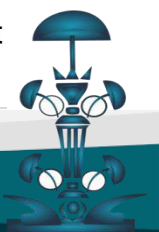
bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan perekonomian Kota Pariaman untuk empat tahun periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian Kota Pariaman diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman. Oleh sebab itu, salah satu penekanan dalam misi ini adalah upaya pembangunan perekonomian melalui gerakan ekonomi bersama dalam hal ini melalui kelembagaan koperasi yang sudah teruji sebagai suatu kelembagaan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Untuk tercapai tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
 - c. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian.
 - d. Meningkatnya iklim usaha dan investasi.
 - e. Menurunnya angka kemiskinan.
 - f. Menurunnya angka pengangguran.
 - g. Meningkatnya kemandirian Desa.
- 3) Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat



ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

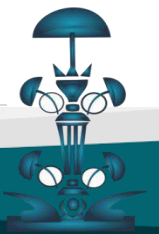
Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Selain itu perlu penguatan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kerjasama industri dan talenta global.

Untuk tercapai tujuan Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.. Dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

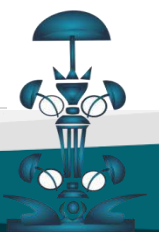
- a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.
- 4) Terwujudnya Kota Pariaman layak huni, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - c. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
 - d. Meningkatnya mitigasi bencana.
 - e. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Keselarasan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 serta keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 dibawah ini :



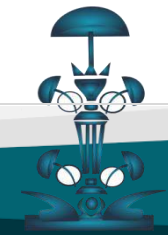
Tabel 5.1
Keselarsan Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026
dengan Misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

TUJUAN RPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026		MISI RPJPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2005-2025	
Tujuan 1	Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial Masyarakat
Tujuan 2	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Misi 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan
Tujuan 3	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Misi 4	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Misi 3	Mewujudkan Rasa Tertib Dan Aman Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara
		Misi 5	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Daerah

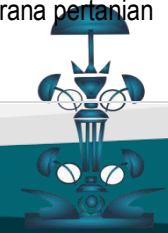


Tabel 5.2
Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja yang disertai dengan OPD Penanggung Jawab

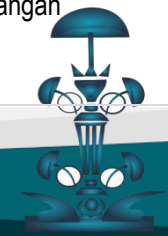
1	Tujuan	:	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
-	Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.1	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
-	Indikator Sasaran	:	1. Angka Harapan Lama Sekolah
			2. Angka Rata-rata Lama Sekolah
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-	OPD Pendukung	:	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	Program Prioritas	:	- Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1. Program Pengelolaan Pendidikan
			2. Program pengembangan kurikulum
			3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
			4. Program Pembinaan Perpustakaan
			5. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
			6. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
			7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1.2	Sasaran	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
-	Indikator Sasaran	:	1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)



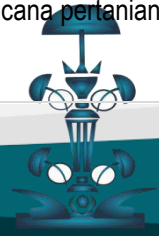
			2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	1.	Dinas Kesehatan
			2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
			3.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			4.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
1.3	Sasaran	:		Meningkatnya pendapatan masyarakat
-	Indikator Sasaran		-	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	1.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
			2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			3.	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
			2.	Program pengembangan UMKM
			3.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			4.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian



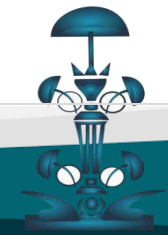
			5.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
1.4	Sasaran	:	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
-	Indikator Sasaran	:	1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program pembinaan KB
			2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2	Tujuan	:	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	
-	Indikator Tujuan	:	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
			2.	Gini Ratio (Indeks Gini)
2.1	Sasaran	:	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	
-	Indikator Sasaran	:	-	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
-	Program Prioritas/Utama	:	-	Program Peningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



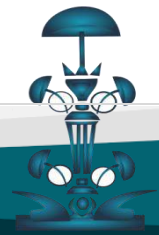
		2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		3.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		4.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		6.	Program Pengembangan UMKM
		7.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		8.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		9.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		10.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		11.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		12.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2.2	Sasaran	:	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
-	Indikator Sasaran	-	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	- Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
-	Program Prioritas	:	- Program Peningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian



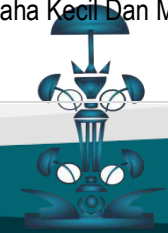
		5.	Program perizinan usaha pertanian
		6.	Program penyuluhan pertanian
		7.	Program pengelolaan perikanan tangkap
		8.	Program pengelolaan perikanan budidaya
		9.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		10.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.3	Sasaran	:	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang berdaya saing
-	Indikator	:	- % Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
-	OPD Penangung Jawab Utama	:	- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
-	OPD Penangung Jawab Pendukung	:	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			3. Dinas Komunikasi Dan Informatika
			4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
			5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			6. Dinas Kesehatan
-	Program Prioritas	:	- Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pariwisata
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			2. Program pemasaran pariwisata
			3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			5. Program pengembangan kebudayaan
			6. Program pengembangan kesenian tradisional



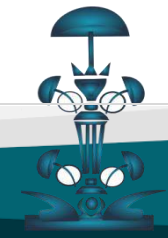
			7.	Program pembinaan sejarah
			8.	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			9.	Program pengelolaan permuseuman
2.4	Sasaran	:	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	
-	Indikator	:	-	% Pertumbuhan Realisasi Investasi
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
-	Program Prioritas	:	-	Program Penciptaan Iklim Invetasi Yang Kondusif
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program pengembangan iklim penanaman modal
			2.	Program promosi penanaman modal
			3.	Program pelayanan penanaman modal
			4.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			5.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
2.5	Sasaran	:	Menurunnya angka kemiskinan	
-	Indikator	:	-	Angka Kemiskinan
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Sosial
-	OPD Penanggung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			3.	Dinas Kesehatan
			4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			5.	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
			6.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan



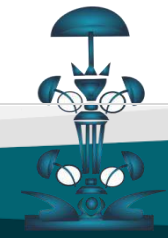
-	Program Prioritas	:	-	Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program rehabilitasi sosial
			2.	Program perlindungan jaminan social
			3.	Program pemberdayaan social
2.6	Sasaran	:	Menurunnya angka pengangguran	
-	Indikator	:	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
-	OPD Penangung Jawab Utama	:	-	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
-	OPD Penangung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			3.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
-	Program Prioritas	:	-	Program percepatan pengurangan pengangguran
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program perencanaan tenaga kerja
			2.	Program penempatan tenaga kerja
			3.	Program hubungan industrial
2.7	Sasaran	:	Meningkatnya kemandirian Desa	
-	Indikator	:	-	Indeks Desa Membangun (IDM)
-	OPD Penangung Jawab Utama	:	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
-	OPD Penangung Jawab Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			3.	Dinas Kesehatan
			4.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah



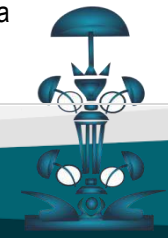
			6.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
			7.	Kecamatan
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa.
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program penataan desa
			2.	Program peningkatan kerjasama desa
			3.	Program administrasi pemerintahan desa
			4.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.	Tujuan	:	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	
-	Indikator	:	-	Indeks RB
3.1	Sasaran	:	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
-	Indikator	:	1.	Nilai Evaluasi Akip Kota
			2.	Opini WTP BPK Terhadap LKPD
-	Program Prioritas	:	-	Program peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel
3.2	Sasaran	:	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	
-	Indikator	:	1.	Indeks SPBE
			2.	Indeks Profesional ASN
-	Program Prioritas	:	-	Program peningkatan Birokrasi Yang Kapabel
3.3	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	
-	Indikator	:	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



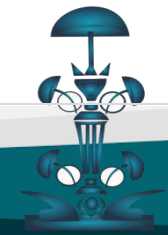
-	Program Prioritas		3.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan
			4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			5.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			6.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			7.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			8.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			9.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			10.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			11.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			12.	Program Kepegawaian Daerah
			13.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			14.	Program pengelolaan aplikasi informatika
			15.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			16.	Program Promosi Penanaman Modal
			17.	Program Pelayanan Penanaman Modal
			18.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			19.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			20.	Program pendaftaran penduduk
			21.	Program pencatatan sipil



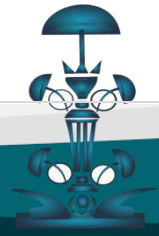
		22.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		23.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		24.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		25.	Program pengelolaan arsip
		26.	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
		27.	Program perizinan penggunaan arsip
4.	Tujuan	:	Terwujudnya Kota Pariaman layak huni
-	Indikator	:	1. Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)
4.1	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
-	Indikator	:	- Indeks Infrastruktur Daerah
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
-	OPD Pendukung	:	- Dinas Perhubungan
-	Program Prioritas	:	- Program Peningkatan Kualitas Insfrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya.
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
			2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
			4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
			5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			6. Program pengembangan permukiman
			7. Program penataan bangunan gedung
			8. Program penataan bangunan dan lingkungannya



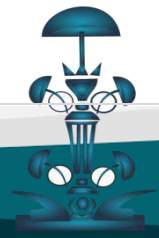
			9.	Program penyelenggaraan jalan
			10.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			11.	Program pengelolaan pelayaran
			12.	Program pengelolaan perkeretaapian
			13.	Program pengembangan jasa konstruksi
			14.	Program penyelenggaraan penataan Ruang
			15.	Program pengelolaan izin lokasi
			16.	Program penatagunaan tanah
			17.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
4.2	Sasaran	:		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
-	Indikator	:	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	OPD Pendukung	:	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program perencanaan lingkungan hidup
			2.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			3.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
			4.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
			5.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			6.	Program pengelolaan persampahan
4.3	Sasaran	:		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni



-	Indikator	:	1.	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni
			2.	% Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
-	OPD Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Dinas Kesehatan
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program pengelolaan persampahan
			2.	Program pengembangan perumahan
			3.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			4.	Program kawasan permukiman
			5.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
			6.	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
4.4	Sasaran	:	Meningkatnya Kehatanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	
-	Indikator	:	-	Indeks Kehananan Daerah (IKD)
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-	OPD Pendukung	:	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
			2.	Kecamatan
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program penanggulangan bencana
			2.	Program Penanganan Bencana
4.5	Sasaran	:	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	

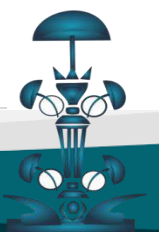


-	Indikator	:	-	Indeks Ketentraman dan ketertiban
-	OPD Penanggung Jawab Utama	:	1.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
			2.	Kantor Kesbangpol
			3.	Dinas Perhubungan
-	OPD Pendukung	:	-	Kecamatan
-	Program Prioritas	:	-	Program Peningkatan ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
-	Program Permendagri 90 Tahun 2019	:	1.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			2.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



5.2 Arsitektur Kinerja atau Cascading Kinerja

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Berikut akan diuraikan tentang cascading kinerja pemerintah Kota Pariaman seperti pada bagan di bawah ini :

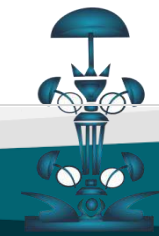


Cascading Kinerja Pemerintah Kota Pariaman



Tujuan 1 :
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas

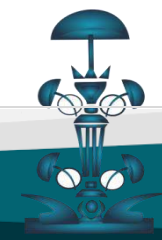
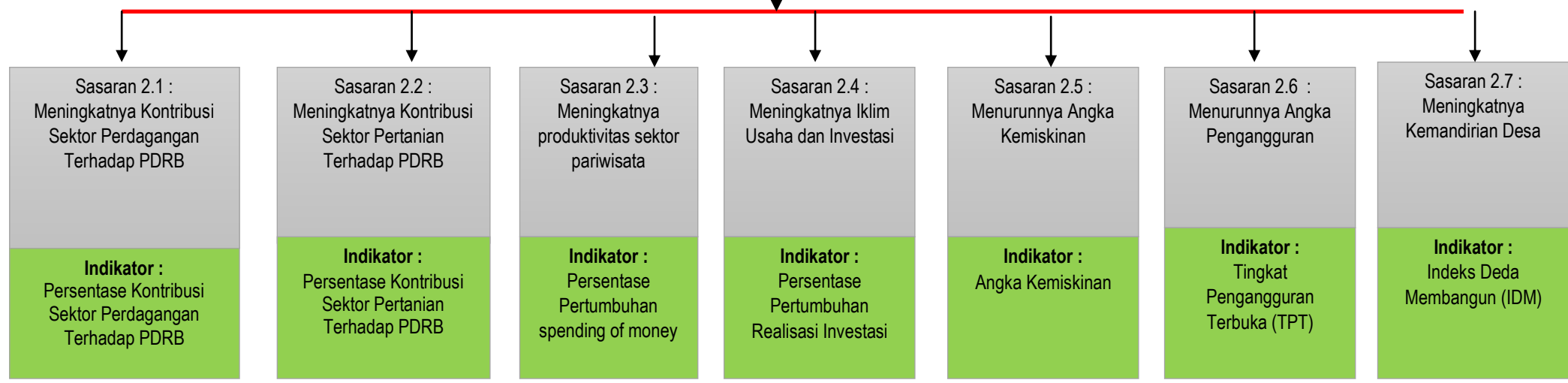
Indikator:
Indeks Pembangunan Manusia

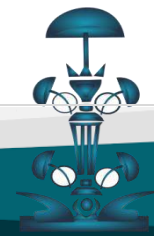
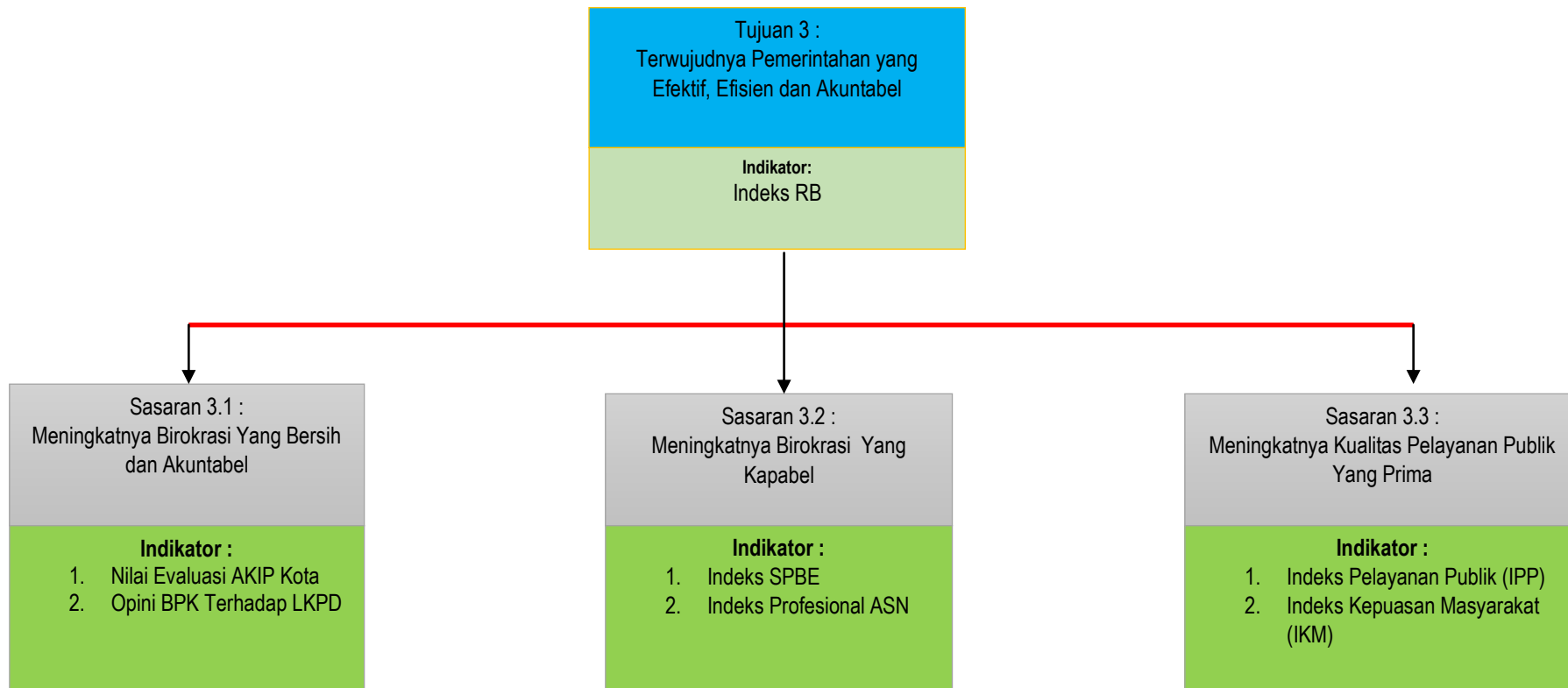


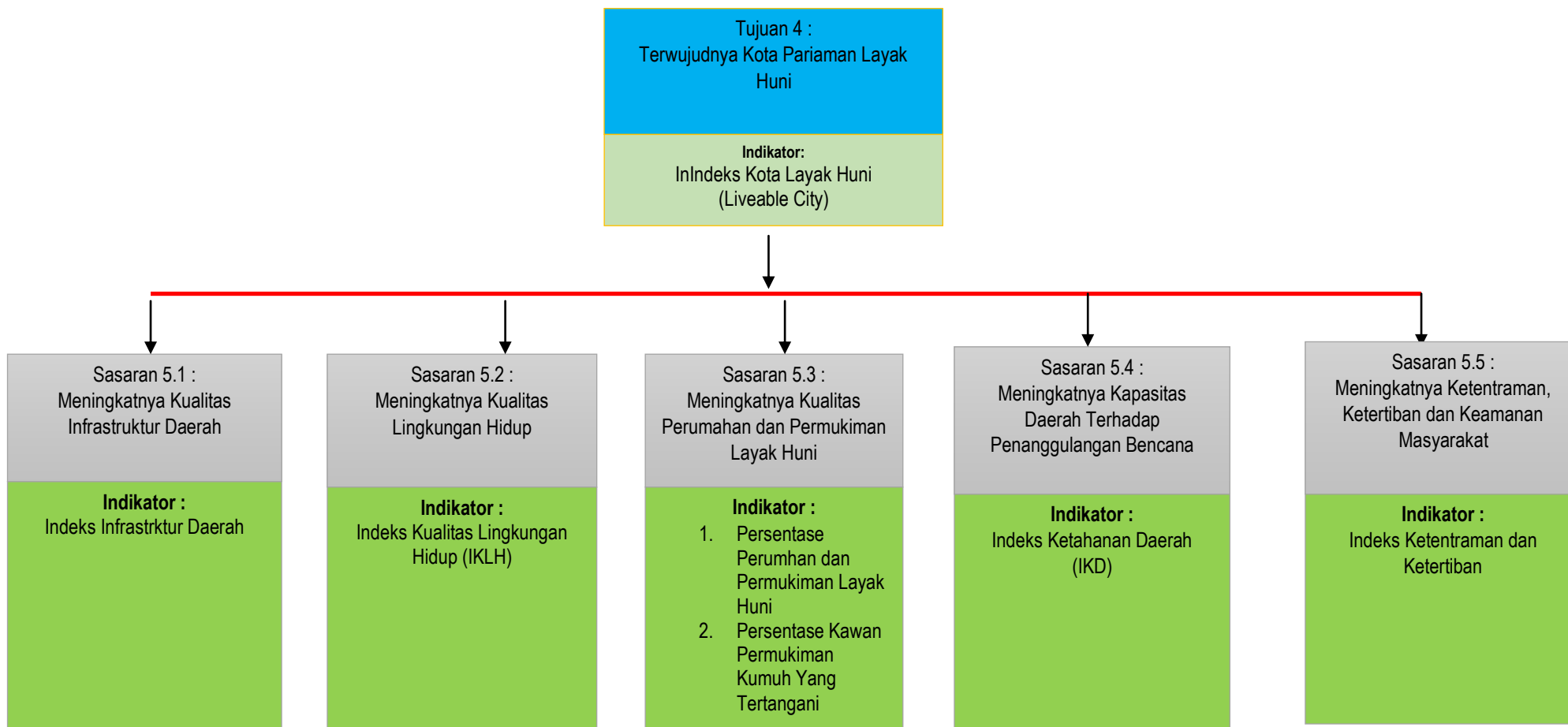
Tujuan 2 :
Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Indikator:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Gini ratio

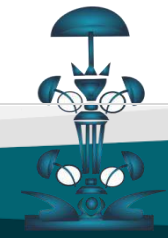




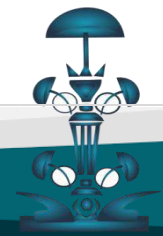


Tabel: 5.3
Keterkaitan Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Yang Disertai dengan Targetnya

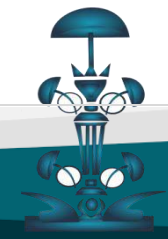
NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan 1 :							
	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,07	77,88	78,15	78,42	78,42
1.1	Sasaran 1.1 :							
	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,61	14,73	14,79	14,85	14,85
		2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,78	11,22	11,46	11,72	11,72
1.2	Sasaran 1.2 :							
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,67	71,31	71,71	72,21	72,21
		2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,6	15,7	12,8	10,3	10,3
1.3	Sasaran 1.3 :							
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp)	13.150	13,814	14,146	14,478	14,478
1.4	Sasaran 1.4 :							
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,42	55,25	57,45	59,55	59,55
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,62	99,28	99,50	99,72	99,72



NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Tujuan 2 :							
	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,55	5,25	5,45	5,65	5,65
		2. Gini Ratio (Indeks Gini)	Nilai	0,272	0,255	0,250	0,245	0,245
2.1	Sasaran 2.1 :							
2.2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sasaran 2.2 :	1. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,45	15,91	16,14	16,37	16,37
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	17,93	17,95	17,96	17,97	17,97
2.3	Sasaran 2.3 :							
	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan spending of money	%	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0
2.4	Sasaran 2.4 :							
2.4	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	1. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,2	2,6	2,8	3,0	3,0
2.5	Sasaran 2.5 :							
2.5	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	%	4,13	3,92	3,76	3,55	3,55
2.6	Sasaran 2.6 :							
2.6	Menurunnya angka pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,19	4,72	4,54	4,10	4,10
2.7	Sasaran 2.7 :							
	Meningkatnya kemandirian Desa	1. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7744	0,7874	0,8003	0,8133	0,8133



NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tujuan 3 :							
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Indeks RB	Indeks	62,68 (B)	65,65 (B)	70,05 (B)	72,35 (BB)	72,35 (BB)
3.1	Sasaran 3.1 :							
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP Kota	Indeks	61,08 (B)	65,15 (B)	70,01 (BB)	75,25 (BB)	75,25 (BB)
		2. Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Sasaran 3.2 :							
	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks SPBE	Indeks	2,64	2,7	2,85	3,0	3,0
		2. Indeks Profesional ASN	Indeks	45,85 (Sangat Rendah)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)
3.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,40 (Sangat Baik)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,21 (Baik)	83,15 (Baik)	86,20 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)
4.	Tujuan 4 :							
	Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	1. Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)	%	61,4	63,25	65,15	68,40	68,40



NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Sasaran 4.1 :							
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1. Indeks Infrastruktur Daerah	%	62,08	64,25	66,15	68,25	68,25
4.2	Sasaran 4.2 :							
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,35	57,02	57,70	58,08	58,08
4.3	Sasaran 4.3 :							
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	82,53	84,15	85,10	86,25	86,25
		2. Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Ha	138,29 Ha	25,05 Ha	19,62 Ha	19,73 Ha	64,4 Ha
4.4	Sasaran 4.4 :							
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	44	46	48	52	52
4.5	Sasaran 4.5 :							
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban	%	66,25	69,15	72,06	75,01	75,01





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Pariaman melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Pariaman. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dan juga Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Pariaman yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan.

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah selama 3 (tiga) Tahun 2024-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.



Tabel 6.1
Hubungangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1.	Meningkatkan Kualitas sistem pendidikan.	1.	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan
						2.	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
						3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
				2.	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1.	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
						2.	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa Kartu Pariaman Pintar
						3.	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
				3.	Peningkatan Daya Saing Pendidikan	1.	Penguatan penjaminan mutu pendidikan
						2.	Menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar
						3.	Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SMP



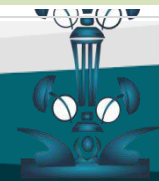
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				4.	Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan	1.	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT
						2.	Penguatan digitalisasi sekolah
				5.	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	1.	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi
						2.	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga
		2.	Sasaran 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	1.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata
						2.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
						3.	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
				2.	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik



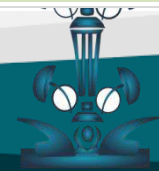
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2.	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
						3.	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
				3.	Konvergensi penanganan Stunting	1.	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan
						2.	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
						3.	kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
		3.	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1.	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	1.	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
						2.	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru



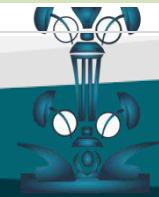
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	1.	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
						2.	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
						3.	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat
		4.	Sasaran 4.1 : Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	1.	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
						2.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
						3.	Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota
				2.	Peningkatan Ketahanan Keluarga	1.	Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga
						2.	Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan



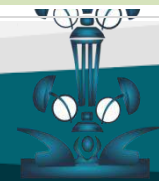
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.	Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
						2.	Melaksanakan sosialisasi dan Meningkatkan organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan hukum kewenangan kab/kota
						3.	Melaksanakan advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas sebagai berikut :							
1.	Program Peningkatan Kualitas SDM Berdaya Saing;						
2.	Program Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif						
3.	Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat						
4.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga						
5.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat						
a.	Penjabaran program pembangunan prioritas ini adalah sebagai berikut:						
-	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar						
-	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
-	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan						



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
-	Peningkatan Kualitas Generasi Pemuda Yang Unggul		
-	Peningkatan Fungsi Pustaka Sebagai Media Baca Bagi Masyarakat		
-	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		
-	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai		
-	Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan		
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam menerapkan Perilaku Hidup Sehat		
-	Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
-	Peningkatan kualitas ketahanan keluarga		
b.	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019		
-	Program Pengelolaan Pendidikan		
-	Program pengembangan kurikulum		
-	Program pendidik dan tenaga kependidikan		
-	Program Pembinaan Perpustakaan		
-	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		
-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
-	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		
-	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
-	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
-	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)		
-	Program pengembangan umkm		
-	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		



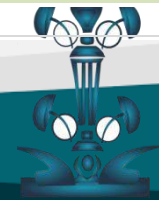
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
-	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian						
-	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan						
-	Program pengendalian Penduduk						
-	Program pembinaan KB						
-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
-	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera						
-	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						
-	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						
-	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.						
-	Program Penanganan kerawanan Pangan						
-	Program Pengawasan Keamanan Pangan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2.	Tujuan 2 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	1.	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	1.	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
						2.	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;
						3.	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
						4.	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2.	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	2.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	1.	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
						2.	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3.	Sasaran 2.3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang berdaya saing	1.	Meningkatkan daya saing pariwisata.	1.	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM
						2.	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						3.	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						4.	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						5.	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						6.	Menetapkan satu destinasi unggulan



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2.	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1.	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
						2.	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
				3.	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1.	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
						2.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
		4.	Sasaran 2.4 : Meningkatnya iklim usaha dan investasi	1.	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	1.	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
						2.	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
				2.	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	1.	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
						2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
						3.	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan,



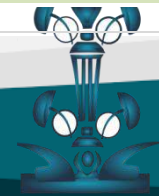
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
						4.	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi
		5.	Sasaran 2.5 : Menurunnya angka kemiskinan	1.	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1.	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
						2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
						3.	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
						4.	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Pariaman sosial
						5.	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
				2.	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	1.	Pengurangan beban hidup warga kurang mampu
						2.	Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat



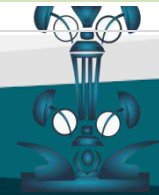
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Sasaran 2.6 : Menurunnya angka pengangguran	1. Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha 2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru
		7. Sasaran 2.7 : Meningkatnya kemandirian Desa	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
			2. Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa
Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas sebagai berikut :				
1.	Program Peningkatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat			
a.	Penjabaran program pembangunan prioritas ini adalah sebagai berikut:			
-	Program pemulihan ekonomi masyarakat			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
-	Program penguatan sektor pertanian, perdagangan dan UMKM serta sektor unggulan lainnya.		
-	Program Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif		
-	Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pembukaan lapangan pekerjaan.		
-	Program upaya perwujudan kemandirian Desa melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat		
b.	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019		
-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
-	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
-	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		
-	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
-	Program Pengembangan UMKM		
-	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
-	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
-	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		
-	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
-	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
-	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		
-	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		
-	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
-	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		
-	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
-	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		
-	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
-	Program perizinan usaha pertanian		
-	Program penyuluhan pertanian		
-	Program pengelolaan perikanan tangkap		
-	Program pengelolaan perikanan budidaya		
-	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
-	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
-	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		
-	Program pemasaran pariwisata		
-	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		
-	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		
-	Program pengembangan kebudayaan		
-	Program pengembangan kesenian tradisional		
-	Program pembinaan sejarah		
-	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		
-	Program pengelolaan permuseuman		
-	Program pengembangan iklim penanaman modal		
-	Program promosi penanaman modal		
-	Program pelayanan penanaman modal		
-	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
-	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		
-	Program rehabilitasi social		
-	Program perlindungan jaminan social		
-	Program pemberdayaan social		
-	Program perencanaan tenaga kerja		



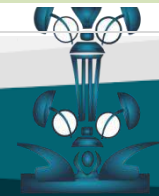
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
-	Program penempatan tenaga kerja						
-	Program hubungan industrial						
-	Program penataan desa						
-	Program peningkatan kerjasama desa						
-	Program administrasi pemerintahan desa						
-	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat						
-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
-							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Tujuan 3 : Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.	Sasaran 3.1 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.	Meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja daerah	1.	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
						2.	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
						3.	Penguatan kinerja Pengawasan
						4.	Peningkatan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
		2.	Sasaran 3.2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1.	Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	1.	Penguatan implemementasi manajemen berbasis merit sistem
						2.	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
						3.	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi



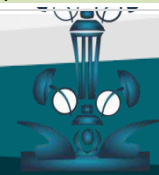
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Penyederhanaan Organisasi
	3. Sasaran 3.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	1. Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
			2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
		2. Meningkatkan sistem pelayanan publik.	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
			2. Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas sebagai berikut :			
1.	Program peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel		
2.	Program peningkatan Birokrasi Yang Kapabel		
3.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima		
a.	Penjabaran program pembangunan prioritas ini adalah sebagai berikut:		
-	Program pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
-	Program Penguatan Implementasi Sakip		
-	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
-	Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan berbasis TI		
b.	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019		
-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
-	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
-	Program perekonomian dan pembangunan		
-	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd		
-	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
-	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
-	Program penelitian dan pengembangan daerah		
-	Program pengelolaan keuangan daerah		
-	Program pengelolaan barang milik daerah		
-	Program pengelolaan pendapatan daerah		
-	Program kepegawaian daerah		
-	Program pengembangan sumber daya manusia		
-	Program penyelenggaraan pengawasan		
-	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		
-	Program pengelolaan informasi dan komunikasi public		
-	Program pengelolaan aplikasi informatika		
-	Program penyelenggaraan statistik sektoral		
-	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		
-	Program pendaftaran penduduk		
-	Program pencatatan sipil		
-	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
-	Program pengelolaan profil kependudukan		



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
-	Program pengelolaan arsip						
-	Program perlindungan dan penyelamatan arsip						
-	Program perizinan penggunaan arsip						
-							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
4.	Tujuan 4 : Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	1.	Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1.	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh Wilayah	1.	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah
						2.	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota
						3.	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
						4.	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Irigasi
				2.	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	1.	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang
						2.	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
						3.	Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
		2.	Sasaran 4.2 :	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam	1.	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan (Air, Udara



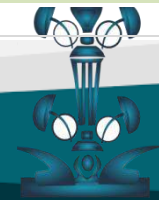
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	dan Tutupan Lahan)
				2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah
			2. Meningkatkan ruang terbuka Hijau	1. Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik
				2. Melaksanakan pengelolaan RTHPP lingkungan permukiman.
				3. Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Pariaman.
		3. Sasaran 4.3 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman
				2. Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat
			2. Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	1. Penataan Kawasan Kumuh
				2. Pemenuhan sarana dan prasarana penanganan kawasan kumuh
				3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan



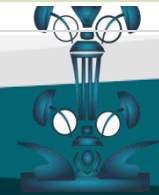
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan			
		4. Sasaran 4.4 : Meningkatnya Kehatanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	1.	Meningkatkan sistem ketahanan daerah	1.	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana		
							2.	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
							3.	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
							1.	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
				2.	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	2.	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana	
							3.	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
							4.	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
							5.	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami
		5. Sasaran 4.5 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	1.	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	1.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda		
							2.	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keamanan lingkungan
			3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas sebagai berikut :			
a.	Penjabaran program pembangunan prioritas ini adalah sebagai berikut:		
-	Program Pemenuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat		
-	Program Peningkatan Kualitas Insfrastruktur.		
-	Program Pembangunan Insfrastruktur Penunjang Ekonomi Masyarakat		
-	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
-	Program Peningkatan Kualitas Kulit Perumahan dan Permukiman Layak Huni		
-	Program Pningkatan Keahatan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana		
-	Program Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.		
b.	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019		
-	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)		
-	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		
-	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		
-	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
-	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		
-	Program pengembangan permukiman		
-	Program penataan bangunan gedung		
-	Program penataan bangunan dan lingkungannya		
-	Program penyelenggaraan jalan		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
-	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
-	Program pengelolaan pelayaran		
-	Program pengelolaan perkeretaapian		
-	Program pengembangan jasa konstruksi		
-	Program penyelenggaraan penataan Ruang		
-	Program pengelolaan izin lokasi		
-	Program penatagunaan tanah		
-	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		
-	Program perencanaan lingkungan hidup		
-	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
-	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)		
-	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)		
-	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		
-	Program pengelolaan persampahan		
-	Program pengembangan perumahan		
-	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
-	Program kawasan permukiman		
-	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		
-	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman		
-	Program penanggulangan bencana		
-	Program Penanganan Bencana		
-	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum		
-	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		
-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		





Tujuan				Sasaran				Strategi				Arah Kebijakan			



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ada pada BAB V.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024–2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam tiga tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 didasarkan pada strategi sebagaimana pada Tabel 6.2 :

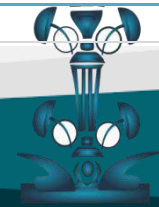


Tabel 6.2 :
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024-2026

NO	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
			2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas sistem pendidikan.	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan	v	v	v
		Peningkatan kualitas pengajaran dan Pembelajaran	v	v	v
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	v	v	v
2	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	v	v	v
		Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa Kartu Pariaman Pintar	v	v	v
		Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan	v	v	v
3.	Peningkatan Daya Saing Pendidikan	Penguatan penjaminan mutu pendidikan	v	v	v
		Menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar	v	v	v
		Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	v	v	v
4.	Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	v	v	v
		Penguatan digitalisasi sekolah	v	v	v
5.	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	v	v	v
		Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	v	v	v
6.	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	v	v	v
		Meningkatkan kualitas pelayanan	v	v	v



		kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar			
		Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	v	v	v
7.	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	v	v	v
		Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	v	v	v
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	v	v	v
8.	Konvergensi penanganan stunting	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan	v	v	v
		Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui	v	v	v
		kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	v	v	v
9.	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	v	v	v



		Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	v	v	v
10.	Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	v	v	v
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	v	v	v
		Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota	v	v	v
11.	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga	v	v	v
		Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	v	v	v
12.	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	v	v	v
		Melaksanakan sosialisasi dan Meningkatkan organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan hukum kewenangan kab/kota	v	v	v
		Melaksanakan advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	v	v	v
13.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	v	v	v
		Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui	v	v	v



		peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;			
		Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.	v	v	v
		Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	v	v	v
14.	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	v	v	v
		Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	v	v	v
15.	Meningkatkan daya saing pariwisata.	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM	v	v	v
		Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	v	v	v
		Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)	v	v	v
		Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata	v	v	v
		Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)	v	v	v
		Menetapkan satu destinasi unggulan	v	v	v
16.	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	v	v	v
		Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	v	v	v
17.	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif	v	v	v
		Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	v	v	v
18.	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan	v	v	v



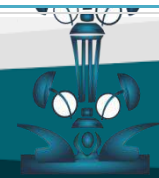
	yang kondusif	kemudahan dan kenyamanan berinvestasi			
		Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi	v	v	v
19.	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi	v	v	v
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	v	v	v
		Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	v	v	v
		Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	v	v	v
20.	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	v	v	v
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	v	v	v
		Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS	v	v	v
		Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial	v	v	v
		Kesempatan Kerja Keluarga Miskin	v	v	v
21.	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	v	v	v
		Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat	v	v	v
22.	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	v	v	v
		Menumbuhkembangkan wirausaha baru	v	v	v
23.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	v	v	v



		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	v	v	v
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	v	v	v
24.	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	v	v	v
		Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	v	v	v
25.	Meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja daerah	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	v	v	v
		Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	v	v	v
		Penguatan kinerja Pengawasan	v	v	v
		Peningkatan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	v	v	v
26.	Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	Penguatan implemementasi manajemen berbasis merit sistem	v	v	v
		Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	v	v	v
		Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi	v	v	v
		Penyederhanaan Organisasi	v	v	v
27.	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	v	v	v
		Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	v	v	v
28.	Meningkatkan sistem pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima	v	v	v
		Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	v	v	v
29.	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi	v	v	v



	wilayah	daerah			
		Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota	v	v	v
		Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota	v	v	v
		Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Irigasi	v	v	v
30.	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	v	v	v
		Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	v	v	v
		Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	v	v	v
31.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan (Air, Udara dan Tutupan Lahan)	v	v	v
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	v	v	v
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	v	v	v
32.	Meningkatkan ruang terbuka hijau	Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	v	v	v
		Melaksanakan pengelolaan RTHPP lingkungan permukiman.	v	v	v
		Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Pariaman.	v	v	v
33.	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman	v	v	v
		Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	v	v	v
34.	Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Penataan Kawasan Kumuh	v	v	v
		Pemenuhan sarana dan prasarana penanganan kawasan kumuh	v	v	v
		Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	v	v	v
35.	Meningkatkan sistem ketahanan daerah	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur	v	v	v



		dalam menghadapi bencana			
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	v	v	v
		Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan	v	v	v
36.	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	v	v	v
		Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana	v	v	v
		Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan	v	v	v
		Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif	v	v	v
		Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami	v	v	v
37.	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	v	v	v
		Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	v	v	v
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	v	v	v





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program prioritas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Daftar Program Yang digunakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran periode 2024-2026

NO	Nama Program	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program pengembangan kurikulum	
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
6	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
7	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	
10	Program Penataan Bangunan Gedung	
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
12	Program Penyelenggaraan Jalan	
13	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
17	Program Pembangunan Infrastruktur Persampahan	
18	Program Kawasan Permukiman	
19	Program Pengembangan Perumahan	
20	Program Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
23	Program penanggulangan bencana	
24	Program Pemberdayaan Sosial	
25	Program Rehabilitasi sosial	
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
28	Program Penanganan Bencana	
29	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	



30	Program Penempatan Tenaga Kerja
31	Program Hubungan Industrial
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
33	Program Perlindungan Perempuan
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
35	Program Pemenuhan Hak Anak
36	Program Perlindungan Khusus Anak
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
38	Program penanganan Kerawanan Pangan
39	Program Pengawasan Keamanan pangan
40	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan
41	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
44	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
45	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
46	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
47	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
48	Program pengelolaan persampahan
49	Program pendaftaran penduduk
50	Program Pencatatan sipil
51	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
52	Program administrasi pemerintahan desa
53	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
54	Program Penataan Desa
55	Program Pengendalian penduduk
56	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)
57	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
59	Program Pengelolaan Pelayaran
60	Program Pengelolaan Perkeretaapian
61	Program Informasi dan komunikasi publik
62	Program Aplikasi Informatika
63	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
64	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
65	Program Pengembangan UMKM
66	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
67	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
68	Program promosi penanaman modal
69	Program pengembangan iklim penanaman modal
70	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
71	Program Pelayanan penanaman modal
72	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
73	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan



74	Program Penyelenggaraan statistik sektoral
75	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
76	Program pengembangan kebudayaan
77	Program pengembangan kesenian tradisional
78	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
79	Program pembinaan perpustakaan
80	Program pengelolaan arsip
81	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
82	Program pengelolaan perikanan budiday
83	Program pengelolaan perikanan tangkap
84	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
85	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
86	Program pemasaran pariwisata
87	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
88	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
89	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
90	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
91	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
92	Program penyuluhan pertanian
93	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
94	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
95	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
96	Program perencanaan dan pembangunan industri
97	Program Pengendalian IzinUsaha Indsutri Kabupaten / Kota
98	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)
99	Program Perekonomian dan Pembangunan
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
101	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
102	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
103	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
104	Program pengelolaan keuangan daerah
105	Program pengelolaan barang milik daerah
106	Program pengelolaan pendapatan daerah
107	Program kepegawaian daerah
108	Program penelitian dan pengembangan daerah
109	Program penyelenggaraan pengawasan
110	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
111	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
112	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
113	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum
114	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
115	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
118	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
119	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya





120 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Kode Rek	Uraian	Target	Proyeksi (Rp)		
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	645.911.417.397	656.864.466.101	670.683.163.369	681.730.616.877
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.957.169.169	61.905.027.627	65.000.279.009	66.950.287.379
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.040.000.000	12.642.000.000	13.274.100.000	13.672.323.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.237.768.976	15.999.657.425	16.799.640.296	17.303.629.505
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155	10.485.835.663	11.010.127.446	11.340.431.269
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.692.890.038	22.777.534.540	23.916.411.267	24.633.903.605
1.2	Pendapatan Transfer	580.954.248.228	588.659.438.473	599.067.884.360	607.966.879.498
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	544.484.491.000	550.366.193.384	558.859.977.017	565.748.576.787
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah	36.469.757.228	38.293.245.089	40.207.907.344	42.218.302.711
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	6.813.450.000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	6.813.450.000,000
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	-	-	-
	Jumlah	645.911.417.397	656.864.466.101	670.683.163.369	681.730.616.877

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2023 (diolah)



Tabel 7.3
Rencana Kebutuhan Belanja Tahun 2024-2026
Pemerintah Kota Pariaman

Kode Rek	Uraian	Target	Proyeksi		Ket
		2023	2024 (Rp)	2025 (Rp)	
2	Belanja	675.911.417.397	685.364.466.101	691.807.988.129	691.807.988.129
2.1	Belanja Operasi	492.981.310.916	537.403.634.892	542.367.750.608	547.791.428.113
2.1.1	Belanja Pegawai	285.854.078.057	320.688.071.973	329.954.952.693	333.254.502.219
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.248.692.859	190.539.331.654	192.034.802.338	193.954.948.381
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	5.370.780.000	19.483.791.285	19.878.829.178	19.875.415.489
2.1.6	Bantuan Sosial	707.780.000	692.640.000	699.588.400	708.582.064
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Operasi	492.981.310.916	537.403.634.892	542.367.750.608	547.791.428.113
2.2	Belanja Modal	100.449.893.682	57.758.021.643	58.335.601.859	58.987.669.400
2.2.1	Belanja Tanah	1.820.000.000	0	0	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.370.432.283	13.089.553.394	13.200.248.918	13.332.251.400
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.240.118.934	14.741.482.450	14.888.897.275	15.108.497.770
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.718.589.465	28.778.795.809	29.068.583.767	29.357.249.805
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	502.753.000	1.188.190.000	1.179.871.900	1.191.670.619
	Jumlah Belanja Modal	100.449.893.682	57.758.021.643	58.335.601.859	58.987.669.400
2.3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.515.000.000	1.530.150.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.515.000.000	1.530.150.000
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.515.000.000	1.530.150.000
2.4	Belanja Transfer	80.980.212.799	88.702.609.566	89.589.635.662	90.485.532.017
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.727.778.899	2.041.174.571	2.081.588.317	2.082.202.179
2.4.2	Belanja Bantuan keuangan	78.252.435.900	86.661.434.995	87.528.049.345	88.403.329.837
	Jumlah Belanja Transfer	80.980.212.799	88.702.609.566	89.589.635.662	90.485.532.017
	Jumlah Belanja	675.911.417.397	685.364.466.101	691.807.988.129	698.794.779.530

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2023 (Di olah)





Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026
Pemerintah Kota Pariaman





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	16	17	18	
A URUSAN WAJIB													
I URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 Urusan Pendidikan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	92	94	117.788.500.253	95	118.966.385.256	96	120.156.049.108	96	356.910.934.617	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
			Nilai	80A									
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD/ MI dengan nilai kemampuan literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	57,66	65	34.620.013.502	70,59	34.966.213.637	82,35	35.315.875.773	82,35	104.902.102.912	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Persentase SMP/ MTs dengan nilai kemampuan literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	50	60		70		80		80		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	57,65	64,71		70,59		82,35		82,35		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	100	100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	100		100		100		100		
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah	100	100	19.000.000	100	19.190.000	100	19.381.900	100	57.571.900	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Jumlah				152.427.513.755		153.951.788.893		155.491.306.781		461.870.609.429	
2 Urusan Kesehatan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	77.459.057.278	100	78.233.647.851	100	79.015.984.329	100	79.015.984.329	Dinkes
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai										
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	99,6	100	43.994.816.261	100	44.434.764.424	100	44.879.112.068	100	44.879.112.068	Dinkes
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	660.569.000	100	667.174.690	100	673.846.437	100	673.846.437	Dinkes
4	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alkes di Puskesmas sesuai standar	%	67,4	65	372.901.000	70	376.630.010	75	380.396.310	75	380.396.310	Dinkes
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu aktif	%	100	85	199.955.000	90	201.954.550	95	203.974.096	95	203.974.096	Dinkes
		Jumlah				122.687.298.539		123.914.171.524		125.153.313.240		125.153.313.240	
3 Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang													





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	16.708.236.838	100	16.875.319.206	100	17.044.072.398	100	50.627.628.443	Dinas PUPR & Pertanian
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai										
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72,39	72,50	1.130.892.000	72,6	1.142.200.920	72,70	1.153.622.929	72,70	1.153.622.929	Dinas PUPR & Pertanian
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	%	24,89	25,89	1.800.000.000	26,89	1.818.000.000	27,89	1.836.180.000	27,89	1.836.180.000	Dinas PUPR & Pertanian
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	%	40,97	42,50	1.469.108.000	45	1.483.799.080	47,50	1.498.637.071	47,5	1.498.637.071	Dinas PUPR & Pertanian
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat teknis	%	32	60	1.500.000.000	65	1.515.000.000	70	1.530.150.000	70	1.530.150.000	Dinas PUPR & Pertanian
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang tertata dan terpelihara	Kawasan	6	7	100.000.000	7	101.000.000	7	102.010.000	7	102.010.000	Dinas PUPR & Pertanian
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	%	72,90	72,16	5.746.446.893	74,60	5.803.911.362	76,40	5.861.950.476	73,70	5.861.950.476	Dinas PUPR & Pertanian
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM Penyelenggara jasa konstruksi yang kompetensi	Orang	50	60	100.000.000	60	101.000.000	60	102.010.000	60	102.010.000	Dinas PUPR & Pertanian
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana dan regulasi tata ruang yang valid dan akurat	Dokumen	2	3	300.000.000	3	303.000.000	3	306.030.000	3	306.030.000	Dinas PUPR & Pertanian
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak termasuk aman	%	91,89% (termasuk aman)	93,89% (termasuk aman 5%)	1.095.459.500	94,89% (termasuk aman 5,7%)	1.106.414.095	95,89% (termasuk aman 6,47%)	1.117.478.236	95,89% (termasuk aman 6,47%)	5.920.000.000	Dinas PUPR & Pertanian
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase penduduk berakses air minum	%	Jaringan Pe	92,00	896.393.750	93,00	905.357.688	94,00	914.411.264	94,00	13.540.000.000	Dinas PUPR & Pertanian
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	0,2746	28,00		28,50		29,00		29,00		
11	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan persampahan	%	16,67	27,78	40.025.000	38,89	40.425.250	50,00	40.829.503	50,00	40.829.503	Dinas PUPR & Pertanian
Jumlah						30.886.561.981		31.195.427.601		31.507.381.877		82.519.048.421	
4 Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	10.821.812.310	100	10.930.030.433	100	11.039.330.737	100	32.791.173.481	Dinas Perkim, Perum & LH
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,75 (A)	81 (A)		82 (A)		83 (A)		83 (A)		
2	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen pengembangan perumahan	Dokumen	0	1	102.735.000	1	103.762.350	1	104.799.974	3	311.297.324	Dinas Perkim, Perum & LH





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	%	0	100		100		100		100		
3	Program Kawasan Permukiman	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	138,29	25,05	10.896.217.500	19,62	11.005.179.675	19,73	11.115.231.472	64,40	33.016.628.647	Dinas Perkim, Perum & LH
		persentase perumahan dan permukiman layak huni (persentase perumahan layak huni)	%	92,44	92,53		92,7		92,87		92,87		
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Unit	52	0	1.557.704.428	15	1.573.281.472	15	1.589.014.287	30	3.162.295.759	Dinas Perkim, Perum & LH
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	%	25	25	318.333.000	25	321.516.330	25	324.731.493	100	964.580.823	Dinas Perkim, Perum & LH
Jumlah						23.696.802.238		23.933.770.260		24.173.107.963		70.245.976.033	
5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat													
a Satpol PP													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	89	90	7.237.901.506	91	7.310.280.521	92	7.383.383.326	92	21.931.565.353	Sat Pol PP
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,65(B)	64,15(B)		67,78(B)		70,10(BB)		70,10(BB)		
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	%	100	100	3.597.926.260	100	3.633.905.523	100	3.670.244.578	100	10.902.076.360	Sat Pol PP
		Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan	%	100	100		100		100				
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	2.035.692.056	15	2.056.048.977	15	2.076.609.466	15	6.168.350.499	Sat Pol PP
		Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		
Jumlah						12.871.519.822		13.000.235.020		13.130.237.370		39.001.992.213	
b Penanggulangan Bencana Daerah													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	85	87	7.913.363.322	89	7.992.496.955	90	8.072.421.925	91	8.072.421.925	BPBD
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,20(B)	80,60(A)		81,61(A)		82,88(A)		82,88(A)		
2	Program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang tertangani	%	100	100	1.948.011.757	100	1.967.491.875	100	1.987.166.793	100	1.987.166.793	BPBD
Jumlah						9.861.375.079		9.959.988.830		10.059.588.718		10.059.588.718	
6 Urusan Sosial													
1	Program Penunjang Urusan	Persentase Ketercapaian penunjang	%	90	91	3.014.625.684	92	3.044.771.941	93	3.075.219.660	93	9.134.617.285	Dinas Sosial





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,80(BB)	75,88(BB)		78,56(BB)		80,01(A)		80,01(A)		
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi PSKS	%	100	100	329.540.000	100	332.835.400	100	336.163.754	100	336.163.754	Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	339.342.670	100	342.736.097	100	346.163.458	100	346.163.458	Dinas Sosial
4	Program Pelindungan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	%	98	98	424.869.150	98	429.117.842	98	433.409.020	98	433.409.020	Dinas Sosial
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	33.366.910	100	33.700.579	100	34.037.585	100	34.037.585	Dinas Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	180.462.950	100	182.267.580	100	184.090.255	100	184.090.255	Dinas Sosial
Jumlah						4.322.207.364	-	4.365.429.438		4.409.083.732		10.468.481.357	
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1. Urusan Tenaga Kerja													
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	42.822.000	1	43.250.220	1	43.682.722	1	42.822.000	DPMPTSP & Naker
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	40	50	254.114.400	60	256.655.544	70	259.222.099	80	769.992.043	DPMPTSP & Naker
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang melindungi Tenaga Kerja	%	20	25	96.902.000	30	97.871.020	35	98.849.730	35	293.622.750	DPMPTSP & Naker
Jumlah						393.838.400		397.776.784		401.754.552		1.106.436.794	
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	85	87	5.518.984.230	89	5.574.174.072	91	5.629.915.813	91	16.723.074.115	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,35(BB)	77,88(BB)		78,56(BB)	-	80,01(A)	-	80,01(A)		
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	%	5	10	244.999.975	10	247.449.975	10	249.924.474	10	742.374.424	DP3AKB
		Jumlah OPD yang mendukung program PPRG	OPD	20	21		22	-	23		23		
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	322.285.000	100	325.507.850	100	328.762.929	100	976.555.779	DP3AKB
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase layanan bagi keluarga dan perlindungan anak	%	100	100	95.990.000	100	96.949.900	100	97.919.399	100	290.859.299	
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase forum kelembagaan anak yang aktif	%	100	100	194.750.000	100	196.697.500	100	198.664.475	100	590.111.975	DP3AKB
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak	%	100	100	257.630.000	100	260.206.300	100	262.808.363	100	780.644.663	DP3AKB
Jumlah						6.634.639.205		6.700.985.597		6.767.995.453		20.103.620.255	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	Jumlah stok pangan yang tersedia	Ton	13031	6000	150.000.000	6000	151.500.000	6000	153.015.000	18000	454.515.000	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	% AKE (Angka Kecukupan Energi)	%	87,8	93,9	538.182.300	100	543.564.123	100	548.999.764	100	1.630.746.187	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
3	Program penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/kelurahan rentan rawan pangan	desa/kelurahan	5	5	56.317.750	4	56.880.928	3	57.449.737	12	170.648.414	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
4	Program Pengawasan Keamanan pangan	Persentase Pengawasan Keamanan pangan	%	100	100	71.928.585	100	72.647.871	100	73.374.350	100	217.950.805	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
Jumlah						816.428.635		824.592.921		832.838.851		2.473.860.407	
4 Urusan Pertanahan													
1	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah penyelesaian penanganan masalah tanah pemko	BA	5	5	73.525.000	5	74.260.250	5	75.002.853	5	75.002.853	Dinas PUPR & Pertanahan
2	Program pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pengsertifikatan tanah pemko	%	71,43	81,93	376.475.000	92,44	380.239.750	100	384.042.148	100	384.042.148	Dinas PUPR & Pertanahan
Jumlah						450.000.000		454.500.000		459.045.000		459.045.000	
5 Urusan Lingkungan Hidup													
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase lingkup dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	%	25	100	546.336.000	100	551.799.360	100	557.317.354	100	1.655.452.714	Dinas Perkim, Perum & LH
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	33,33	36,67	1.140.370.720	37,78	1.151.774.427	38,33	1.163.292.171	38,33	3.455.437.319	Dinas Perkim, Perum & LH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	95,09	93,38		93,81		94,7		94,7		
3	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan	indeks	24,24	24,74	1.385.860.200	25,14	1.399.718.802	25,44	1.413.715.990	25,44	4.199.294.992	Dinas Perkim, Perum & LH
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha pengguna B3 dan penghasil limbah B3 yang mengelola B3 dan limbah B3	%	100	100	19.636.650	100	19.833.017	100	20.031.347	100	59.501.013	Dinas Perkim, Perum & LH
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	75	50.500.000	80	51.005.000	85	51.515.050	85	153.020.050	Dinas Perkim, Perum & LH
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah	%	0%	28	102.742.300	30	103.769.723	30	104.807.420	30	822.742.300	Dinas Perkim, Perum & LH
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup dikota pariaman yang di tangani	%	100	100	10.000.000	100	10.100.000	100	10.201.000	100	74.000.000	Dinas Perkim, Perum & LH
8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	0,663	70	4.340.508.387	70	4.383.913.471	70	4.427.752.606	70	35.290.508.387	
Jumlah						595.954.257		7.671.913.800		7.748.632.938		45.709.956.774	



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	3.602.941.283	100	3.228.848.063	100	3.329.848.063	100	10.161.637.409	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,30 (A)	80,40 (A)	80,50 (A)	80,60 (A)	80,60 (A)						
2	Program pendaftaran penduduk	Persentase Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	%	97,98	99,50	366.292.824	99,60	369.955.752	99,70	373.655.310	99,70	1.109.903.886	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	74,16	78,20	80,25	82,50	82,50						
3	Program Pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	%	97,66	99,00	26.499.996	99,10	26.764.996	99,20	27.032.646	99,20	80.297.638	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Perjanjian Kerja Sama OPD dan Permintaan Data yang ditindaklanjuti	%	0	53,57	71.136.400	64,28	71.847.764	71,42	72.566.242	71,42	215.550.406	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	100	13.999.950	100	14.139.950	100	14.281.349	100	42.421.248	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Jumlah							4.080.870.453		3.711.556.525		3.817.383.609		11.609.810.587	
7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	3.314.301.524	97	3.347.444.539	98	3.380.918.985	98	10.042.665.048	DPM Des	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,25 (BB)	76,25 (BB)	78,15 (BB)	80,10 (A)	80,10 (A)						
2	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Wilayah Desa dan Kewenangan Desa	%	85	90	9.993.914	95	10.093.853	100	10.194.792	100	30.282.559	DPM Des	
3	Program administrasi pemerintahan desa	% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	90	95	441.336.497	95	445.749.862	100	450.207.361	100	1.337.293.720	DPM Des	
4	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	90	95	2.758.941.460	95	2.786.530.875	100	2.814.396.183	100	8.359.868.518	DPM Des	
Jumlah							6.524.573.395		6.589.819.129		6.655.717.320		19.770.109.844	
8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana														
1	Program Pengendalian penduduk	Angka TFR (Total Fertility Rate)	%	2,69	2,57	142.800.000	2,46	144.228.000	2,38	145.670.280	2	432.698.280	DP3AKB	
2	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (UnmetNeed)	%	16,55	16	2.206.489.395	15,50	2.228.554.289	15	2.250.839.832	15	6.685.883.516	DP3AKB	
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Tribina yang aktif	%	75	77	2.518.895.600	80	2.544.084.556	82	2.569.525.402	82	2.569.525.402	DP3AKB	
Jumlah							4.868.184.995		4.916.866.845		4.966.035.513		9.688.107.197	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	90,15	92,33	5.014.143.624	94,56	5.064.285.060	95,70	5.114.927.911	95,70	15.193.356.595	Dinas Perhubungan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,05 (B)	68,15 (B)	70,10 (B)	75,25 (BB)	75,25 (BB)					
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tingkat Pelaksanaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana LLAJ Yang Dibutuhkan	%	90	92,5	3.576.148.746	93	3.611.910.233	94	3.648.029.336	94	3.648.029.336	Dinas Perhubungan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan	%	100	100	486.695.490	100	491.562.445	100	496.478.069	100	496.478.069	Dinas Perhubungan
Jumlah						9.076.987.860		9.167.757.739		9.259.435.316		19.337.864.000	
10 Urusan Komunikasi Dan Informatika													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	3.487.813.519	100	3.522.691.654	100	3.557.918.571	100	10.568.423.744	Dinas Kominfo
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,95 (B)	73,00 (BB)	77,10 (BB)	80,05 (A)	80,05 (A)					
2	Program Informasi dan komunikasi publik	% penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	100	100	1.605.480.200	100	1.621.535.002	100	1.637.750.352	100	4.864.765.554	Dinas Kominfo
3	Program Aplikasi Informatika	% pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	%	100	100	2.553.875.780	100	2.579.414.538	100	2.605.208.683	100	7.738.499.001	Dinas Kominfo
Jumlah						7.647.169.499		7.723.641.194		7.800.877.606		23.171.688.299	
11 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	91	92	4.875.380.864	93	4.924.134.673	94	4.973.376.019	94	14.772.891.556	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,45(BB)	75,65(BB)	80,02(A)	81,01(A)	81,01(A)					
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% Koperasi Yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	54.590.000	100	55.135.900	100	55.687.259	100	55.687.259	Dinas Koperindagkop & KUKM
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	% Usaha Mikro kecil Yang mendapatkan pembinaan	%	5,6	5,8	52.595.064	6,0	53.121.015	6,2	53.652.225	6,2	53.652.225	Dinas Koperindagkop & KUKM
4	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro naik kelas	Jumlah	57	67	73.191.680	77	73.923.597	87	74.662.833	87	74.662.833	Dinas Koperindagkop & KUKM
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus koperasi yang mengikuti Pelatihan	%	50	55	612.881.000	60	619.009.810	70	625.199.908	70	625.199.908	Dinas Koperindagkop & KUKM
Jumlah						5.668.638.608		5.725.324.994		5.782.578.244		15.582.093.781	
12 Urusan Penanaman Modal													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	4.098.672.998	97	4.139.659.728	98	4.181.056.325	98	12.419.389.051	Dinas PM, PTSP & Naker





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,55 (BB)	81,05 (A)	70.000.000	83,15 (A)	-	85,25 (A)	-	85,25 (A)		
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah dokumen potensi investasi daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	Dokumen	1	1	70.000.000	1	70.700.000	1	71.407.000	1	212.107.000	Dinas PM, PTSP & Naker
3	Program promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berminat	Investor	1	2	30.875.000	3	31.183.750	4	31.495.588	4	93.554.338	Dinas PM, PTSP & Naker
4	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu	%	80	82	298.972.579	85	301.962.305	90	304.981.928	90	905.916.812	Dinas PM, PTSP & Naker
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM	%	30	40	397.530.000	50	401.505.300	60	405.520.353	60	1.204.555.653	Dinas PM, PTSP & Naker
Jumlah						4.896.050.577		4.945.011.083		4.994.461.194		14.835.522.853	
13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga													
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65	68	2.584.308.000	70	2.610.151.080	74	2.636.252.591	74	7.830.711.671	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase sarana prasarana olahraga yang representatif	%	90	92	2.635.470.998	94	2.661.825.708	95	2.688.443.965	95	7.985.740.671	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan terhadap organisasi Kepramukaan	%	100	100	300.000.000	100	303.000.000	100	306.030.000	85	909.030.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah						5.519.778.998		5.574.976.788		5.630.726.556		16.725.482.342	
14 Urusan Statistik													
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	% ketersediaan data sektoral	%	100%	100	50.055.944	100	50.556.503	100	51.062.068	100	151.674.516	Dinas Kominfo
Jumlah						50.055.944		50.556.503		51.062.068		151.674.516	
15 Urusan Persandian													
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	% Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik	%	100%	100	78.157.250	100	78.938.823	100	79.728.211	100	236.824.283	Dinas Kominfo
Jumlah						78.157.250		78.938.823		79.728.211		236.824.283	
16 Urusan Kebudayaan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	9.567.704.008	97	9.663.381.048	98	9.760.014.859	98	28.991.099.915	Dinas Parbud
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,10(B)	70,15(BB)		75,27(BB)	-	80,01(A)	-	80,01(A)		
2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi	Kelompok	75	100	1.258.186.000	100	1.270.767.860	100	1.283.475.539	100	3.812.429.399	Dinas Parbud
3	Program pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional Yang Didampingi	kelompok	100	50	349.998.098	70	353.498.079	80	357.033.060	80	1.060.529.237	Dinas Parbud
4	Program Pengelolaan	Persentase museum kota pariwisata	%	100	100	97.174.342	100	98.146.085	100	99.127.546	100	294.447.974	Dinas Parbud



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Jumlah						11.273.062.448		11.385.793.072		11.499.651.003		34.158.506.524	
17 Urusan Perpustakaan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%			4.427.273.782		4.471.546.520		4.516.261.985		13.415.082.287	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai					-		-			
2	Program pembinaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan ber SNP	Unit	17	34	595.983.000	51	601.942.830	68	607.962.258	68	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah						5.023.256.782		5.073.489.350		5.124.224.243		13.490.082.287	
18 Urusan kearsipan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	1.557.704.428	100	1.573.281.472	100	1.589.014.287	100	4.720.000.187	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai										
1	Program pengelolaan arsip	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	17,86	35,71	110.000.000	53,57	111.100.000	71,43	112.211.000	71,43	112.211.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi	Dok	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.301.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah						1.682.704.428		1.699.531.472		1.716.526.787		4.847.512.687	
B. URUSAN PILIHAN													
1. Urusan kelautan dan perikanan													
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	325,01	330	533.259.500	333	538.592.095	335	543.978.016	998	1.615.829.611	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	6.244	6.400	247.727.500	6.420	250.204.775	6.440	252.706.823	19.260	750.639.098	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita per tahun	44,5	45,2	211.338.000	45,9	213.451.380	46,6	215.585.894	46,6	640.375.274	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
Jumlah						992.325.000		1.002.248.250		1.012.270.733		3.006.843.983	
2 Urusan Pariwisata													
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam kondisi baik	%	60	70	5.407.078.115	75	5.461.148.896	80	5.515.760.385	80	16.383.987.396	Dinas Parbud
2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	%	75	80	366.294.113	85	369.957.054	90	373.656.625	90	1.109.907.792	Dinas Parbud
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	80	85	75.000.000	90	75.750.000	95	76.507.500	95	227.257.500	Dinas Parbud
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pembinaan sumber daya pariwisata yang dilaksanakan	%	80	85	349.999.964	90	353.499.964	95	357.034.963	95	1.060.534.891	Dinas Parbud
Jumlah						198.372.192		6.260.355.914		6.322.959.473		18.781.687.579	





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 Urusan Pertanian													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	94,41	95	15.304.068.518	95	15.457.109.203	95	15.611.680.295	95	46.372.858.016	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	? (B)	82,43 (A)		82,45 (A)		82,46 (A)		82,46 (A)		
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	26.092	22.397	913.600.000	22.845	922.736.000	23.302	931.963.360	68.544	2.768.299.360	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Jumlah Produksi Cabai Besar	Kwintal	1534,15	1.565		1.596		1.628		4.789		
		Jumlah Produksi Kelapa Dalam	Ton	3057,66	3.119		3.181		3.245		9.545		
		Jumlah Produksi Daging Sapi	Kg	538,261	549,026		560,007		371,207		1.480		
3	Program pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	Persentase penurunan luasan serangan OPT	%	1,46	20	115.560.500	20	116.716.105	20	117.883.266	20	350.159.871	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit zoonosis	%	33,33	20	678.778.635	20	685.566.421	20	692.422.086	20	2.056.767.142	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	100	100	133.848.000	100	135.186.480	100	136.538.345	100	405.572.825	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
6	Program penyuluhan pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas kemampuan	kelompok	2	2	518.526.500	3	523.711.765	4	528.948.883	9	1.571.187.148	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
Jumlah						17.664.382.153		17.841.025.975		18.019.436.234		53.524.844.362	
4 Urusan kehutanan													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah													
5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah													
6 Urusan Perdagangan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	100	100	3.353.218.378	100	3.386.750.562	100	3.420.618.067	100	10.160.587.007	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai										
2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pemantauan stabilisasi harga barang pokok dan barang penting lainnya	%	100	100	48.199.590	100	48.681.586	100	49.168.402	100	146.049.578	Dinas Koperindagkop & KUKM



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	100	100	59.718.300	100	60.315.483	100	60.918.638	100	180.952.421	Dinas Koperindagkop & KUKM
4	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	kerjasama	3	5	93.033.340	7	93.963.673	9	94.903.310	9	281.900.324	Dinas Koperindagkop & KUKM
5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar/ perdagangan dalam kondisi baik	%	72,5	75	1.079.543.368	80	1.090.338.802	85	1.101.242.190		3.271.124.359	Dinas Koperindagkop & KUKM
Jumlah						4.633.712.976		4.680.050.106		4.726.850.607		14.040.613.689	
7 Urusan Perindustrian													
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Pamekasan	Dokumen	-	1	451.403.750	1	455.917.788	1	460.476.965	3	1.367.798.503	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Persentase Kesesuaian Pembangunan Industri Kota Pamekasan	%	-	95		95		95		95		
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah industri yang memiliki Izin Usaha Industri	Izin	-	20	40.000.000	30	40.400.000	40	40.804.000	90	121.204.000	Dinas Koperindagkop & KUKM
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SiINAS)	Jumlah pelaku industri yang terdata dalam aplikasi SiINAS	Industri	4	24	20.500.000	54	20.705.000	94	20.912.050	94	62.117.050	Dinas Koperindagkop & KUKM
Jumlah						511.903.750		517.022.788		522.193.015		1.551.119.553	
8 Urusan Transmigrasi													
-													
-													
-													
-													
-													
Jumlah													
C UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH													
1. Unsur Sekretariat Daerah													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	22.627.007.172	97	22.853.277.244	98	23.081.810.016	98	68.562.094.432	Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,35 (BB)	74,15 (BB)		78,25 (BB)		80,10 (A)		80,10 (A)		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Kualitas Pengelolaan Harmonisasi Kebijakan dan Penyelesaian Masalah Hukum	%	100	100	3.800.346.600	100	3.838.350.066	100	3.876.733.567	100	11.515.430.233	Bagian Hukum
		Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan yang Terjalin	%	100	100		100		100		100		Bagian Pemerintahan





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa)	%	67,6 (Cukup)	71 (Baik)	769.948.390	72 (Baik)	777.647.874	73 (Baik)	785.424.353	73 (Baik)	2.333.020.617	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat
Jumlah						27.197.302.162		27.469.275.184		27.743.967.935		82.410.545.281	
2 Unsur Sekretariat DPRD													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	13.859.385.843	97	13.997.979.701	98	14.137.959.498	98	41.995.325.043	Sekretariat DPRD
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,10 (B)	70,15 (BB)	74,25 (BB)	79,00 (BB)	79,00 (BB)	79,00 (BB)				
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase capaian dukungan fasilitasi sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD	%	85	90	8.974.966.213	95	9.064.715.875	100	9.155.363.034	100	27.195.045.122	Sekretariat DPRD
Jumlah						22.834.352.056		23.062.695.577		23.293.322.532		69.190.370.165	
D UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
1. Unsur Perencanaan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	95	96	6.385.241.733	97	6.449.094.150	98	6.513.585.092	98	6.513.585.092	Bappeda
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,80 (BB)	83,15(A)	86,25(A)	88,40(A)	88,40(A)					
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86) Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.370.118.142	100	1.383.819.323	100	1.397.657.517	100	1.397.657.517	Bappeda
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	%	90	91	847.831.374	92	856.309.688	93	864.872.785	93	864.872.785	Bappeda
		Persentase konsistensi Renstra PD dengan Renja PD	%	89	90	91	92	92					
Jumlah						8.603.191.249		8.689.223.161		8.776.115.393		8.776.115.393	
2 Unsur Keuangan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	90	91	21.687.644.208	92	21.904.520.650	93	22.123.565.857	93	65.715.730.715	BPKPD
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,85(B)	65,25(B)	70,60(BB)	75,01(BB)	75,01(BB)					
2	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	%	100	100	93.135.614.980	100	94.066.971.130	100	95.007.640.841	100	282.210.226.951	BPKPD



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100			
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100			
3	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	%	100	100	867.972.612	100	876.652.338	100	885.418.862	100	2.630.043.812	BPKPD
4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	100	100	1.599.613.000	100	1.615.609.130	100	1.631.765.221	100	4.846.987.351	BPKPD
Jumlah						117.290.844.800		118.463.753.248		119.648.390.780		355.402.988.828	
3 Unsur Kepegawaian													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	90	91	5.419.478.303	92	5.473.673.086	93	5.528.409.817	93	16.421.561.206	BKPSDM
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,25 (B)	75,55 (BB)		78,15 (BB)		80,20 (A)		80,20 (A)		
2	Program kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	45,85 (Sangat rendah)	85,93 (Tinggi)	2.483.464.207	86,54 (Tinggi)	2.508.298.849	87,11 (Tinggi)	2.533.381.838	87,11 (Tinggi)	7.525.144.894	BKPSDM
Jumlah						7.902.942.510		7.981.971.935		8.061.791.654		23.946.706.100	
4 Unsur Penelitian dan Pengembangan													
1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan	%	75	80	483.122.950	85	487.954.180	90	492.833.721	90	492.833.721	Bappeda
Jumlah						483.122.950		487.954.180		492.833.721		492.833.721	
E UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
1 Inspektorat Daerah													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	92,5	94	9.003.277.639	95	9.093.310.415	98	9.184.243.520	98	27.280.831.574	Inspektorat
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,30(BB)	82,70(A)		83,10(A)		84,15		84,15		
2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	72	75	479.192.701	80	483.984.628	82	488.824.474	82	1.452.001.803	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut temuan APIP	%	85	90		92		95		95		
		Persentase pencapaian PKPT	%	78	80		85		90		90		
2	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD bernilai Maturitas SPIP 3	%	50	70	4.324.850	75	4.368.099	80	4.411.779	80	13.104.728	Inspektorat
Jumlah						9.486.795.190		9.581.663.142		9.677.479.773		28.745.938.105	
F PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
1 Kecamatan Pariaman Utara													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	88	89	2.056.302.076	90	2.076.865.097	91	2.097.633.748	91	6.230.800.920	Kecamatan Pariaman Utara
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	56,75 (CC)	70,23 (BB)		75,60 (BB)		81,02 (A)		81,02 (A)		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100	100	57.000.000	100	57.570.000	100	58.145.700	100	172.715.700	Kecamatan Pamekasan Utara
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	80	82	33.000.000	83	33.330.000	85	33.663.300	85	99.993.300	Kecamatan Pamekasan Utara
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	%	81	83	18.548.000	85	18.733.480	87	18.920.815	87	56.202.295	Kecamatan Pamekasan Utara
5	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi yang dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	128.584.000	100	129.869.840	100	131.168.538	100	389.622.378	Kecamatan Pamekasan Utara
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan	%	100	100	96.680.000	100	97.646.800	100	98.623.268	100	292.950.068	Kecamatan Pamekasan Utara
Jumlah						2.390.114.076		2.414.015.217		2.438.155.369		7.242.284.662	
2 Kecamatan Pamekasan Tengah													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	88	89	8.287.119.788	90	8.369.990.986	91	8.453.690.896	91	25.110.801.670	Kecamatan Pamekasan Tengah
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	56,75 (CC)	70,23 (BB)		75,60 (BB)		81,02 (A)		81,02 (A)		
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100	100	57.000.000	100	57.570.000	100	58.145.700	100	172.715.700	Kecamatan Pamekasan Tengah
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	80	82	33.000.000	83	33.330.000	85	33.663.300	85	99.993.300	Kecamatan Pamekasan Tengah
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase peningkatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	%	81	83	18.548.000	85	18.733.480	87	18.920.815	87	56.202.295	Kecamatan Pamekasan Tengah
5	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi yang dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	128.584.000	100	129.869.840	100	131.168.538	100	389.622.378	Kecamatan Pamekasan Tengah
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan	%	100	100	96.680.000	100	97.646.800	100	98.623.268	100	292.950.068	Kecamatan Pamekasan Tengah
Jumlah						8.620.931.788		8.707.141.106		8.794.212.517		26.122.285.411	
3 Kecamatan Pamekasan Timur													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	86	87	3.943.919.211	88	3.983.358.403	89	4.023.191.987	89	11.950.469.601	Kecamatan Pamekasan Timur
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,70 (B)	66,25 (B)		71,15 (BB)		72,10 (BB)		72,10 (BB)		
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	%	100	100	120.000.000	100	121.200.000	100	122.412.000	100	363.612.000	Kecamatan Pamekasan Timur
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	85.000.000	100	85.850.000	100	86.708.500	100	257.558.500	Kecamatan Pamekasan Timur





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	52.500.000	100	53.025.000	100	53.555.250	100	159.080.250	Kecamatan Pamekasan Timur
4	Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase Monev Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90	91	140.000.000	92	141.400.000	93	142.814.000	93	424.214.000	Kecamatan Pamekasan Timur
6	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan	%	100	100	140.000.000	100	141.400.000	100	142.814.000	100	424.214.000	Kecamatan Pamekasan Timur
Jumlah						4.481.419.211		4.526.233.403		4.571.495.737		13.579.148.351	
4 Kecamatan Pamekasan Selatan													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	88	89	4.164.621.428	90	4.206.267.642	91	4.248.330.319	91	12.619.219.389	Kecamatan Pamekasan Selatan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,80 (B)	68,45 (BB)		72,53 (BB)	73,87 (BB)	73,87 (BB)				
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	44.690.000	100	45.136.900	100	45.588.269	100	135.415.169	Kecamatan Pamekasan Selatan
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	%	80	82	122.000.000	83	123.220.000	85	124.452.200	85	369.672.200	Kecamatan Pamekasan Selatan
4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	53.400.000	100	53.934.000	100	54.473.340	100	161.807.340	Kecamatan Pamekasan Selatan
5	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan	%	100	100	135.000.000	100	136.350.000	100	137.713.500	100	409.063.500	Kecamatan Pamekasan Selatan
Jumlah						2.390.114.076		2.414.015.217		2.438.155.369		7.242.284.662	
G URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	%	90	91	3.636.086.215	92	3.672.447.077	93	3.709.171.548	93	11.017.704.840	Kesbang pol
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,00(BB)	80,02(A)		81,78(A)	82,86(A)	82,86(A)				
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	60	70	1.215.777.895	75	1.227.935.674	80	1.240.215.031	80	3.683.928.600	Kesbang pol
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif	%	90%	95	14.324.468.465	97	14.467.713.150	100	14.612.390.281	100	43.404.571.896	Kesbang pol
		Persentase partisipasi pemilih	%	68	70		-		-		-		
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	%	75	80	41.579.950	85	41.995.750	90	42.415.707	100	125.991.406	Kesbang pol





NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Per Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi P4GN(Pencegahan , Pemberantasan , penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba)	%	50	65	172.912.500	70	174.641.625	80	176.388.041	80	523.942.166	Kesbang pol
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase pengendalian (deteksi dini) gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan	%	80	85	750.649.500	90	758.155.995	100	766.737.555	100	2.274.543.050	Kesbang pol
Jumlah						20.141.474.525		20.342.889.270		20.546.318.163		61.030.681.958	
TOTAL						685.364.466.101		691.807.988.129		698.794.779.530		1.780.920.781.219	





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Sementara Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

8.1 Indikator Kinerja Utama

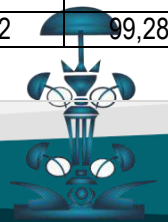
Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.





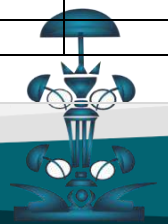
Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026
Pemerintah Kota Pariaman

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan 1 :							
	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,07	77,88	78,15	78,42	78,42
1.1	Sasaran 1.1 :							
	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,61	14,73	14,79	14,85	14,85
		2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,78	11,22	11,46	11,72	11,72
1.2	Sasaran 1.2 :							
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,67	71,31	71,71	72,21	72,21
		2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,6	15,7	12,8	10,3	10,3
1.3	Sasaran 1.3 :							
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	(Ribu/Rp)	13.150	13,814	14,146	14,478	14,478
1.4	Sasaran 1.4 :							
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,42	55,25	57,45	59,55	59,55
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,62	99,28	99,50	99,72	99,72





NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(IPG)						
2.	Tujuan 2 :							
	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,55	5,25	5,45	5,65	5,65
		2. Gini Ratio (Indeks Gini)	Nilai	0,272	0,255	0,250	0,245	0,245
2.1	Sasaran 2.1 :							
2.2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sasaran 2.2 :	1. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,45	15,91	16,14	16,37	16,37
2.3	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sasaran 2.3 :	1. Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	17,93	17,95	17,96	17,97	17,97
2.4	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata Sasaran 2.4 :	1. Persentase Pertumbuhan spending of money	%	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0
2.4	Meningkatnya iklim usaha dan investasi Sasaran 2.5 :	1. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,2	2,6	2,8	3,0	3,0
2.5	Menurunnya angka kemiskinan Sasaran 2.6 :	1. Angka Kemiskinan	%	4,13	3,92	3,76	3,55	3,55
2.6	Menurunnya angka pengangguran Sasaran 2.7 :	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,19	4,72	4,54	4,10	4,10





NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kemandirian Desa	1. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7744	0,7874	0,8003	0,8133	0,8133
3.	Tujuan 3 :							
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Indeks RB	Indeks	62,68 (B)	65,65 (B)	70,05 (B)	72,35 (BB)	74,25 (BB)
3.1	Sasaran 3.1 :							
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP Kota	Indeks	61,08 (B)	65,15 (B)	70,01 (BB)	75,25 (BB)	75,25 (BB)
		2. Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Sasaran 3.2 :							
	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks SPBE	Indeks	2,64	2,7	2,85	3,0	3,0
		2. Indeks Profesional ASN	Indeks	45,85 (Sangat Rendah)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)
3.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,40 (Sangat Baik)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,21 (Baik)	83,15 (Baik)	86,20 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)





NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Tujuan 4 :							
	Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	1. Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)	%	61,4	63,25	65,15	68,40	68,40
4.1	Sasaran 4.1 :							
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1. Indeks Infrastruktur Daerah	%	62,08	64,25	66,15	68,25	68,25
4.2	Sasaran 4.2 :							
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,35	57,02	57,70	58,08	58,08
4.3	Sasaran 4.3 :							
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	82,53	84,15	85,10	86,25	86,25
		2. Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Ha	138,29 Ha	25,05 Ha	19,62 Ha	19,73 Ha	64,4 Ha
4.4	Sasaran 4.4 :							
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	44	46	48	52	52
4.5	Sasaran 4.5 :							
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban	%	66,25	69,15	72,06	75,01	75,01





NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun ke-			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9





8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kota Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2026
Peemerintah Kota Pariaman

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan PDRB	%	Dimana $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	4,55	5,25	5,45	5,65	5,65	BPS/Bappeda
2	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Rp juta	Dimana: $\frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan Tahun}}$ Pi = tahun pengamatan PDRB Qi = tahun pengamatan PDRB sebelumnya n= tahun ...	13.150	13.482	13.482	13.814	13.814	BPS/Bappeda
3	Indeks Gini	nilai	Dimana : $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i+1})$ Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = Ketimpangan Rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang G > 0,5 = Ketimpangan tinggi	0,272	0,255	0,250	0,245	0,245	BPS/Bappeda





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	100 - angka kemiskinan	4,13	3,92	3,76	3,55	3,55	BPS/Bappeda
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	<p>Dimana</p> $\frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>$X_{(1)} = \text{Indeks Harapan Hidup}$</p> <p>$X_{(2)} = \text{Indeks Pendidikan}$</p> <p>= 2/3 (indeks melek huruf)+ 1/3 (indeks rata rata lama sekolah)</p> <p>$X_{(2)} = \text{Indeks Standar Hidup Layak}$</p> $\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\maks} - X_{(i)\min}]}$ <p>dimana:</p> <p>$X_{(i)} = \text{Indikator ke } - i (i = 1,2,3)$</p>	77,07	77,88	78,15	78,42	78,42	BPS/Bappeda
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	10,78	11,22	11,46	11,72	11,72	BPS/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Angka usia harapan hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,67	71,31	71,71	72,21	72,21	BPS/Dinas Kesehatan
8	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\sum \text{penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	5,19	4,72	4,54	4,10	4,10	BPS/Dinas PMPTSP & Naker
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	nilai	$\frac{\sum \text{Nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total unsur yg terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	4,40 (Sangat Baik)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)	Bag. Organisasi





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	$\frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	6,45	6,50	6,55	6,60	6,60	BPKPD
11	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuanga daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD/Inspektorat
12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	89,1	89	89,5	90	90	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
13	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Pertanian/Perkebunan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	17,93	17,95	17,96	17,97	17,97	BPS/Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Pariwisata}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	15,45	15,91	16,14	16,37	16,37	BPS/Bappeda/Disk operindagkop & KUKM
16	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB sektor Industri}}{\sum \text{PDRB}} \times 100\%$	2,86	3,41	3,96	4,51	4,51	BPS/Bappeda/Disk operindagkop & KUKM
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Angka kriminalitas yang tertangani	angka	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kriminal yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kriminal yang terjadi}} \times 100\%$	85 %	86 %	88 %	90 %	90 %	Kepolisian/Kesbangpol/Bappeda
2	Rasio ketergantungan	rasio	$\frac{\sum \text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64 \text{ th}}{\sum \text{Penduduk usia } 15 - 64} \times 100\%$	56,21	56,21	56,21	56,21	56,21	BPS/Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM									
I. Layanan Urusan Wajib Dasar									
1. Pendidikan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9		
Angka Partisipasi Kasar									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	80,11	80,5	81	81,5	81,5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah menyelesaikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar yang bersangkutan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Kesehatan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	75	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	90,71	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	92,23	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\%$	96,93	100	100	100	100	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\%$	97,57	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$	88,40	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	69,68	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	83,83	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100\%$	52,81	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100\%$	105,4	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota}} \times 100\%$	104,1	100	100	100	100	Dinas Kesehatan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100\%$	88,16	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$	79,11	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

3. Penataan Ruang

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$	17,06	17,25	17,50	17,75	17,75	Dinas PUPR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}} \times 100\%$	59,70	60	61,50	62,5	62,5	Dinas PUPR





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$	61	62	63	64	64	Dinas PUPR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga seluruh kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah kamulatif masyarakat yang ramah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$		96,55	98,45	100	100	Dinas PUPR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa tablak + jumlah rumah yang hampir terjaya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sebangun rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$		71,53	74,03	76,03	76,03	Dinas PUPR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	63	70	75	80	80	Dinas PUPR
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100\%$	72,9	74,4	75,9	77,4	77,4	Dinas PUPR





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	20	60	80	80	80	Dinas PUPR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	0	50	80	80	80	Dinas PUPR

4. Perumahan dan Permukiman

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	$\frac{\text{jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	0	50	60	70	70	Dinas PerkimLH
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penggantian Tanah dan/atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyesuaian Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	0	100	100	100	100	Dinas PerkimLH





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	47,09	18,11	14,19	14,27	46,57	Dinas PerkimLH
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	$\frac{\text{jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\%$	7,56	7,47	7,36	7,22	7,22	Dinas PerkimLH
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	$\frac{\text{jumlah unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	40	47	50	52	55	Dinas PerkimLH

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	$\frac{\text{jumlah permasalahan yang ditanggapi}}{\text{jumlah permasalahan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	$\frac{\text{jumlah Perda/Perkado yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan teralunjak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</i> X 100% <i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</i>	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
6. Sosial									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	92	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Abitasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	98,6	100	100	100	100	Dinas Sosial

II. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

7. Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$	0	40	60	80	80	Dinas PMPTSP & Naker





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	0,059	4.47	5.03	5.25	5.25	Dinas PMPTSP & Naker
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	84,55	85.5	87	88.6	88.6	Dinas PMPTSP & Naker
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	27,27	32.5	35	37.5	37.5	Dinas PMPTSP & Naker
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100\%$	12	12.71	13.56	14.12	14.12	Dinas PMPTSP & Naker

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	0,213	0,3	0,4	0,5	0,5	DP3AKB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	$\frac{\text{Jumlah anak (perempuan usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang dilampirkan ke instansi APBD}}{\text{Jumlah Anak (Perempuan usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	DP3AKB





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang Mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	0,034	0,032	0,03	0,028	0,028	DP3AKB
3. Pangan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase kesiapan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	209,37	200	200	200	200	
4. Pertanahan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	80	82	84	86	86	Dinas PUPR & Pertanahan
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	70	72	74	76	76	Dinas PUPR & Pertanahan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	lokasi	$\frac{\text{Jumlah tanah yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	-	1	1	1	1	Dinas PUPR & Pertanahan
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kasus	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	5	5	5	5	5	Dinas PUPR & Pertanahan
5	Persentase Tanah Pemko yang disertifikatkan	%	$\frac{\text{Jumlah aset tanah Pemko yang telah disertifikatkan}}{\text{Jumlah aset tanah}} \times 100\%$	39,92	50,31	60,71	71,10	71,10	Dinas PUPR & Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	$IKL = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	56,35	57,02	57,70	58,08	58,08	Dinas Perkim LH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total vol timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	70,57	71	70	70	70	Dinas Perkim LH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melampirkan izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota}}{\text{usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemerintah}} \times 100\%$	100	50	50	50	50	Dinas Perkim LH





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Perekaman KTP elektronik	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	97,98	99,50	99,60	99,70	99,70	Dinas Dukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	74,16	78,20	80,25	82,50	82,50	Dinas Dukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	97,66	99,00	99,10	99,20	99,20	Dinas Dukcapil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	0,00	53,57	64,28	71,42	71,42	Dinas Dukcapil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Pembangunan per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun)}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	DPMD





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah desa berkebang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkebang (per awal tahun n)}} \times 100\%$	27,27	32,72	36,36	40	40	DPMD

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	$LPP = \frac{\text{Penduduk Akhir} - \text{Penduduk Awal}}{\text{Penduduk Awal}} \times 100\%$	1,45	1,44	1,55	1,7	1,7	DP3AKB
2	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	$TFR = (\text{ASFR15-19} + \text{ASFR20-24} + \dots)$	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	DP3AKB
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Indeks desa Membangun per tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}$	65,47	66	67	68	68	DP3AKB
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	15,25	15	14,75	14,5	14,5	DP3AKB

9. Perhubungan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	<p>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota \times bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb \times bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil 	66,7	66,7	66,7	100	100	Dinas Perhubungan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			<p>- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p>						





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5						
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,32	0,32	0,32	0,3	0,3	Dinas Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	50	70	70	70	70	Dinas Kominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	24	25	27	30	30	Disperindagkop & KUKM
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Disperindagkop & KUKM
12. Penanaman Modal									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$	-22,07	42,1	10	10	10	DPMPSTP
13. Kepemudaan dan Olah Raga									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	3,53	3,63	3,73	3,83	3,83	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	6,76	6,8	6,95	7,1	7,1	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	1	1	1	1	Dinas Pemuda dan Olahraga

14. Statistik

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	78	85	89	92	92	Dinas Kominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	71	78	82	85	85	Dinas Kominfo





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
15. Persandian									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melakukan keamanan data/ informasi}}{\text{semua OPD}} \times 100\%$	35	53	64	71	71	Dinas Kominfo
16. Kebudayaan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Perpustakaan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Hasil Survey	0	50	55	60	60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Hasil Survey	93,38	94	95	96	96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18. Kearsipan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	$T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50	55	60	65	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0	5	10	15	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
III. Layanan Urusan Pilihan									
1. Pariwisata									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	0,009	0,009	0,02	0,07	0,07	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	0,043	0,045	0,051	0,075	0,075	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Tingkat hunian akomodasi	%	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	1,08	1,08	1,09	1,1	1,1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10	10	15	20	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Pertanian									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	0,131	0,131	0,132	0,133	0,133	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan (I)} - \text{Jumlah kejadian/ kasus penyakit/ kasus menular tahun sebelumnya (I-I)}}{\text{Jumlah kejadian/ kasus penyakit/ kasus menular tahun sebelumnya (I-I)}} \times 100\%$	33,33	20	20	20	20	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3. Perdagangan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/kota}} \times 100\%$	50	50	60	75	75	Disperindagkop & KUKM
2	Prestasi kinerja realisasi pupuk	%	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	46	46	55	63	63	Disperindagkop & KUKM
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Disperindagkop & KUKM
4. Perindustrian									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	0,68	0,68	0,70	0,75	0,75	Disperindagkop & KUKM
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	-	3	3	4	5	5	Disperindagkop & KUKM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	%	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0,8	0,8	0,9	0,10	0,10	Disperindagkop & KUKM
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	%	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0,4	0,4	0,6	0,6	0,60	Disperindagkop & KUKM
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0	0	0	0,00	0,00	Disperindagkop & KUKM
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi	100	100	100	100	100	Disperindagkop & KUKM





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			Informasi bahan baku dan bahan penolong						
			Informasi bahan bakar/energy						
			Informasi tenaga kerja						
			Informasi investasi						

5. Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	6,569	6.730	6.753	6.775	6.775	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

IV. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	$25\% \times \{ \text{Capaian Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja} \} + 25\% \times \{ \text{Capaian Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja} \} + 25\% \times \{ \text{Persentase target prioritas pembangunan daerah (RPD) yang tercapai} \} + 25\% \times \{ \text{Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan} \}$	68,8	73,6	77,5	81,0	81,0	Bappeda





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2. Keuangan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	$\frac{\text{jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$	18,86	19,01	19,21	19,46	19,46	BPKPD
2	Rasio PAD	%	$\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah APBD non migas}} \times 100\%$	0,08	0,09	0,1	0,11	0,11	BPKPD
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	$\frac{\text{jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	0,71	0,81	0,81	0,96	0,96	BPKPD
4	Opini Laporan Keuangan	%	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	5,53	4,05	3,55	3,10	3,10	BPKPD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	0,68	0,89	0,90	0,95	0,95	BPKPD
7	Manajemen Aset	%	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA	YA	YA	YA	BPKPD





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	0,13	0,10	0,80	0,60	0,60	BKPPD
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	85,6	86,46	87,32	88,19	88,19	BKPSDM
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS Fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	0,21	0,231	0,254	0,280	0,280	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	0,51	0,520	0,531	0,536	0,536	BKPSDM
4. Penelitian dan Pengembangan									
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	Jumlah dokumen penelitian daerah dalam yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan dibagi dengan Jumlah seluruh dokumen perencanaan pembangunan x 100 %	70	73,5	76,5	80	80	Bappeda

5. Pengawasan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	3	3	3	Inspektorat
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3,09	3,15	3,2	3,2	Inspektorat

6. Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditangani pada kuartal pertama	%	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	$\frac{\text{jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	65	30	30	30	30	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	$\frac{\text{jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja langsung}} \times 100\%$	44	45	55	65	65	Sekretariat Daerah

7. Sekretariat Dewan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	IKM layanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey	90	91	92	93	93	Sekretariat DPRD

8. Unsur Kewilyahan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Urusan pemerintahan umum

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11





No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian			Kinerja Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	IKM Pelayanan Kecamatan	Indeks	Hasil Survey	81,25	83,15	84,45	85,55	85,55	Kecamatan
2	% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Kecamatan





BAB IX

PENUTUP



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pariaman. RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

9.1 Kaidah Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 ini berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kota Pariaman, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2024-2026;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta

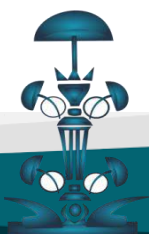


- program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026;
- 3) Pemerintah Kota Pariaman wajib menjamin konsistensi Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 - 4) Bagi program prioritas pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pariaman tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal ini pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR), Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, Bappeda Kota Pariaman wajib melakukan penyalarsan antara penjabaran RPD Tahun 2024-2026 kedalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 44
Kota Pariaman - Sumatera Barat
Indonesia

Telp. +62-751-93552 Fax. +62-751-96757
E-mail: bappedakotapariaman@gmail.com
www : bappeda.pariamankota.go.id
www : pariaman.go.id